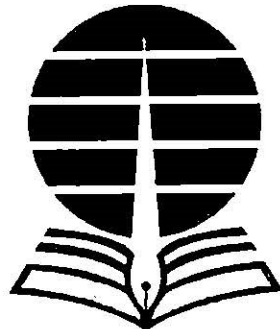


## **TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)**

# **KAPASITAS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DALAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN LAHAN DAN HUTAN**



**UNIVERSITAS TERBUKA**

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat  
Administrasi Publik**

**Disusun Oleh :**

**RENELI**

**NIM. 500878267**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS TERBUKA**

**JAKARTA**

**2018**

## ABSTRAK

### KAPASITAS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DALAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN LAHAN DAN HUTAN

Reneli  
[reneli68se@gmail.com](mailto:reneli68se@gmail.com)

Program Pascasarjana  
Universitas Terbuka

Kapasitas lembaga menunjukkan kemampuan organisasi atau sistem untuk menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya secara efektif, efisien dan terus menerus menjadi titik tolak keberhasilan sebuah lembaga sehingga bagaimana kapasitas sebuah lembaga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi demi mencapai tujuan lembaga sangat penting untuk diketahui. Berawal dari sebuah kapasitas yang baik maka lembaga mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (BPBD KOBAR) dalam penanggulangan kebakaran lahan dan hutan serta mengkaji faktor pendukung dan penghambat kapasitas BPBD Kobar dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Desain Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang mendeskripsikan bagaimana fungsi-fungsi organisasi dalam penanggulangan bencana dijalankan, fokus penelitian terletak pada tahapan penanggulangan bencana yaitu pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Faktor pendukung dan penghambat menjadi fokus penjabaran lainnya dalam mendeskripsikan kapasitas BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terstruktur pada sebelas informan inti dan tiga belas informan pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas BPBD Kobar berada pada level cukup yang berarti bahwa penyelenggaraan manajerial sebagian telah dilaksanakan secara sistematis, dan penyelenggaraan penanggulangan sampai pada taraf koordinasi yang terstruktur, dalam kerangka kebijakan yang belum menyuruh. Faktor-faktor yang mampu mendukung kapasitas adalah kesamaan nilai dan budaya, komitmen bersama dan kepemimpinan yang kondusif. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat adalah keterbatasan sumberdaya dan belum adanya tataran baku teknis dan SOP dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dari hasil penelitian tersebut diharapkan BPBD Kobar mampu meningkatkan kapasitasnya dengan mengatasi faktor penghambat kapasitas melalui kerjasama dan peningkatan kompetensi.

**Kata Kunci :** *Kapasitas, Penanggulangan Bencana, Kebakaran Lahan dan Hutan, BPBD,*

**ABSTRACT****THE CAPACITY OF REGIONAL DISASTER MANAGEMENT AGENCY  
(BPBD) KOTAWARINGIN BARAT REGENCY  
IN FOREST AND LAND FIRE PREVENTION**

Reneli  
[reneli68se@gmail.com](mailto:reneli68se@gmail.com)

Graduated Studies Program  
Indonesia Open University

The institutional capacity shows the ability of the organization or system to perform its functions properly, effectively, and continuously become the starting point of an institution's success so that the capacity of an institution in performing its main tasks and functions in order to achieve the goals of the institution is very important to know. Starting from a good capacity then the institution is able to perform its function well. This study aims to assess the capacity of Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Kotawaringin Barat Regency in the prevention of forest and land fires as well to examine the supporting factors and capacity inhibitors of Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Kotawaringin Barat Regency in forest and land fires prevention. The research design used qualitative research that describes how organizational functions in disaster management is executed, the focus of research lies on the stages of disaster management that is prevention and preparedness, emergency handling and post-disaster rehabilitation and reconstruction. The supporting and inhibiting factors become the other focus of description in describing the capacity of Regional Disaster Management Agency of (BPBD) Kotawaringin Barat Regency. The data collection is done by structure interviews on eleven core informants and thirteen supporting informants. The results of the study indicate that the capacity of Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Kotawaringin Barat Regency is at a sufficient level meaning that some managerial management has been systematically implemented, and the implementation of the countermeasures up to coordination within the framework of incomplete policies. Factors that are capable of supporting capacity are shared values and culture, shared commitment and conducive leadership. While the inhibiting factor is the limited resources and the absence of standard technical level and SOP in the implementation of disaster management. From the results of the study is expected Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Kotawaringin Barat Regency able to increase its capacity by overcoming the capacity inhibiting factors through cooperation and improvement.

**KeyWords:** *Capacity, Disaster Management, Forest and Land Fires, BPBD, Kotawaringin Barat Regency*

**UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

**PERNYATAAN**

**TAPM yang berjudul KAPASITAS BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DALAM  
PENANGGULANGAN KEBAKARAN LAHAN DAN HUTAN  
adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun  
dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila  
di kemudian hari ternyata ditemukan adanya  
penjiplak (plagiat), maka saya bersedia menerima  
sanksi akademik.**

**Palangka Raya , 05 Desember 2017  
Yang Menyatakan**



**RENELI  
NIM. 500878267**

**PERSETUJUAN TAPM  
PASCA UJIAN SIDANG**

Judul TAPM : Kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Penanggulangan  
Kebakaran Lahan dan Hutan

Penyusun TAPM : Reneli

NIM : 500878267

Program Studi : Megister Administrasi Publik

Hari/Tanggal : Selasa, 23 Januari 2018

Menyetujui :

Pembimbing II,

Pembimbing I,

Prof. Dr. Holten Sion, M.Pd  
NIP. 1958122119830310008

Dr. Syamsuri, M.Si  
NIP. 197905212006041014

Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu Sosial  
dan Ilmu Politik  
Program Pascasarjana Pada  
Universitas Terbuka

Direktur  
Program Pascasarjana

Dr. Darmanto, M.Ed  
NIP. 19591027 198603 1 003

Dr. Eiestyodono B. Irianto, M.Si  
NIP. 19581215 198601 1 009

**UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

**PENGESAHAN HASIL UJIAN SIDANG**

Nama : RENELI  
NIM : 500878267  
Program Studi : Magister Administrasi Publik  
Judul TAPM : KAPASITAS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DALAM  
PENANGGULANGAN KEBAKARAN LAHAN DAN HUTAN

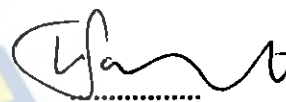
TAPM telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Program Studi Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 23 Januari 2018  
Waktu : 08.30 – 10.00

Dan telah dinyatakan **LULUS**

**PANITIA PENGUJI TAPM**

Ketua Komisi Penguji  
Dr. Darmanto, M.Ed



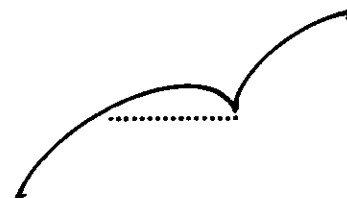
Penguji Ahli  
Prof. Dr. Endang Wirjatmi TL., M.Si



Pembimbing I  
Dr. SYAMSURI, M.Si



Pembimbing II  
Prof. Dr. Holten Sion M, Pd



## KATA PENGANTAR

Rasa syukur selalu disampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Maha Kuasa atas segala limpahan karuniaNya sehingga penulisan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) yang berjudul **“Kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Penanggulangan Kebakaran Lahan Dan Hutan”** dapat diselesaikan tepat waktu. Adapun penyusunan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana pada Universitas Terbuka.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini masih terdapat banyak kelemahan yang perlu diperkuat dan kekurangan yang perlu dilengkapi, karenanya dengan rendah hati penulis mengharapkan masukan, koreksi dan saran untuk memperkuat kelemahan dan melengkapi kekurangan tersebut.

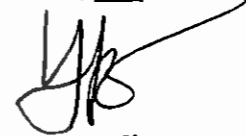
Dengan telah selesai penyusunan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini, penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Yth. Dr. Syamsuri, M.Si selaku Pembimbing I, Yth Prof. Dr. Holten Sion, M.Pd selaku Pembimbing II dan seluruh jajaran UPBJJ Universitas Terbuka Palangka Raya yang berkenan memberi bimbingan, arahan dan masukan penyusunan Tugas Akhir Program Magister (TAPM). Penulis juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Yth. Bapak **Dr. Liestyodono B. Irianto, M.Si, Direktur** Program Pascasarjana Universitas Terbuka;
2. Yth. Bapak **Dr. Darmanto, M.Ed,** Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Program Pascasarjana Universitas Terbuka;
3. Yth. Prof. Dr. Endang Wirjatmi TL, M.Si, Penguji Ahli atas masukan dan sarannya.
4. Yth. Dr. Darmanto, M.Ed, Ketua Komisi Sidang TAPM dan Yth. Dr. Djoko Rahardjo M. Hum selaku Sekretaris Komisi Sidang
5. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang telah memberikan izin penulis untuk melanjutkan pendidikan Pascasarjana dan tempat untuk melakukan penelitian;

6. Seluruh narasumber dan personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotawaringin Barat atas dukungan dalam menyelesaikan tugas ini.
7. Yang sangat saya cintai Suami beserta anak-anakku yang senantiasa memberi doa dan dukungan selama berlangsungnya masa perkuliahan hingga memasuki masa penyelesaian perkuliahan;
8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian penulisan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini.

Akhir kata semoga Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mengambil kebijakan. Dengan kerendahan hati penulis terbuka terhadap masukan dan kritik untuk kesempurnaan tulisan ini.

Pangkalan Bun, \_\_ Januari 2018



**Reneli**  
NIM. 500878267



## RIWAYAT HIDUP

**Nama** : RENELI, SE  
**NIM** : 500878267  
**Program Studi** : Magister Administrasi Publik  
**Tempat/Tanggal Lahir** : Kapuas, 26 Desember 1968

### Riwayat Pendidikan :

SD Negeri Tomban Baru km.20 Lulus Tahun. 1983  
 SMP Negeri I Lupak Dalam Lulus Tahun 1986  
 SMA Negeri 2 Kuala Kapuas Lulus Tahun 1989  
 Sarjana di STIE Palangka Raya Lulus Tahun 1995

### Riwayat Pekerjaan :

Tahun 2000 s/d 2005 sebagai Staf Sub Bagian Umum Dinas PMD Kabupaten Ktw. Barat  
 Tahun 2005 s/d 2008 sebagai Kasubbag Program dan Pelaporan Dinas PMD Kabupaten Ktw. Barat  
 Tahun 2008 s/d 2010 sebagai Kasubbag Perencanaan dan Pengendalian Program BPMD Kabupaten Ktw.Barat  
 Tahun 2010 s/d 2013 sebagai Kepala Sub Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan BPMD Kabupaten Ktw.Barat  
 Tahun 2013 s/d sekarang sebagai Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Ktw. Barat

## DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak .....	i
Lembar Persetujuan .....	iii
Lembar Pengesahan .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Riwayat Hidup .....	vii
Daftar Isi .....	viii
Daftar Bagan .....	x
Daftar Tabel .....	xi
Daftar Lampiran .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Kegunaan Penelitian .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
A. Kajian Teori .....	13
1. Kelembagaan dan Kapasitas .....	13
2. Kebakaran Lahan dan Hutan .....	26
B. Penelitian Terdahulu .....	34
C. Kerangka Berpikir .....	37
D. Operasional Konsep .....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>41</b>
A. Desain Penelitian .....	41
B. Sumber Informasi dan Penentuan Informan .....	41
C. Instrumen Penelitian .....	44
D. Prosedur Pengumpulan Data .....	50
E. Metode Analisis Data .....	53
F. Penyajian Data .....	60

<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>61</b>
<b>A. Kondisi Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>	
Kabupaten Kotawaringin Barat .....	61
1. Visi dan Misi BPBD Kotawaringin Barat .....	61
2. Tugas Pokok dan Fungsi .....	62
3. Struktur Organisasi .....	64
4. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat dan Bidang di BPBD Kotawaringin Barat..	67
<b>B. Hasil Temuan Lapangan .....</b>	<b>75</b>
1. Kapasitas Umum Manajerial BPBD Kotawaringin Barat .....	75
2. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan .....	119
3. Kapasitas BPBD Kotawaringin Barat dalam Penanggulangan Kebakaran Lahan dan Hutan .....	130
4. Faktor Pendukung dan Penghambat Kapasitas .....	149
<b>C. Pembahasan .....</b>	<b>163</b>
1. Kapasitas BPBD Kotawaringin Barat dalam Penanggulangan Kebakaran Lahan dan Hutan .....	163
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Kapasitas .....	174
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>187</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>187</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>191</b>
<b>Daftar Pustaka .....</b>	
<b>Lampiran .....</b>	

## DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1	Alur Kerangka Berpikir .....	38
Bagan 3.1	Model Analisis Interaktif (Milles dan Hubberman) .....	54
Bagan 4.1	Struktur Organisasi BPBD .....	66
Bagan 4.2	Skema Informasi dan Pelaporan Kejadian .....	88
Bagan 4.3	Peta Risiko Kebakaran Lahan dan Hutan .....	120
Bagan 4.4	Struktur Satgas Pos Komando Penanganan Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2017 .....	126
Bagan 4.5	Gambaran Perbandingan Kapasitas per Komponen Tinjauan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan .....	133
Bagan 4.6	Gambaran Perbandingan Kapasitas per Komponen Tinjauan Bidang Penanganan Darurat .....	139
Bagan 4.7	Gambaran Perbandingan Kapasitas per Komponen Tinjauan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi .....	146
Bagan 4.8	Gambaran Nilai Kapasitas Pencegahan dan Kesiapsiagaan Dalam Penanggulangan Kebakaran Lahan dan Hutan .....	167
Bagan 4.9	Gambaran Nilai Kapasitas Penanganan Darurat Dalam Penanggulangan Kebakaran Lahan dan Hutan .....	170
Bagan 4.10	Gambaran Nilai Kapasitas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Dalam Penanggulangan Kebakaran Lahan dan Hutan .....	172

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Luas Kebakaran Tahun 2014 – 2016.....	4
Tabel 2.1	Matrik Penelitian Terdahulu .....	35
Tabel 3.1	Informan Penelitian.....	42
Tabel 3.2	Kisi-Kisi Instrumen Penelitian.....	44
Tabel 3.3	Pedoman Wawancara Bagi Informan Pendukung .....	49
Tabel 3.4	Kriteria Tingkat Level Kapasitas .....	58
Tabel 4.1	Data Pegawai BPBD Berdasarkan Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin Tahun 2017 .....	86
Tabel 4.2	Data Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017.....	87
Tabel 4.3	Data Peralatan Operasional BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 .....	91
Tabel 4.4	Tinjauan Penilaian Hasil Wawancara dan Telaahan Dokumen .....	116
Tabel 4.5	Identifikasi Dokumen Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.....	132
Tabel 4.6	Identifikasi Dokumen Bidang Kedaruratan dan Logistik .....	138
Tabel 4.7	Identifikasi Dokumen Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi .....	145
Tabel 4.8	Permasalahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat .....	150

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Pedoman Penilaian Kapasitas berdasarkan Temuan jawaban wawancara

Lampiran 2 Peninjaan Hasil Wawancara

Lampiran 3 Dokumentasi Pelaksanaan Wawancara

Lampiran 4 Dokumen Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana BPBD KOBAR



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Bencana merupakan peristiwa yang dapat terjadi kapan saja, dimana saja tidak hanya merugikan materil maupun non materil tetapi juga dapat menimbulkan risiko yang dapat mengancam kehidupan manusia. Persoalan bencana sendiri bukanlah semata-mata persoalan fisik namun juga persoalan administrasi publik dan kebijakan publik, karena menyangkut isu-isu berikut : siapa korbannya?, berapa banyak anggaran yang harus dikeluarkan? Siapa yang harus bertanggungjawab untuk mengatasi persoalan? Bagaimana mekanisme organisasi penanggulangan bencana? Siapa dan bagaimana melakukan monitoring kegiatan?

Sejak peristiwa Tsunami Aceh tahun 2004, lalu peristiwa Letusan Merapi Tahun 2006, Indonesia seolah-olah menjadi Negara yang tidak terpisahkan dari kejadian Bencana. Orang Pribadi, Kelompok, Masyarakat, dan Negara menjadi amat peduli dengan fenomena-fenomena Alam yang menjadi pemicu Bencana. Bencana tidak terlepas pula dialami oleh Kabupaten Kotawaringin Barat, bencana banjir, kekeringan, erosi dan abrasi, cuaca ekstrim hingga kebakaran lahan dan hutan.

Kebakaran lahan dan hutan merupakan kejadian tahunan yang dialami di Kabupaten Kotawaringin Barat, yang dimulai sejak bulan Mei hingga Puncaknya pada bulan September hingga berakhir di awal musim penghujan. Sementara ini

kebakaran hutan dan lahan masih dianggap sebagai suatu musibah/bencana alam seperti halnya gempa bumi dan angin topan, padahal kebakaran hutan dan lahan berbeda dengan kejadian-kejadian bencana alam tersebut. Kebakaran lahan dan hutan sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim, terutama cuaca atau musim sehingga seharusnya kebakaran hutan dan lahan dapat dicegah dan dikendalikan.

Kebakaran lahan dan hutan dapat dicegah dan dikendalikan, seperti telah diketahui bahwa apabila musim kemarau peluang untuk terjadinya kebakaran lebih tinggi dibanding dengan musim penghujan, dimana daerah rawan kebakaran jika tidak dijaga atau dengan kata lain diadakan pencegahan sudah dapat dipastikan akan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan hal tersebut, sudah saatnya pengendalian kebakaran hutan dan lahan ditangani secara terencana, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan tidak hanya tertuju pada pemadaman saat kebakaran hutan musim kemarau, tetapi hal-hal lain yang bersifat pencegahan harus direncanakan dan dilakukan berkelanjutan baik pada musim kemarau maupun pada musim penghujan.

Pada dasarnya kebakaran hutan dan lahan bukanlah bencana alam karena hampir sembilan puluh sembilan persen kejadian kebakaran hutan dan lahan di Indonesia disebabkan oleh faktor manusia, baik karena kesengajaan maupun kelalaian. Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia pada tahun 1982/1983, 1997/98, 2002, 2006 dan pada bulan Juni hingga Agustus 2013 yang menyebabkan kabut asap hingga ke Singapura dan Malaysia mengindikasikan



bahwa kebakaran hutan dan lahan perlu mendapat penanganan serius. Kejadian kebakaran hutan dan lahan di Indonesia menjadi isu lingkungan di dunia karena menimbulkan dampak yang merugikan.

Menurut hasil kajian Bambang Hero Saharjo, 2013, tingkat kerawanan terhadap kejadian kebakaran hutan dan lahan yang diperhitungkan berdasarkan data jumlah dan sebaran hotspot selama 16 tahun terakhir (1997 – 2013) menghasilkan pengelompokan wilayah sebagai berikut :

1. Tingkat kerawanan sangat tinggi : Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatra Selatan
2. Tingkat kerawanan tinggi : Kalimantan Timur, Jambi, Sumatra Utara, Kalimantan Selatan,
3. Tingkat kerawanan sedang : Lampung, Sumatra Barat, Jawa Timur, DI Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan
4. Tingkat kerawanan rendah : Bengkulu, Papua Barat, Papua, Maluku, DKI Jakarta, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Bali

Dari klasifikasi tersebut ditunjukkan bahwa Kalimantan Tengah memiliki titik kerawanan yang sangat tinggi, dan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah bagian dari wilayah dengan kerawanan yang sangat tinggi tersebut.

Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotawaringin Barat, rekapitulasi luasan kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Kotawaringin Barat selama tahun 2014-2016 seperti Tabel 1.1

**Tabel 1.1 Luas Kebakaran Tahun 2014-2016**

Tahun	Luas Lahan/Hutan terbakar	Kebakaran yang Tertangani	Kebakaran yang tidak tertangani
2014	±1.468 ha	±209 ha	±1.259 ha
2015	±17.835 ha	±1.761 ha	±16.704 ha
2016	±1.094,1 ha	± 839,1 ha	± 255 ha

*\*estimasi berdasarkan jumlah laporan Hospot NOAA dan luasan areal terbakar yang mampu dipadamka, tahun 2014-2016*

Tabel tersebut menunjukkan luasan kebakaran yang mampu ditangani selama 3 tahun terakhir, pada tahun 2014 hanya 14,23% luasan tertangani, pada tahun 2015 hanya 9.87% luasan yang tertangani dan pada tahun 2016 sebesar 76,7% luasan kebakaran yang tertangani tim pengendali kebakaran Kabupaten Kotawaringin Barat. Terdapat peningkatan persentase luasan kebakaran yang tertangani dan terdapat penurunan jumlah luasan lahan kebakar dalam 3 tahun terakhir.

Dampak kebakaran hutan dan lahan yang paling menonjol adalah terjadinya kabut asap yang sangat mengganggu kesehatan masyarakat dan sistem transportasi sungai, darat, laut, dan udara. Secara sektoral dampak kebakaran ini mencakup sektor perhubungan, kesehatan, ekonomi, ekologi dan sosial, termasuk citra bangsa di mata negara tetangga dan dunia (Hermawan, 2006). Dampak kebakaran terhadap produksi di sektor pertanian diduga tidak terlalu besar karena pembakaran dilakukan untuk penyiapan/pembersihan lahan, bukan dalam masa pertanaman, kecuali jika kebakaran menjalar secara tidak terkendali pada lahan yang sedang berproduksi. Kebakaran hutan dan lahan terjadi setiap

tahun dengan luas cakupan dan jumlah titik api (*hotspot*) yang bervariasi. Kejadian ini sebenarnya telah diantisipasi, namun tidak berdaya melakukan pencegahan.

Menurut berbagai hasil kajian dan analisis CIFOR, 2006 dan Walhi, 2006 dalam M. Pasaribu, 2007, penyebab kebakaran hutan dan lahan berhubungan langsung dengan perilaku manusia yang menginginkan percepatan penyiapan lahan (*land clearing*) untuk persiapan penanaman komoditas perkebunan. Para pihak yang berkepentingan ingin segera menyiapkan lahan dengan biaya yang serendah-rendahnya dan sekaligus mengharapkan kenaikan tingkat kemasaman (pH) tanah (dari sekitar 3 sampai 4 menjadi 5 sampai 6) agar tanaman perkebunan (sawit dan akasia, misalnya) dapat tumbuh dengan baik. Juga dilaporkan bahwa perladangan tradisional yang menerapkan sistem usaha tani gilir balik tidak dapat disalahkan sepenuhnya karena jumlah wilayah yang terbakar pada lahan-lahan tersebut hanya sekitar 20 persen dari total keseluruhan yang terbakar. Dari jumlah ini, kurang dari separuhnya terjadi pada lahan-lahan pertanian milik masyarakat yang menerapkan rotasi usaha tani sementara sisanya pada kawasan bekas konsesi yang ditinggalkan para pemiliknya yang kemudian digunakan oleh masyarakat.

Dampak kejadian kebakaran hutan dan lahan bersifat multidimensi meliputi dampak secara sosial, ekonomi, lingkungan dan politik. Kajian ekonomi terhadap dampak kebakaran hutan dan lahan pada tahun 1997/1998 oleh Tacconi (2003) menunjukkan bahwa kebakaran tersebut mengakibatkan degradasi dan

deforestasi secara ekonomi bernilai 1,62-2,67 milyar Dolar, biaya akibat kabut asap sebesar 674-799 Juta dolar dan valuasi emisi karbon sebesar 2,8 milyar dolar. Melihat kecenderungan peningkatan kejadian kebakaran dan risiko dampaknya pada negara lain, penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia sangat penting dan harus menjadi prioritas. Dengan itu diperlukan sebuah struktur kelembagaan yang menangani Bencana secara umum dan kejadian Kebakaran Lahan dan Hutan secara khusus. Kegiatan pengendalian kebakaran lahan dan hutan meliputi aktifitas pencegahan (*pra*), pemadaman (*fire*) dan penanggulangan pasca kejadian (*post*).

Peran kelembagaan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan merupakan hal yang penting terutama di tengah banyaknya para pihak yang dapat terlibat. Keterlibatan lembaga dan masyarakat dapat terjadi dan diharapkan pada semua aktifitas pengendalian. Analisis kepentingan, pengaruh dan peran para pihak dapat memetakan posisi lembaga dalam kegiatan pengendalian kebakaran lahan dan hutan baik pemerintah maupun non pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah serta program tindak lanjut kelembagaan yang akan dilakukan untuk mengelola peran kelembagaan. Salah satu faktor penentu keberhasilan dalam pengelolaan bencana adalah pengaturan kelembagaan yang efektif, pengaturan kelembagaan merupakan faktor penentu yang sangat penting dalam keberhasilan manajemen bencana, terutama pada kondisi ketika pemerintah yang bertanggungjawab tidak memiliki otoritas atau dapat

menyebabkan ketidak jelasan distribusi kekuasaan otoritas dan penundaan pembuat keputusan, terutama dalam hal bantuan dan rehabilitasi.

Komitmen dan konsistensi setiap lembaga dalam menjalankan program dan fokus prioritas merupakan hal yang krusial dalam pencapaian keberhasilan program pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Sehingga visi penanggulangan bencana yang tertuang dalam Rencana Nasional Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk menjadikan Bangsa yang tangguh dalam menghadapi bencana dapat terwujud. Menurut Undang- Undang (UU) no.24 tahun 2007 pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tujuan Penanggulangan Bencana berdasarkan UU No. 24 tahun 2007 (pasal 4) disebutkan :

1. Memberikan perlindungan kepada masyarakat
2. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada
3. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu terkoordinasi dan menyeluruh
4. Menghargai budaya lokal
5. Membangun partisipasi dan kemitraan publik pihak swasta
6. Mendorong semangat gotong royong kesetiakawanan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara

Sesuai dengan amanat UU No.24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana pemerintah daerah menjadi penanggungjawab dalam menjamin pemenuhan hak masyarakat yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum,

melindungi masyarakat dari dampak bencana, mengurangi risiko bencana dan pemanduan pengurangan risiko dengan program pembangunan dan mengalokasikan dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai. Pemerintah daerah sebagai penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Dimana BPBD memiliki tugas :

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai kebijakan pemerintah daerah dan BNPB
2. Menetapkan standardisasi dan kebutuhan penganggaran
3. Menyusun menetapkan menginventarisasi peta rawan bencana
4. Menyusun dan menetapkan prosedur penanganan bencana
5. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam aturan tersebut disampaikan bahwa yang bertanggungjawab dalam penanggulangan bencana adalah pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Adapun pengisian dan pelantikan pejabat eselon II, III dan IV dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2013.

BPBD Kotawaringin Barat dalam strukturnya memuat 1 sekretariat dan 3 bidang dimana bidang kerjanya yaitu Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Darurat

dan Logistik serta Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Dimulai sejak berdirinya hingga saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, selanjutnya dalam tulisan ini kami sebut menjadi BPBD KOTAWARINGIN BARAT sudah menjadi bagian dalam penanganan Kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Kotawaringin Barat, dan secara langsung menjadi koordinator dalam penanganan darurat bencana. Eksistensi lembaga ini sangat penting karena merupakan *leading sector* dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Kotawaringin Barat. Keberadaan lembaga sangat didukung oleh kemampuan lembaga tersebut dalam mengatasi persoalan dan masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kerja demi mencapai, visi, misi dan tujuan organisasi. Berawal dari sebuah kapasitaslah lembaga mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Kapasitas yang menunjukkan kemampuan organisasi atau sistem untuk menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya secara efektif, efisien dan terus menerus menjadi titik tolak keberhasilan sebuah lembaga.

Keterbatasan personil, keterbatasan sarana dan prasarana fisik dan finansial dalam menanggulangi bencana menjadi masalah yang serius, sehingga fungsi maksimal dalam penyelenggaraan bencana tidak dapat diraih. Berdasarkan pada kondisi itulah perlu diketahui bagaimana kapasitas BPBD Kotawaringin Barat dalam menanggulangi bencana secara umum dan menanggulangi kebakaran lahan dan hutan secara khusus, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya baik mendukung maupun menghambat.

## B. Rumusan Masalah

Penanggulangan bencana merupakan serangkaian kegiatan sejak dari sebelum, saat terjadi hingga setelah kejadian bencana yang menyeluruh, penanggulangan tersebut sangat terkait dengan kapasitas lembaga yang bertanggung jawab dalam melaksanakannya, dimana sesuai amanat UU no. 24 tahun 2007 sebuah Badan Penanggulangan Bencana adalah lembaga yang menangani kebencanaan dengan fungsi utama sebagai badan koordinasi.

BPBD sebagai salah satu lembaga pemerintah daerah tentunya mampu mengembangkan kapasitasnya, sesuai dengan amanat kerangka nasional pengembangan kapasitas pemerintahan daerah dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012, harus dapat meningkatkan kapasitas struktur organisasi, tata laksana penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, peningkatan kapasitas penganggaran, peningkatan kapasitas sarana- prasarana hingga penerapan standar prosedur operasi.

Selain itu pengembangan kapasitas menjadi prioritas dalam rencana strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2015-2019, disebutkan bahwa nilai kapasitas kelembagaan sebuah lembaga penanggulangan bencana menjadi titik tolak perencanaan ke depan dalam mengembangkan kapasitasnya. Selain itu kapasitas lembaga penanggulangan bencana menjadi ukuran penting dalam menyelenggarakan aksi pendukung prioritas pengurangan risiko bencana termasuk dukungan atas tujuan meningkatkan resiliensi melalui kesiapsiagaan, tanggapan dan pemulihan atas kejadian bencana. Dalam proses



pengembangan tersebut tentunya sebagai dasar dari pelaksanaannya lebih dulu harus diketahui bagaimana kapasitas kelembagaan BPBD Kotawaringin Barat secara mandiri

Di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, bencana kunci yang rangkingnya cukup tinggi adalah Kebakaran Lahan dan Hutan, dimana kebakaran lahan dan hutan menjadi ancaman di setiap tahun pada musim kemarau, sehingga penanggulangan bencana ini merupakan poin utama penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dari BPBD Kotawaringin Barat. Di tahun-tahun sebelum pembentukan BPBD Kotawaringin Barat penanganan kebakaran hutan dan lahan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten, dan juga penanganan kebakaran lahan dan hutan berbentuk sporadis yang dilaksanakan berbagai instansi dan atau organisasi. BPBD KOTAWARINGIN BARAT yang seharusnya menjadi koordinator dalam penanganan bencana belum menempati posisinya yang optimal. Belum terlihat kondisi sebenarnya bagaimana BPBD menyelenggarakan fungsi organisasi secara optimal.

Berawal dari hal tersebut sebagai dasar dalam pengembangan kapasitas kelembagaan nantinya, maka perlu diketahui :

1. Bagaimana kapasitas BPBD KOTAWARINGIN BARAT dalam menanggulangi bencana, khususnya dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan ?
2. Faktor pendukung dan penghambat apa saja yang mempengaruhi kapasitas tersebut terutama dalam menangani bencana kebakaran lahan dan hutan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengkaji kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (BPBD KOTAWARINGIN BARAT) dalam penanggulangan kebakaran lahan dan hutan
2. Mengkaji faktor pendukung dan penghambat kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna secara :

#### **1. Teoritis - Akademis**

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang administrasi publik, terutama yang berkaitan dengan pengembangan kapasitas kelembagaan.

#### **2. Praktis**

Hasil penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Daerah terutama BPBD KOTAWARINGIN BARAT dalam pengambilan kebijakan untuk menyusun perencanaan penanggulangan kebakaran lahan dan hutan ke depan sebagai bagian dari pengoptimalan kapasitas BPBD KOTAWARINGIN BARAT .

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### 1. Kelembagaan dan Kapasitas

###### a. Konsep Teori Kelembagaan/Institusionalis

Dalam ilmu sosial, organisasi dipelajari oleh berbagai bidang ilmu, terutama ilmu sosiologi, ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu psikologi, dan ilmu manajemen. Kajian mengenai organisasi biasanya disebut studi organisasi (*organizational studies*), perilaku organisasi (*organizational behaviour*), atau analisis organisasi (*organizational analysis*). Untuk memahami mengenai organisasi publik, perlu dipahami terlebih dahulu definisi dari organisasi dan definisi dari publik. Organisasi (Yunani: alat) adalah suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan bersama. Menurut Millet (1954), Organisasi adalah kerangka struktur dalam mana pekerjaan dari banyak orang dilakukan untuk pencapaian maksud bersama, sebagai suatu sistem mengenai penugasan pekerjaan diantara kelompok-kelompok orang yang mengkhususkan diri dalam tahap-tahap khusus dari suatu tugas bersama. Berbeda dengan Millet, Simon (1988) berpendapat bahwa organisasi adalah sebagai pola komunikasi yang lengkap dan hubungan lain di dalam suatu kelompok orang-orang. Prajudi Atmosudirdjo (1990) menggambarkan bahwa organisasi memiliki sifat yang abstrak, sulit dilihat namun bisa dirasakan eksistensinya.

Secara teoritis, organisasi memang dapat dipahami dari berbagai macam sudut pandang atau perspektif. Lebih lanjut, Miftah Thoha (1983) memaknai organisasi sebagai kesatuan rasional dalam upaya untuk mengejar tujuan, sebagai koalisi pendukung yang kuat, dimana organisasi merupakan instrumen untuk mengejar kepentingan masing-masing, sebagai suatu sistem terbuka di mana kelangsungan hidup organisasi sangat tergantung input dari lingkungan, sebagai alat dominasi dan banyak lagi perspektif yang dapat dipakai untuk memaknai organisasi. Berdasarkan pemikiran-pemikiran di atas maka pada dasarnya terdapat kesamaan pengertian dari keseluruhan definisi tentang organisasi yaitu menyatakan bahwa organisasi sebagai satu kesatuan sosial dari kelompok manusia, yang saling berinteraksi menurut suatu pola tertentu sehingga setiap anggota organisasi memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing.

Suatu institusi adalah organisasi yang tertata melalui pola perilaku yang diatur oleh peraturan yang telah diterima sebagai standar. Menurut Jan-Erik Lane dan Svante Ersson (2002), institusi mencakup 1) struktur fisik, 2) struktur demografis, 3) perkembangan historis, 4) jaringan pribadi dan 5) struktur sementara. Institusi adalah peraturan – peraturan yang stabil yang memungkinkan orang yang sebenarnya hanya mementingkan diri sendiri untuk bekerjasama dengan orang lain untuk tujuan bersama. Institusi-institusi mempengaruhi dan menentukan cara para aktor berusaha mencapai tujuannya. Institusi menentukan, siapa aktor yang sah, jumlah aktor, siapa menentukan

tindakan. Institusi memberikan stabilitas, sebab tidak dapat diubah begitu saja, mempunyai kekuasaan yang sedikit banyak otonom dan para aktor yang ingin mengubah institusi tertentu akan mempertimbangkan akibat-akibat yang sering tidak dapat diramalkan.

Beberapa konsep teori tentang kelembagaan yang disampaikan para ahli adalah seperti berikut :

Menurut Hanafie, Tahun 2010 Lembaga adalah badan, organisasi, kaidah, dan norma-norma baik formal maupun informal sebagai pedoman untuk mengatur perilaku segenap anggota masyarakat baik dalam kegiatan sehari-sehari maupun dalam usahanya mencapai suatu tujuan tertentu. Lembaga-lembaga bentukan pemerintah lebih sering disempurnakan agar mampu berfungsi sebagai tumpuan untuk menunjang terciptanya pembangunan yang mantap serta sesuai dengan iklim pembangunan pertanian dan pedesaan. Bentuk kelembagaan dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu kelembagaan primer dan kelembagaan sekunder. Unsur-unsur kelembagaan primer mencakup pemerintah, kekayaan, industri, pendidikan, agama dan keluarga.

Menurut Daymon dan Immy, Tahun 2008 Teori kelembagaan (institutional theory) menyatakan bahwa organisasi yang menghadapi tuntutan-tuntutan yang saling berlawanan dapat mengadopsi praktik dan struktur yang mengalihkan perhatian stakeholder dari hal-hal yang mereka anggap tidak dapat diterima (unacceptabel). Hal ini memberikan kesan legitimate. Teori kelembagaan memberikan pandangan yang tidak utuh. Teori tersebut tidak

memperhitungkan taktik-taktik pengelolaan kesan yang digunakan oleh organisasi. Perpaduan antara teori kelembagaan dengan teori pengelolaan kesan mungkin dapat membantu memahami bagaimana organisasi melindungi legitimasi

Menurut Anantanyu, Tahun 2011 Kelembagaan adalah keseluruhan pola-pola ideal, organisasi, dan aktivitas yang berpusat di sekeliling kebutuhan dasar seperti kehidupan keluarga, negara, agama dan mendapatkan makanan, pakaian, dan kenikmatan serta tempat perlindungan. Suatu lembaga dibentuk selalu bertujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia sehingga lembaga mempunyai fungsi. Lembaga juga merupakan konsep yang berpadu dengan struktur, artinya tidak saja melibatkan pola aktivitas yang lahir dari segi sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi juga pola organisasi untuk melaksanakannya.

Menurut Nugroho Bramasto, Tahun 2010 Kelembagaan diartikan sebagai aturan main, norma-norma, larangan-larangan, kontrak, kebijakan dan peraturan atau perundangan yang mengatur dan mengendalikan perilaku individu dalam masyarakat atau organisasi untuk mengurangi ketidakpastian dalam mengontrol lingkungannya serta menghambat munculnya perilaku oportunistik dan saling merugikan sehingga perilaku manusia dalam memaksimalkan kesejahteraan individualnya lebih dapat diprediksi. Definisi tersebut mengimplikasikan 2 komponen penting dalam kelembagaan, yaitu aturan main (*rules of the game*) dan organisasi (*players of the game*). Keduanya sulit dipisahkan karena

organisasi dapat berjalan apabila aturan main mengizinkan atau memungkinkan, sebaliknya aturan main disusun, dijalankan, dan ditegakkan oleh organisasi.

Menurut Surbakti, Tahun 2010 Teori kelembagaan mengatakan partai dibentuk oleh kalangan legislatif dan eksekutif karena ada kebutuhan para anggota parlemen yang ditentukan berdasarkan pengangkatan untuk mengadakan kontak dengan masyarakat dan membina dukungan dari masyarakat. Partai politik terbentuk dan menjalankan fungsi dan muncul partai politik lain yang terbentuk oleh kalangan masyarakat. Partai politik yang terakhir ini biasanya dibentuk oleh kelompok kecil pemimpin masyarakat yang sadar politik berdasarkan penilaian bahwa partai politik yang dibentuk pemerintah tidak mampu menampung dan memperjuangkan kepentingan mereka. Hal ini tidak hanya dapat ditemui dalam wilayah atau bangsa yang tengah dijajah yang membentuk partai politik sebagai alat memobilisasi masyarakat untuk memperjuangkan kemerdekaan.

**b. Konsep Teori Kapasitas**

Kapasitas secara bahasa menunjukkan tingkat keluaran (output) atau kuantitas dalam suatu periode tertentu dan merupakan kuantitas maksimal yang mungkin selama periode waktu tertentu (*dalam teori ekonomi mikro*).

Definisi kapasitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia: 1 ruang yg tersedia; daya tampung; 2 daya serap (panas, listrik, dsb); 3 keluaran maksimum; kemampuan berproduksi; 4 *El* kemampuan kapasitor untuk menghimpun muatan listrik (diukur dl satuan farad); berkapasitas  $v$  memiliki kapasitas. Atau dapat

diiatakan bahwa Kapasitas adalah daya tampung atau daya serap, ruang yang dimiliki atau fasilitas yang tersedia dan kemampuan maksimal.

Pengertian kapasitas berdasarkan McNair, C.J (1994) mendefinisikan kapasitas sebagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang siap untuk digunakan yang dapat menggambarkan potensi keuntungan yang akan didapatkan oleh perusahaan pada masa mendatang. Mc. Nair C.J dan Vangermeersch (1998) mendefinisikan kapasitas sebagai kemampuan dari suatu organisasi atau perusahaan untuk menciptakan nilai dimana kemampuan tersebut didapatkan dari berbagai jenis sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan.

Menurut Chase (2001), definisi kapasitas dalam konteks manajemen operasi sebaiknya didefinisikan sebagai, "*The amount of resource inputs available relative to output requirements over a particular period of time*". Berdasar definisi tersebut maka disimpulkan bahwa kapasitas adalah kemampuan pengelolaan sumber daya yang ada untuk menghasilkan hasil akhir yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan dalam kerangka waktu tertentu.

Sedangkan definisi kapasitas menurut Hilton, Maher dan Selto (2003) adalah kapasitas merupakan ukuran dari kemampuan proses produksi dalam mengubah sumber daya yang dimiliki menjadi suatu produk atau jasa yang akan digunakan oleh konsumen.



Kata kapasitas sering digunakan ketika kita berbicara tentang peningkatan kemampuan seseorang, ketika kita memperoleh sertifikasi, mengikuti pelatihan atau mengikuti pendidikan (JICA, 2004). Dalam pengertian yang lebih luas, yang sekarang digunakan dalam pembangunan masyarakat, kapasitas tidak hanya berkaitan dengan keterampilan dan kemampuan individu, tetapi juga dengan kemampuan organisasi untuk mencapai misinya secara efektif dan kemampuan mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang.

Kebanyakan literatur mendefinisikan kapasitas sebagai kemampuan umum untuk melaksanakan sesuatu. United Nation Development Programme (UNDP) dalam Milen, 2006 mendefinisikan kapasitas sebagai kemampuan (kemampuan memecahkan masalah) yang dimiliki seseorang, organisasi, lembaga, dan masyarakat untuk secara perorangan atau secara kolektif melaksanakan fungsi, memecahkan masalah, serta menetapkan dan mencapai tujuan.

Kapasitas merupakan kemampuan individu, organisasi atau sistem untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya secara efektif, efisien dan terus menerus (Milen, 2006), sedangkan Morgan dalam Milen, 2006 merumuskan pengertian kapasitas sebagai kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumberdaya dan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap individu, organisasi, jaringan kerja/sector dan sistem yang lebih luas untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan

pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu (Milen, 2006) Menurut UNDP dan Canadian International Development Agency (CIDA) dalam Milen, 2006, kapasitas adalah kemampuan individu, kelompok, organisasi, institusi, dan masyarakat untuk menghasilkan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, memecahkan permasalahan, merumuskan dan mewujudkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dan memahami dan memenuhi kebutuhan pembangunan dalam konteks yang luas dan berkelanjutan. Menurut UNDP, 1999 dalam Nugraha, 2004 terdapat tiga tingkatan kapasitas yang harus memadai agar proses kelembagaan dapat berjalan sangat kokoh yaitu kapasitas sistem, kapasitas organisasi dan kapasitas individu.

Kapasitas menunjukkan konsep kemampuan dalam tiga tingkatan yaitu kemampuan individu, kemampuan kelompok dan kemampuan organisasi. Dan berdasarkan semua pengertian di atas, kapasitas bersifat dinamis dan berkelanjutan. Kapasitas dalam level organisasi atau kelembagaan berfokus pada kemampuan pengambilan keputusan, pengelolaan sumberdaya, prosedur manajerial, struktur, manajemen sistem informasi, dan budaya organisasi (Tim Peneliti STIA LAN, 2012).

### **c. Pengukuran dan Penilaian Kapasitas**

Kapasitas organisasi meliputi sumberdaya, ketatalaksanaan, struktur organisasi dan sistem pengambilan keputusan. Penilaian Kapasitas menggambarkan berbagai pandangan terhadap kapasitas itu sendiri; tergantung siapa yang melakukan penilaian kapasitas. Hal ini akan memberikan masukan

berarti bagi pengembangan lembaga. Penilaian kapasitas merujuk pada proses penelaahan unsur-unsur kapasitas pada suatu waktu, menurut Tim aliansi masyarakat sipil, 2012 Penilaian kapasitas organisasi dapat menggunakan berbagai metode seperti TANGO (Transparansi and Akuntabilitas NGO), (OCA *Organisational Capacity Assessment*), ODST (*Organizational Development Snapshot Tools*), POET (*participatory organizational evaluation tools*) yang digunakan untuk pengukuran mandiri. OCA bukan hanya sekedar peninjauan/diagnose kebutuhan akan peningkatan kapasitas organisasi, namun merupakan suatu metode untuk meningkatkan kemampuan dan atau kapasitas organisasi melalui proses pembelajaran dan sekaligus membangun tim di dalam organisasi tersebut.

OCA diartikan sebagai kegiatan pengukuran dan penilaian diri organisasi yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh bagian dan perangkat dalam organisasi melalui diskusi yang terstruktur, analisis dan dilanjutkan dengan penyusunan rencana pengembangan organisasi sebagai tindak lanjut.

*Capacity Assessment*, Pengukuran Kapasitas, Pengukuran kapasitas digunakan sebagai alat untuk mengetahui kemampuan organisasi, untuk melihat kemampuan pada level organisasi dapat digunakan konsep Polidano (1999) seperti yang dijelaskan oleh Tim Peneliti STIA LAN, 2012 bahwa yang dianggap cocok untuk diterapkan pada sektor publik (pemerintahan). Terdapat 3 elemen penting untuk mengukur kapasitas sektor publik, sebagai berikut :

- a. *Policy capacity*, yaitu kemampuan untuk membangun proses pengambilan keputusan, mengkoordinasikan antar lembaga pemerintah dan memberikan analisis terhadap keputusan tadi
- b. *Implementation authority*, yaitu kemampuan menjalankan dan menegakkan kebijakan baik terhadap dirinya sendiri maupun masyarakat secara luas, dan kemampuan untuk menjamin bahwa pelayanan umum benar-benar diterima secara baik oleh masyarakat
- c. *Operational efficiency*, yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan umum secara efektif dan efisien, serta dengan tingkat kualitas yang memadai.

Aliansi masyarakat sipil menggunakan OCPAT (Organisational Capacity and Performance Assessment tools) dalam mengukur kapasitas organisasi, metode ini merupakan adaptasi dari OCA dan ODST, dalam OCPAT terdapat 6 komponen penilaian yaitu :

1. Komponen orientasi organisasi ;
2. Komponen tata kepengurusan ;
3. Komponen manajemen organisasi ;
4. Komponen manajemen program ;
5. Komponen keberlanjutan ; dan
6. Kinerja Organisasi

Penilaian dalam OCPAT yang digunakan oleh Yayasan Aliansi Masyarakat Sipil untuk Advokasi menggunakan kategori penilaian 1- 4 yang dideskripsikan dalam kalimat-kalimat :

- (1) Belum ada kebijakan dan belum ada praktek
- (2) Sudah ada beberapa kebijakan organisasi namun belum dipraktekkan atau sudah ada praktek dalam organisasi namun kebijakan belum dibuat
- (3) Kebijakan organisasi lengkap namun sebagian dipraktekkan
- (4) Kebijakan organisasi lengkap dan keseluruhan dipraktekkan

Jika menggunakan skoring maka penilaiannya adalah 1 = buruk, 2 = kurang, 3 = cukup dan 4 = baik.

#### d. Faktor – Faktor yang mempengaruhi Kapasitas Organisasi

Menurut Supardal dan Santoso (2004) dalam membicarakan kelembagaan pemerintah terlebih dahulu perlu dibicarakan tentang elemen kelembagaan, elemen ini berpengaruh pada kapasitas kelembagaan. Beberapa elemen tersebut adalah :

##### 1. Tujuan atau Nilai yang Beda

Tujuan merupakan faktor penting dalam sebuah institusi, karena akan menjadi roh” setiap aktifitas dalam lembaga tersebut, bahkan bentuk dan struktur suatu lembaga sangat dipengaruhi oleh tujuan yang dibela.

##### 2. Adanya aturan Main

Aturan main dalam sebuah lembaga mempunyai peran untuk mengatur tata kelembagaan sehingga lembaga mampu mencapai tujuan yang ditetapkan secara efektif dan efisien.

##### 3. Komitmen Moral dan Etos

Komitmen moral menyangkut konsistensi aparat dalam mewujudkan mandate yang diemban suatu organisasi. Komitmen moral dalam sebuah institusi dapat berupa tekad dan etiket, serta integritas individu-individu yang ada dalam institusi.

#### 4. Kepemimpinan

Menurut Hollander (1978) dalam Supardal dan Santoso (2004) kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi yang menyangkut transaksi antara pemimpin dan bawahan, dengan kata kunci – hubungan antara pemimpin dan pengikutnya.

#### 5. Organisasi sebagai wadah operasional

Organisasi sebagai wadah aktivitas lembaga harus menyesuaikan dengan kuantitas dan kualitas mandate atau tugas yang diemban, dalam konteks pemerintah daerah, organisasi terkait dengan tata kewenangan hierarki dan tugas pokok serta fungsi dalam birokrasi pemerintah.

#### 6. Sarana dan Prasarana

Berlangsungnya aktivitas kelembagaan tidak akan bisa dipisahkan dengan kondisi sarana dan prasarana yang ada. Kondisi sarana dan prasarana bisa berupa materi dan finansial yang melingkupi dalam kelembagaan.

Sementara menurut Soeprapto (2003) dalam Sari et al, 2014, faktor yang mempengaruhi pembangunan kapasitas terdiri dari lima hal pokok, yaitu :

- a. Komitmen bersama, komitmen bersama merupakan modal dasar dari seluruh rancangan kegiatan yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi.

Komitmen tidak hanya untuk kalangan pemegang kekuasaan namun meliputi seluruh komponen dalam organisasi.

- b. Kepemimpinan yang kondusif, akan memberikan kesempatan yang luas pada setiap elemen organisasi dalam menyelenggarakan pengembangan kapasitas, sehingga dapat menentukan efektivitas kapasitas kelembagan menuju realisasi tujuan organisasi yang diinginkan.
- c. Reformasi Peraturan, dalam sebuah organisasi harus disusun peraturan yang mendukung pelaksanaan kerja organisasi untuk mencapai tujuannya
- d. Reformasi Kelembagaan, dan
- e. Pengakuan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, pengakuan merupakan implementasi dari kejujuran, merupakan langkah awal identifikasi kapasitas sebelum dikembangkan.

Selain itu elemen-elemen yang berpengaruh positif bagi kapasitas lembaga adalah :

1. Kesamaan persepsi dan kehendak akan tujuan yang ingin dicapai
2. Regulasi yang mendukung, peraturan yang mendukung akan berdampak pada keberhasilan kebijakan manajemen organisasi, terutama jika peratran tersebut ditetapkan dan diberlakukan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif (Tingsanchali, 2005 dalam Pratiwi, 2016)
3. Koordinasi yang efektif, bermanfaat dalam penyatupaduan gerak dari seluruh potensi unit-unit organisasi, sehingga fungsi-fungsi yang berbeda

dari elemen organisasi dapat mengarah pada sasaran yang sama guna memudahkan pencapaian efisiensi (Nugraha, 2004 dalam Pratiwi, 2016)

Sedangkan elemen-elemen yang dapat menghambat kapasitas adalah :

#### 1. Keterbatasan Pendanaan dan Anggaran

Pamudji (1985) dalam Tangkilisan (2005) menyatakan bahwa kedudukan faktor keuangan dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan sangat penting. Organisasi Perangkat Daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa ada biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan pembangunan dan keuangan.

#### 2. Dinamika Konflik Lokal

Sebuah keniscayaan bahwa setiap perubahan akan selalu menghasilkan kelompok *stakeholders* yang merasa diuntungkan dan dirugikan. Apa yang menjadi keuntungan bagi suatu kelompok sering menjadi kerugian bagi kelompok lain. Kunci utama keberhasilan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi adalah kemampuan para penyelenggaranya untuk tanggap terhadap dinamika permasalahan yang dihadapi dan potensi yang tersedia.

### 2. Kebakaran Lahan dan Hutan

#### a. Pengertian Kebakaran Lahan dan Hutan

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan, yang dimaksud dengan



lahan adalah "suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat". Berdasarkan material pembentukannya, lahan dibedakan menjadi dua yaitu: lahan kering (tanah mineral) dan lahan gambut (Limin, 2006).

Dalam pengertian lain yang dimaksud dengan lahan adalah suatu areal yang berada diluar kawasan hutan baik berupa tanah mineral maupun gambut yang diperuntukan untuk kegiatan budidaya. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan diluar kawasan hutan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi Sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Kebakaran dan pembakaran merupakan sebuah kata dengan kata dasar yang sama tetapi mempunyai makna yang berbeda. Kebakaran identik dengan kejadian yang tidak disengaja sedangkan pembakaran identik dengan kejadian yang sengaja diinginkan tetapi tindakan pembakaran dapat juga menimbulkan terjadinya suatu kebakaran. Dengan kata lain pembakaran didefinisikan sebagai tindakan kesengajaan membakar yang dilakukan masyarakat dalam mengelola lahan untuk kegiatan pertanian atau perladangan mereka. Sedangkan kebakaran didefinisikan sebagai suatu proses pembakaran yang menyebar secara bebas, tidak tertekan yang mengkonsumsi bahan bakar seperti : serasah, rumput, humus,

ranting-ranting kayu mati, tiang, gulma, semak, dedaunan serta pohon-pohon segar (Dharmawan, 2003).

Kebakaran lahan didefinisikan sebagai “suatu keadaan dimana lahan dilanda api sehingga mengakibatkan kerugian obyek pengembangan ilmu pengetahuan, ekonomi dan atau ekologis/ lingkungan hidup”. Kebakaran Hutan dan Lahan yang selanjutnya disebut Karhutla adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan dan lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik. (peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan republik indonesia nomor p.32/menlhk/setjen/kum.1/3/2016 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan)

Kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi di Indonesia sebagian besar diakibatkan oleh aktivitas manusia dalam rangka pembukaan lahan, baik untuk usaha pertanian, perkebunan maupun kehutanan dan ditunjang oleh kondisi iklim dan adanya fenomena alam seperti *El Nino Southern Oscillation* (ENSO). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kejadian kebakaran selalu meningkat pada saat Anomali SST (*Sea Surface Temperature*) menunjukkan nilai positif yang menyebabkan kekeringan berkepanjangan di Indonesia (Putra, 2011).

Titik panas (*hotspot*) saat ini menjadi salah satu indikator yang dapat diandalkan bagi kejadian kebakaran di suatu wilayah, meskipun harus ditindaklanjuti dengan verifikasi lapangan. Beberapa kajian menunjukkan bahwa

hotspot di lapangan hampir selalu berkaitan dengan kegiatan pembukaan hutan dan lahan (Saharjo, 2008).

Pengamatan pada citra satelit menunjukkan bahwa *hotspot* secara dominan dijumpai pada areal areal perkebunan dan hutan tanaman. Hanya sebagian kecil *hotspot* tersebut yang ditemukan pada areal transmigrasi dan peladang berpindah (Saharjo, 2008). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penyebab utama kebakaran hutan dan lahan lebih banyak disebabkan oleh kegiatan pembukaan lahan secara besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan dan kehutanan tanpa terkendali (Saharjo, 2008).

Kebakaran hutan dan lahan juga ditunjang oleh beberapa faktor antara lain, perilaku masyarakat yang berubah dan kebijakan pemerintah (Saharjo, 2008). Perilaku masyarakat yang berubah sangat berhubungan dengan tidak berfungsinya aturan yang ada, yaitu menguntungkan pengusaha tetapi merugikan masyarakat, sehingga sering menimbulkan masalah atau konflik (Saharjo, 2008). Sedangkan kebijakan pemerintah berkaitan dengan peraturan dan perijinan pembukaan lahan. Peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah seringkali tidak konsisten, tidak terimplementasikan dengan baik dan tidak dibarengi dengan tindakan tegas dalam memberikan sanksi terhadap pelaku pelanggaran (Saharjo, 2008). Sehingga para pelaku pembakaran hutan yaitu pengusaha atau pengelola kegiatan kehutanan dan perkebunan masih tetap melakukan praktek-praktek pembakaran dalam pembukaan lahannya (Saharjo, 2008). Sumber utama kebakaran hutan dan lahan adalah: masyarakat, areal bekas

HPH, areal bekas kebun sawit, hutan tanaman dan area konservasi, terutama di kawasan-kawasan yang memiliki gambut. Terdapat hubungan antara hotspot sebagai indikator kebakaran dengan luas lahan gambut. Gambut sangat peka terhadap kejadian kebakaran.

Penyebab kebakaran lahan dan hutan sampai saat ini masih menjadi topik perdebatan, apakah karena alami atau karena kegiatan manusia. Namun berdasarkan beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama kebakaran lahan dan hutan adalah faktor manusia yang berawal dari kegiatan atau permasalahan sebagai berikut:

1. Sistem perladangan tradisional dari penduduk setempat yang berpindah-pindah.
2. Pembukaan hutan oleh para pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) untuk industri kayu maupun perkebunan kelapa sawit.
3. Penyebab struktural, yaitu kombinasi antara kemiskinan, kebijakan pembangunan dan tata pemerintahan, sehingga menimbulkan konflik antar hukum adat dan hukum positif negara.

#### **b. Proses Penanggulangan Bencana**

Penanggulangan bencana dapat dibagi atas tiga tingkatan, yaitu pada tingkat lokasi disebut manajemen insiden, tingkat unit atau daerah disebut manajemen darurat, dan tingkat nasional atau korporat disebut manajemen krisis.

1. Manajemen insiden adalah penanggulangan kejadian di lokasi atau langsung di tempat kejadian. Dilakukan oleh tim tanggap darurat yang dibentuk atau petugas lapangan sesuai dengan keahliannya masing-masing. Penanggulangan bencana pada tingkat ini bersifat teknis
2. Manajemen darurat adalah upaya penanggulangan bencana di tingkat yang lebih tinggi yang mengkoordinir lokasi kejadian.
3. Manajemen krisis berada di tingkat yang lebih tinggi misalnya di tingkat nasional atau tingkat korporat bagi suatu perusahaan yang mengalami bencana.

Perbedaan tugas dan tanggung jawab pada ketiga tingkatan adalah berdasarkan fungsinya yaitu taktis dan strategis. Tingkat manajemen insiden, tugas dan tanggung jawab lebih banyak bersifat taktis dan semakin keatas tugasnya akan lebih banyak menangani hal yang strategis. Pengaturan fungsi dan peran sangat penting dilakukan dalam mengembangkan suatu penanggulangan bencana. Hambatan di lapangan pada dasarnya terjadi karena pengaturan tugas dan peran tidak jelas. Siapa yang bertanggung jawab mengkoordinir bantuan dari pihak luar dan siapa yang mengelola bantuan tersebut setelah berada di lapangan. Siapa penentu kebijakan penanggulangan bencana dan siapa yang melakukan penerapannya di lapangan.

Ada beberapa upaya dalam menanggulangi bencana seperti yang tertulis dalam Undang-undang No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yaitu:

1. *Kegiatan pencegahan bencana* adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.(Pasal 1 ayat (6))
2. *Kesiapsiagaan* adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.( Pasal 1 ayat (7))
3. *Peringatan dini* adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin pada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.( Pasal 1 ayat (8))
4. *Mitigasi* adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. ( Pasal 1 ayat (9))
5. *Tanggap darurat bencana* adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. ( Pasal 1 ayat (10))
6. *Rehabilitasi* adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik dan masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi berjalannya secara wajar semua

aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.

(Pasal 1 ayat (11))

7. *Rekontruksi* adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintah maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan prekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana. (Pasal 1 ayat (12))

Dari pengertian-pengertian diatas mengenai beberapa upaya penanggulangan bencana, maka dapat disimpulkan bahwa ada banyak kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan untuk mengatasi dan mencegah resiko bencana yang bertujuan untuk mengembalikan sumber-sumber daya di wilayah yang terkena bencana tersebut.

#### **c. Penanggulangan Kebakaran Lahan dan Hutan**

Pencegahan kebakaran telah diupayakan pemerintah melalui penetapan kebijakan pembukaan lahan tanpa bakar "*zero burning policy*" yang dituangkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan, undang- undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan undang undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan serta Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutandan Lahan.

Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang disebut dalkarhutla meliputi usaha, kegiatan, tindakan pengorganisasian, pengelolaan sumberdaya manusia dan sarana prasarana serta operasional pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran, dukungan evakuasi dan penyelamatan, dan dukungan manajemen pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan. (peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan republik indonesia nomor p.32/menlhk/setjen/kum.1/3/2016 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan )

Di Indonesia ada beberapa organisasi/instansi yang berperan dalam menangani bencana kebakaran hutan dan lahan yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (BNPB), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan., LAPAN, BMKG, Kepolisian Negara dan TNI dari pusat hingga turunannya di daerah-daerah.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian tentang kinerja dan kapasitas kelembagaan sudah banyak dilakukan, beberapa penelitian dijabarkan pada Tabel 2.1 beberapa penelitian memiliki kesamaan persepsi serta menjabarkan tinjauan dan padangan yang menjadi tambahan keilmuan untuk penelitian ini, namun penelitian ini dilaksanakan pada lokus dan daerah yang berbeda dengan tinjauan dan indikator yang berbeda.



Table 2.1 Matrik Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Kesimpulan	Tahun
1	Pratiwi Nur Habibi	Kapabilitas Pemerintah Daerah dalam Pengurangan Risiko Bencana Tsunami di wilayah Pesisir Kulonprogo	Kapabilitas Kabupaten Kulonprogo berada pada tingkat level 5 yang menunjukkan bahwa capaian komprehensif dari semua lini penanggulangan bencana dengan komitmen dan kapasitas yang memadai. Faktor pendukung pada kapabilitas tersebut adalah kesamaan persepsi dan kehendak terhadap tujuan yang ingin dicapai, regulasi yang mendukung dan terjalannya koordinasi yang efektif. Sedangkan yang menjadi hambatan adalah keterbatasan anggaran dan dinamika konflik lokal.	2016
2	Nur Khotimah Suri	Analisis Kinerja BPBD Kabupaten Karo dalam Upaya Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karo belum terlihat kinerja yang baik karena masih banyak terdapat masalah-masalah dalam penanggulangan bencana erupsi Gunung Sinabung. Meskipun demikian, BPBD Kabupaten Karo telah memiliki peta rawan bencana khusus Kabupaten Karo yang dapat membantu kinerja BPBD Kabupaten Karo dalam mengantisipasi dan mengevakuasi bila bencana datang. BPBD Kabupaten Karo juga memiliki hambatan dalam penanggulangan bencana, seperti kurangnya koordinasi antara unsur-unsur pengarah dalam penanggulangan bencana, masih kekurangan SDM yang memiliki kesesuaian keahlian dan pendidikan, sarana dan prasarana yang kurang memadai juga dapat menghambat penanganan bencana, belum terlaksananya SOP (Standar Operasional Prosedur).	2015
3	Fendi Irawan Saripati	Analisis Kinerja BPBD dalam menanggulangi Korban Bencana Banjir di Kampung Lambing (Jurnal) Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat,	Kreativitas pegawai BPBD saat menanggulangi korban bencana banjir cukup baik. Hanya saja kreativitas staf BPBD lebih ditingkatkan lagi, sehingga kreativitas dalam menanggulangi korban bencana banjir di daerah rawan banjir dan memberikan pertolongan dalam penanggulangan korban banjir sesuai rencana.	2015

			<p>Kerjasama pegawai BPBD dalam menanggulangi korban bencana banjir cukup baik, dimana team regu penyelamat BPBD tetap berkoordinir, bekerjasama dengan instansi pemerintah lainnya serta perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar kampung Lambing, seperti PT. BANPU, PT. TSA dan PT. PAMA. BPBD juga tetap melakukan kerjasama dengan semua masyarakat sekitar korban bencana banjir atas bencana banjir yang dihadapi, sebagai salah satu tujuannya untuk meningkatkan kerjasama antara pihak instansi pemerintah dan perusahaan serta masyarakat sekitar bencana banjir, agar tercapainya sinergi dibutuhkan kerjasama.</p>	
4	Novita Sari, dkk	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kualitas pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri	Pengembangan kapasitas kelembagaan secara keseluruhan dikatakan cukup baik, dimana model pelayanan menggunakan pola pelayanan terpadu satu atap bukan terpadu satu pintu. Pengembangan Kapasitas	2013
5	Jenivia Dwi Ratnasari	Pengembangan kapasitas kelembagaan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang	Penerapan pengembangan kapasitas kelembagaan sudah dilakukan sebagai upaya meningkatkan kinerja meskipun dalam pelaksanaannya terdapat factor pendukung dan penghambat. Factor pendukung dalam pengembangan kapasitas adalah kepemimpinan, komitmen bersama, sedangkan factor penghambatnya adalah inkonsistensi penerapan aturan	2013
6	Adhela Mahda Hapsari	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jepara	<p>Pengembangan kapasitas adalah sebuah jawaban atas tuntutan pelayanan public dan permasalahan untuk melakukan perubahan organisasi menjadi lebih baik. Pengembangan dilakukan pada</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kepemilikan sumberdaya</li> <li>Struktur organisasi</li> <li>Ketatalaksanaan</li> <li>Budaya organisasi</li> <li>Sistem pengambilan keputusan</li> <li>SOP (sistem operating prosedur)</li> </ol> <p>Factor yang berpengaruh :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Komitmen bersama</li> <li>Kepemimpinan</li> <li>Resistensi Legal prosedural</li> <li>Resistensi Staff</li> </ol>	2012

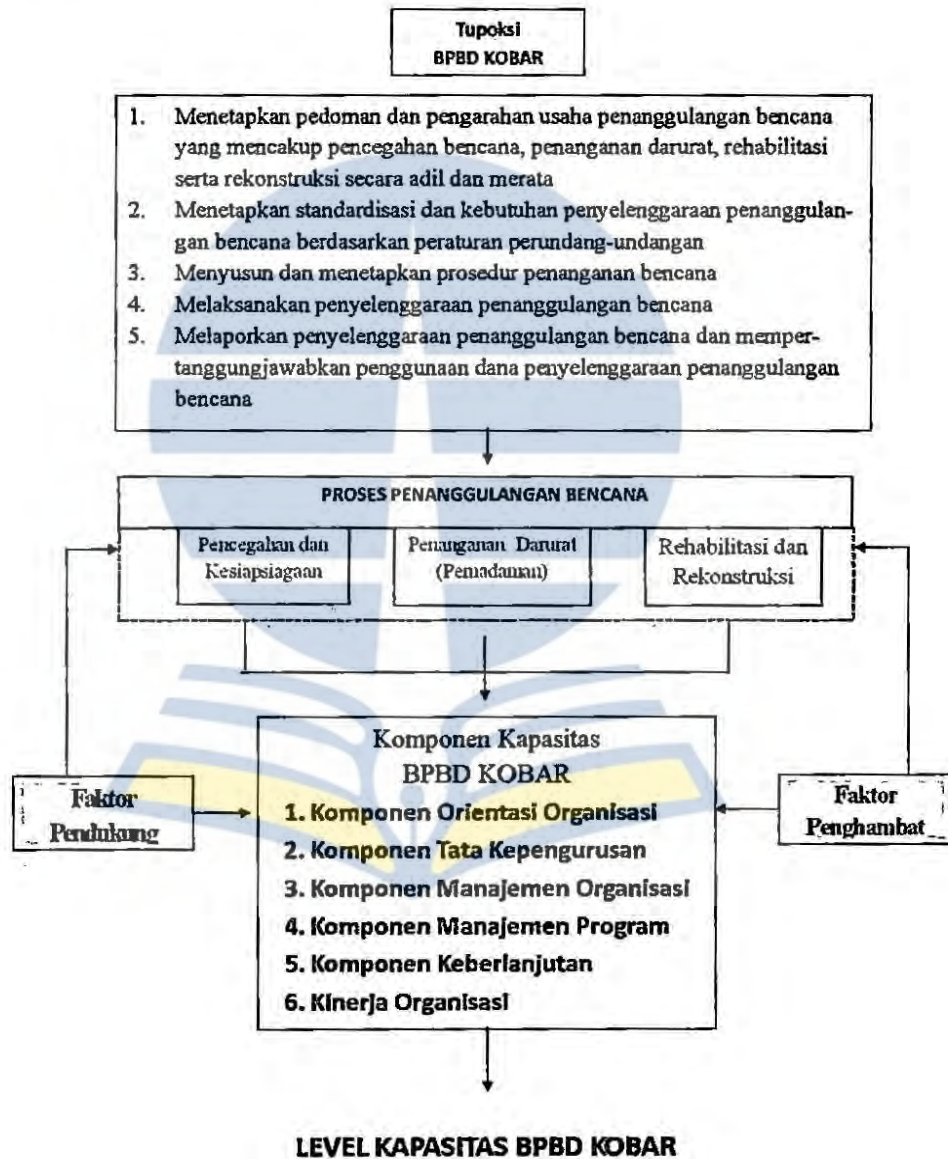
7		Koordinasi Institusi Pengendalian Kebakaran hutan/lahan	Penelitian dilakukan pada organisasi tingkat nasional di Jakarta, provinsi Riau dan Kalimantan Barat, Kota Dumai, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kubu Raya, menunjukkan bahwa : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bantuan layanan antar organisasi belum efektif</li> <li>2. Hubungan administrasi terjalin cukup baik dalam skala nasional namun lemah di tingkat provinsi dan kabupaten bahkan antar tingkatan</li> <li>3. Hubungan perencanaan terjalin cukup baik dalam skala nasional namun lemah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota</li> <li>4. Rendahnya jejaring kerja dan sumberdaya (manusia, sarpras dan anggaran) di setiap organisasi yang terlibat dalam pengendalian kebakaran berimplikasi besar dalam penanganan kebakaran hutan/lahan</li> </ol>	2010
---	--	---	---	------

### C. Kerangka Berpikir

Bencana kebakaran lahan dan hutan setiap tahun terjadi di Kabupaten Kotawaringin Barat tentunya membutuhkan penanganan yang tepat, cepat dan efisien guna meminimalkan dampak yang terjadi. Dibutuhkan sumberdaya yang optimal untuk hal tersebut. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD Kotawaringin Barat sebagai koordinator penanganan bencana di Kabupaten Kotawaringin Barat sehingga menangani Kebakaran Lahan dan Hutan secara khusus dan penanggulangan bencana secara umum, maka kapasitas lembaga merupakan faktor penting dalam tolak ukur awal untuk mengatasi masalah-masalah kebencanaan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Kapasitas yang menunjukkan kemampuan lembaga terutama dalam hal mencapai tujuan-tujuan program dan kegiatan yang diselenggarakan BPBD

merupakan ukuran yang penting dalam menunjukkan performa Lembaga. Secara sistematis, seluruh kegiatan pengukuran kapasitas BPBD Kotawaringin Barat mengikuti alur kerangka berpikir seperti gambar 2. 1



**Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian**

#### D. Operasionalisasi Konsep

Konsep adalah suatu makna yang berada di alam pikiran atau di dunia kepehaman manusia yang di nyatakan kembali dengan sarana lambang perkataan atau kata-kata. Konsep operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi bagaimana cara mengukur indikator penilaian dalam penelitian.

Penilaian kapasitas organisasi/lembaga meliputi 6 Komponen, yaitu :

1. Komponen orientasi organisasi;

Orientasi organisasi, merupakan pedoman dasar dalam organisasi, terdiri dari filosofi organisasi, isu-isu strategis, nilai-nilai dan penerapannya dalam organisasi, serta peran organisasi terhadap isu-isu organisasi. Orientasi ini menunjukkan visi, misi dan tujuan organisasi. Bahkan orientasi organisasi dalam pendekatan yang berbeda menunjukkan aturan main dalam melaksanakan pekerjaan- pekerjaan dalam organisasi, sehingga setiap fungsi dan peranan dalam organisasi dapat terlaksana dengan baik.

2. Komponen tata kepengurusan;

Tata kepengurusan adalah hal-hal yang menyangkut pembagian kekuasaan/wewenang, fungsi dan tugas pokok, mekanisme pengambilan keputusan, mekanisme transparansi dan akuntabilitas.

3. Komponen manajemen organisasi;

Manajemen organisasi merujuk pada kemampuan organisasi untuk mengelola sumberdaya dalam pencapaian tujuan, visi dan misi organisasi terdiri dari manajemen sumberdaya manusia, manajemen informasi,

manajemen keuangan, manajemen kantor, dan mekanisme pengelolaan dan/atau penyelesaian konflik.

4. **Komponen manajemen program;**

Manajemen program adalah pengelolaan terkoordinasi dari sekelompok kegiatan untuk mencapai tujuan dan menghasilkan manfaat, terdiri dari pengelolaan program, pelibatan penerima manfaat, serta pengembangan proses pembelajaran dan ruang pembelajaran.

5. **Komponen keberlanjutan;**

Keberlanjutan dimaknai sebagai kemampuan untuk mempertahankan sesuatu dalam proses yang berlangsung terus dan berkesinambungan, dalam pengukuran kapasitas organisasi, keberlanjutan terdiri dari mobilisasi sumberdaya, kaderisasi dan regenerasi, serta kepercayaan dan legitimasi publik, yang akan menunjukkan kemampuan organisasi untuk dapat terus menjalankan fungsi dan perannya sehingga mampu mencapai tujuan.

6. **Kinerja Organisasi;**

Kinerja merupakan pencapaian hasil, sejauhmana organisasi mampu melaksanakan program dan kegiatannya sesuai sasaran yang telah ditetapkan, dalam penilaian kapasitas terdiri dari cara-cara organisasi memperkuat proses dan kualitas pemberdayaan masyarakat, memperluas dan mengintensifkan hubungan kerja stakeholder

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Desain Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan menyesuaikan dengan maksud penelitian untuk memahami keadaan yang terbatas jumlahnya dengan fokus yang mendalam dan rinci. Berdasarkan hal-hal yang terjadi penelitian kualitatif bertujuan memusatkan perhatian pada masalah-masalah atau fenomena yang ada saat penelitian dilakukan atau masalah yang bersifat aktual, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki diiringi dengan interpretasi rasional akurat (Suyanto dan Sutinah, 2006).

Penggunaan Metode Kualitatif diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kapasitas pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana kebakaran lahan dan hutan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Penelitian dilakukan di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan pertimbangan kemampuan peneliti untuk memahami daerah dengan baik, merupakan lokasi kerja peneliti dan bencana kebakaran lahan dan hutan merupakan bencana utama yang hampir setiap tahun dialami.

### **B. Sumber Informasi dan Penentuan Informan**

Informan dalam penelitian ini adalah Informan Internal lembaga dan Informan Eksternal Lembaga. Informan internal lembaga merupakan informan inti terdiri dari aparatur sipil pada BPBD KOTAWARINGIN BARAT yang

memiliki jabatan struktural dan jabatan khusus dalam penanggulangan kebakaran lahan, dan Informan Eskternal merupakan informan tambahan terdiri dari instansi yang terlibat dalam penanganan kebakaran, pemadam kebakaran, dan masyarakat sekitar wilayah terdampak kebakaran seperti pada table 3.1

**Tabel 3.1 Informan Penelitian**

No	Informan	Jumlah
<b>Informan Utama</b>		
1	Kepala Pelaksana BPBD	1 Orang
2	Sekretaris BPBD	1 Orang
3	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	1 Orang
4	Kepala Bidang rehabilitasi dan Rekonstruksi	1 Orang
5	Kepala Seksi Kedaruratan	1 Orang
6	Kepala Seksi Logistik	1 Orang
7	Kepala Seksi Pencegahan	1 Orang
8	Kepala Seksi Kesiapsiagaan	1 Orang
9	Kepala Sub Bidang Perencanaan Program dan Pelaporan	1 Orang
10	Kepala Sub Bidang Keuangan	1 Orang
11	Kepala Sub Bidang Kepegawaian dan Perlengkapan	1 Orang
<b>Informan Pendukung</b>		
12	BMKG Pangkalan Bun	1 Orang
13	BKSDA	1 Orang
14	Manggala Agni	1 Orang
15	Dinas SatPol PP dan Damkar	1 Orang
16	Kepala Regu Damkar	1 Orang
17	PolRes	1 Orang
18	TNI	1 Orang
19	Kecamatan (Kecamatan Terdampak KarLahut)	3 Orang
20	Masyarakat (di wilayah terdampak) – Perwakilan Perangkat Desa	3 Orang
<b>Total Informan</b>		<b>24 Orang</b>



Penentuan jumlah informan menggunakan prosedur sampling non probabilitas dengan tipe penarikan sampel terpilih (purposive sampling). Morissan (2014) berpendapat bahwa tipe tersebut, sampel dipilih berdasarkan pertimbangan peneliti dalam Unit yang dianggap paling bermanfaat dan representatif dengan pemikiran, informan dipilih tidak secara acak. Alasan informan dipilih karena kewenangan dan tanggung awabnya dalam Penanggulangan Kebakaran Lahan dan Hutan dan dalam tugas pokok fungsinya terhubung dengan BPBD Kotawaringin Barat dalam Penanggulangan Kebakaran Lahan dan Hutan.

Informan dari kalangan Pemadam Kebakaran adalah pihak yang terlibat dalam aktivitas penanggulangan kebakaran lahan dan hutan karena keberadaannya yang pernah menjadi bagian BPBD Kotawaringin Barat, informan yang dipilih dari kalangan masyarakat adalah masyarakat pemilik lahan yang terdampak kebakaran lahan di wilayah yang lokasinya mewakili 3 Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat yang setiap tahun mengalami kebakaran lahan dan hutan. Jumlah Informan sebanyak 24 Orang, jumlah tersebut diambil karena pengumpulan data dari satu responden kepada responden lainnya yang penulis lakukan melalui wawancara mendalam, berhenti ketika tidak ada informasi lagi dan terjadi pengulangan informasi sehingga mencapai titik jenuh, jawaban para partisipan sudah mengarah pada hal yang sama.

### C. Instrumen Penelitian

Instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri, dengan tidak menghilangkan esensi manusiawi dari peneliti. Peneliti sesuai dengan kapasitasnya mengamati, bertanya, mengidentifikasi, melacak dan mengabstraksi. Dalam posisi sebagai instrument penelitian, maka kemampuan peneliti menjadi faktor utama. Peneliti sebagai instrumen penelitian harus memiliki sifat sabar, bijak, fleksibel dan mampu berkomunikasi dengan baik untuk dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan selama pengumpulan data untuk menghasilkan studi kualitatif yang kaya akan informasi. Peneliti sebisa mungkin menghilangkan kesubjektifannya demi keobjektifan hasil penelitian.

Selain itu instrumen penunjang yang digunakan adalah pedoman wawancara, alat rekam, kamera, dan perangkat komputer.

Selain itu instrumen penunjang yang digunakan adalah pedoman wawancara, alat rekam, kamera, dan perangkat komputer.

Pedoman Wawancara dijabarkan seperti pada Tabel 3.2 yang menjelaskan rinci Kisi-Kisi Pertanyaan dalam komponen-komponen penilaian Kapasitas Lembaga/Organisasi.

**Tabel 3.2 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian**

<b>L. Komponen Orientasi Organisasi</b>			
A	Filosofi Organisasi	1	Bagaimana Rumusan Visi, Misi dan Tujuan Organisasi
		2	Siapa saja yang terlibat dalam perumusan tsb Bagaimana prosesnya
		3	Apakah pernah dilakukan perubahan Visi dan Misi
B	Isu-ISu strategis	4	Apa saja isu-isu strategis yang terkait dengan organisasi
		5	Bagaimana isu-isu strategis tersebut terkait dengan visi, misi dan tujuan

C	Nilai- Nilai dan penerapannya	6	Apa saja nilai dan sistem nilai yang dianut organisasi
		7	Siapa saja yang terlibat dalam perumusan nilai-nilai tsb
		8	Apakah nilai-nilai tersebut dipahami Dipraktekkan Dalam organisasi maupun dalam hubungan interaksi
D	Peranan Organisasi	9	Pernahkah organisasi mengalami perubahan peran
		10	Apakah struktur organisasi sudah sesuai dengan orientasi organisasi
<b>II. Komponen Tata Kepengurusan</b>			
E	Pembagian Kekuasaan/kewenangan Fungsi dan tugas pokok	11	Hal-hal apa yang mendasari pembagian wewenang Siapa saja yang terlibat dalam penentuan kewenangan tsb
		12	Bagaimana proses penempatan personil pada bagian-bagian organisasi Adakah konflik kepentingan dalam pemilihan tsb Adakah pertukaran/Pergantian personil secara regular
			13
		14	Bagaimana Fungsi/Tugas pokok bagian organisasi ditetapkan Apa yang mendasari penentuan fungsi-fungsi utama
		15	Apakah tiap bagian organisasi menjalankan fungsi atau tugas pokoknya Adakah kendala Jika ada yang tidak menjalankannya, mengapa
F	Mekanisme Pengambilan Keputusan	16	Bagaimana mekanisme pengambilan keputusan dalam organisasi? Siapa saja yang terlibat dalam pengambilan keputusan
		17	Apakah mekanisme pengambilan keputusan dilaksanakan secara konsisten oleh bagian2 organisasi
		18	Adakah dominasi pengambilan keputusan Mengapa hal tersebut terjadi
		19	Apakah mekanisme pengambilan keputusan dijalankan sesuai sesuai dengan kekuasaan/kewenangan atau fungsi/tugas pokok masing-masing bagian
G	Mekanisme Transparansi dan akuntabilitas	20	Bagaimana sistem pelaporan pada BPBD Pengukuran kinerja Publikasi kepada masyarakat umum
<b>III. Komponen Manajemen Organisasi</b>			
H	Manajemen Sumberdaya Manusia	21	Seperti apa komposisi staf saat ini
		22	Adakah sistem dan prosedur manajemen SDM lembaga yang baku dan terimplementasi
		23	Bagaimana proses penempatan staf Apakah sesuai kompetensinya
		24	Apakah ada skema pengembangan SDM

			Apakah dijalankan secara konsisten
		25	Apakah dilakukan evaluasi kinerja staf Bagaimana prosesnya Siapa yang melakukan
		26	Bagaimana Orientasi Organisasi menjadi pijakan/dasar dalam manajemen SDM Apakah staf kompeten dalam mengimplementasikan isu strategis organisasi
I	Manajemen Informasi (pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian) Internal dan eksternal	27	Adakah aturan baku terkait manajemen informasi
		28	Apa saja informasi yang dikumpulkan/didokumentasikan Dalam sistem jaringan kerja (terkait penanggulangan kebakaran lahan dan hutan) apakah informasi juga dikumpulkan dari anggota jaringan
		29	Bagaimana proses pengumpulan dan pengolahan informasi dilakukan Siapa yang melakukan
		30	Bagaimana informasi dikemas dan didistribusikan Kepada siapa saja disebarkan Melalui media apa
J	Manajemen Keuangan (Pendanaan, penggunaan dan pelaporan)	31	Adakah aturan baku menyangkut manajemen keuangan Apakah diaplikasikan secara konsisten
		32	Siapa saja yang terlibat dalam perencanaan anggaran organisasi
		33	Bagaimana mekanisme control keuangan
		34	Siapa saja yang memiliki akses terhadap informasi keuangan
		35	Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban keuangan dilakukan Bagaimana laporan keuangan disusun Siapa saja yang terlibat dalam penyusunannya
K	Manajemen Peralatan dan Logistik	36	Adakah sistem baku pengelolaan logistik dan peralatan Apakah diaplikasikan secara konsisten
		37	Adakah bagian khusus yang melakukan pengelolaan Bagian apa
		38	Bagaimana mekanisme kontrol penggunaan peralatan
		39	Adakah sistem mobilisasi peralatan, logistic Bagaimana pendistribusian dalam Penanggulangan Bencana
L	Manajemen Kantor	40	Adakah sistem baku pengelolaan kantor Apakah dilaksanakan secara konsisten ADakah bagian khusus yang melakukan pengelolaan Bagian apa
		41	Apakah sumberdaya-sumberdaya organisasi dimanfaatkan secara adil dan oleh seluruh staff
M	Mekanisme Pengelolaan dan/atau penyelesaian konflik	42	Bagaimana Organisasi menyelesaikan konflik Apakah penyelesaiannya dilaksanakan secara adil
		43	Adakah mekanisme baku penyelesaian konflik untuk

			mengatasi persoalan persoalan internal
		44	Adakah potensi konflik pemilihan strategi organisasi yang tergabung dalam jaringan kerja tersebut
<b>IV. Komponen Manajemen Program</b>			
N	Pendekatan Pengelolaan Program	45	Apa pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan program Kenapa menggunakan pendekatan tsb
		46	Apakah pendekatan tsb digunakan dalam setiap tahapan/proses pengelolaan program Dalam perencanaan, implementasi dan monitoring Apakah dilaksanakan pengembangan monitoring sesuai pendekatan yang digunakan
		47	Apakah dilakukan monitoring secara regular Apa yang dilakukan terhadap hasil monitoring tsb
		48	Apakah dilakukan evaluasi program Sejauh mana hasil evaluasi dimanfaatkan untuk perbaikan strategi program
O	Pelibatan penerima manfaat	49	Adakah masyarakat terlibat dalam penyusunan program kunci/program inti organisasi Bagaimana prosesnya
		50	Apakah masyarakat memiliki peran aktif dalam program/kegiatan organisasi
		51	Apakah ada keterlibatan pihak ketiga (instansi swasta – pihak dunia usaha) dalam program/kegiatan organisasi Bagaimana model keterlibatannya
P	Pengembangan proses pembelajaran/ruang pembelajaran	52	Apakah ada mekanisme pembelajaran dalam organisasi Apakah pembelajaran dilakukan secara konsisten
		53	Apakah organisasi terus bertumbuh memperbaiki diri
		54	Bagaimana organisasi memanfaatkan hasil pembelajaran tersebut
<b>V. Komponen Keberlanjutan</b>			
Q	Mobilisasi sumberdaya	55	Apa strategi yang dilakukan organisasi dalam menggalang/mobilisasi sumberdaya Sumberdaya apa saja yang dimobilisasi Apakah strategi dijalankan secara regular
		56	Sejauh apa tingkat keberhasilan mobilisasi
		57	Apakah strategi mobilisasi diterapkan berdasarkan perencanaan yang sudah ada
R	Kaderisasi dan Regenerasi	58	Adakah upaya-upaya melaksanakan regenerasi personil Apa strategi yang dijalankan
		59	Adakah upaya organisasi untuk memastikan bahwa keahlian individu bisa didistribusikan Adakah penyebaran pengetahuan sehingga tidak terjadi keahlian terpusat
		60	Faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat keberhasilan hal tersebut
		61	Sejauh mana keberhasilan strategi tersebut

S	Kepercayaan dan legitimasi public	62	Apakah lembaga mengembangkan mekanisme khusus untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan publik termasuk komunikasi tentang perkembangan pencapaian visi dan misi organisasi dan pemanfaatan sumber daya organisasi Seperti apa mekanisme yang telah dijalankan Apakah dilaksanakan regular
		63	Sejauhmana tingkat keberhasilannya selama ini Bagaimana persepsi publik terhadap organisasi selama ini Apakah terjadi perubahan persepsi publik setelah terjadi interaksi dan komunikasi
<b>VI. Komponen Kinerja Organisasi</b>			
T	Penguatan Proses kualitas pemberdayaan masyarakat	64	Bagaimana kinerja organisasi dalam setiap sub komponen organisasi Apa dampaknya bagi layanan terhadap masyarakat
		65	Komponen internal apa saja yang berpengaruh terhadap layanan kepada masyarakat
		66	Apakah ada harmonisasi kerja antara organisasi dan masyarakat Apakah terdapat pelibatan masyarakat pada program dan kegiatan yang dilaksanakan organisasi
U	Penguatan tingkat kepercayaan masyarakat	67	Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap organisasi
		68	Apakah terdapat kerjasama antara organisasi dan masyarakat Adakah jejaring komunikasi antara masyarakat dan organisasi Apakah komunikasi dilaksanakan secara regular
		69	Seberapa penting masukan dari masyarakat diambil/dijadikan patokan dalam perencanaan program dan kegiatan organisasi
V	Perluasan intensifikasi hubungan kerja dengan stakeholder dalam rangka memperjuangkan isu dan peningkatan perluasan gagasan	70	Apakah organisasi memiliki hubungan kerja/partnership dengan pihak lain Pihak manasaja yang terkait Bagaimanakah hubungan kerja itu dibentuk
		71	Sejauh mana hubungan kerja antara organisasi dengan stakeholder dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan
		72	Apakah terdapat fungsi koordinasi Adakah struktur pembagian tugas dalam hubungan kerja dengan pihak lain Adakah pertemuan periodik yang dilaksanakan dalam jejaring kerjasama
W	Penguatan keberlanjutan program dan kegiatan di Masyarakat	73	Bagaimanakah penerapan program dan kegiatan di masyarakat Apakah program-program dilaksanakan kontinyu

Dan pertanyaan yang berbeda diajukan pada Informan Pendukung di Luar Instansi seperti pada tabel 3.3 Wawancara terhadap Informan Pendukung merupakan uji kebenaran dan penggalian tambahan atas kapasitas Organisasi BPBD KOTAWARINGIN BARAT, menjadi bagian tidak terpisahkan dari penjabaran

**Tabel 3.3 Pedoman Wawancara Bagi Informan Pendukung**

<b>Komponen Manajemen Organisasi</b>			
A	Keberadaan Organisasi	1	Apakah anda mengenal BPBD Apakah BPBD itu menurut Anda Dimanakah ALamatnya Bagaimana kedudukannya
		2	Apakah anda pernah mengetahui BPBD dipublikasikan Pada Media Apa Apa berita yang dipublikasikan
B	Jejaring Kerja dan Informasi	3	Apakah organisasi melakukan program kerja berbentuk jejaring
		4	Apakah organisasi termasuk bagian dari jejaring komunikasi dan informasi bencana Bagaimana keterlibatannya
		5	Apakah sistem jejaring masuk dalam perencanaan kerja, program dan kegiatan organisasi
<b>Komponen Manajemen Program</b>			
C	Keterlibatan	6	Apakah organisasi pernah terlibat kerjasama dengan BPBD Kotawaringin Barat Bagaimana model keterlibatannya Bagaimana sistem keterlibatan/kerjasama yang dijalankan
		7	Apakah organisasi termasuk dalam struktur penanggulangan bencana yang dibuat BPBD Kotawaringin Barat Sejauh mana keterlibatannya Apakah keterlibatannya secara regular
		8	Apakah organisasi berperan aktif dalam penanggulangan bencana
D	Pembelajaran	9	Apakah organisasi terlibat dalam pembelajaran
		10	Apakah organisasi terlibat dalam pengembangan pembelajaran
		11	Apakah organisasi memberi sumbangan ide/saran dan perencanaan dalam pengembangan program
<b>Komponen Keberlanjutan</b>			
E	Mobilisasi Sumberdaya	12	Apakah ada pengelolaan personil, logistik dan

			peralatan dari organisasi
		13	Apakah organisasi pernah memobilisasi personil dalam penanggulangan bencana Apakah prosesnya terkoordinasi dengan BPBD Kotawaringin Barat
F	Kaderisasi dan Regenerasi	14	Adakah upaya-upaya melaksanakan regenerasi personil Apa strategi yang dijalankan
		15	Adakah upaya organisasi melatih personil terkait dengan penanggulangan bencana
		16	Faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat keberhasilan hal tersebut
G	Kepercayaan dan Legitimasi	17	Bagaimanakah persepsi organisasi Anda terhadap Penanggulangan bencana di Kotawaringin Barat Bagaimana persepsi Anda untuk BPBD Kotawaringin Barat
<b>Komponen Kinerja Organisasi</b>			
H	Perluasan intensifikasi hubungan kerja dengan stakeholder dalam rangka memperjuangkan isu dan peningkatan perluasan gagasan	18	Apakah organisasi memiliki hubungan kerja/partnership dengan pihak lain Pihak manasaja yang terkait Bagaimanakah hubungan kerja itu dibentuk
		19	Sejauh mana hubungan kerja antara organisasi dengan stakeholder dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan
		20	Apakah terdapat fungsi koordinasi Adakah struktur pembagian tugas dalam hubungan kerja dengan pihak lain Adakah pertemuan periodic yang dilaksanakan dalam jejaring kerjasama
I	Penguatan keberlanjutan program dan kegiatan	21	Bagaimanakah penerapan program dan kegiatan di masyarakat Apakah program-program dilaksanakan kontinyu

#### D. Prosedur Pengumpulan Data

##### 1. Wawancara

Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang jelas dan detil, peneliti menggunakan wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur .

Wawancara terstruktur digunakan untuk menggali informasi sedalam-dalamnya tentang fenomena yang diteliti, untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan



tujuan penelitian, wawancara ini dilakukan untuk menggali faktor-faktor pendukung dan penghambat penanggulangan bencana kebakaran lahan dan hutan, penulis menggunakan pedoman wawancara untuk menggali data secara akurat dan valid dengan menjaring serangkaian jawaban dari informan mengenai suatu hal sesuai dengan pokok permasalahan dan tujuan penelitian (Suyanto dan Sutinah, 2005)

wawancara tidak berstruktur digunakan untuk merespon fenomena yang muncul secara tiba-tiba, dimana fenomena tersebut dirasa sangat relevan dengan fenomena yang diteliti, bersifat fleksibel namun tetap terfokus untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya dan juga digunakan untuk melakukan pengamatan langsung pada sistem kerja penanggulangan bencana yang dilaksanakan pada instansi terkait .

Dalam Penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara kepada Dua Puluh Enam (24) Orang Informan, Sebelas (11) Orang merupakan Informan Kunci dan Lima Belas (13) Orang merupakan Informan Tambahan, Rincian Lengkap untuk Sumber Informan disampaikan pada Tabel 3.1 Halaman 44.

I. Informan Kunci (Informan Internal BPBD), terdiri dari :

- |  |         |
|--|---------|
| 1. Kepala Pelaksana BPBD                       | 1 Orang |
| 2. Sekretaris BPBD                             | 1 Orang |
| 3. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik      | 1 Orang |
| 4. Kepala Bidang rehabilitasi dan Rekonstruksi | 1 Orang |
| 5. Kepala Seksi Kedaruratan                    | 1 Orang |

6. Kepala Seksi Logistik	1 Orang
7. Kepala Seksi Pencegahan	1 Orang
8. Kepala Seksi Kesiapsiagaan	1 Orang
9. Kepala Sub Bidang Perencanaan Program dan Pelaporan	1 Orang
10. Kepala Sub Bidang Keuangan	1 Orang
11. Kepala Sub Bidang Kepegawaian dan Perlengkapan	1 Oran

## II. Informan Pendukung (Informan Eksternal BPBD), terdiri dari :

1. BMKG Pangkalan Bun	1 Orang
2. BKSDA	1 Orang
3. Manggala Agni	1 Orang
4. Dinas SatPol PP dan Damkar	1 Orang
5. Komandan Damkar	1 Orang
6. PolRes	1 Orang
7. TNI	1 Orang
8. Kecamatan (Kecamatan Terdampak KarLahut)	3 Orang
9. Masyarakat (di wilayah terdampak)	3 Orang

## 2. Observasi

Metode observasi dilakukan untuk mengumpulkan data secara sistematis melalui pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diteliti. Observasi dilakukan dengan mengunjungi langsung instansi partisipan dan mengunjungi wilayah-wilayah terdampak kebakaran lahan dan hutan. Pada SOPD terkait di Kabupaten Kotawaringin Barat peneliti akan melakukan pengamatan sistem

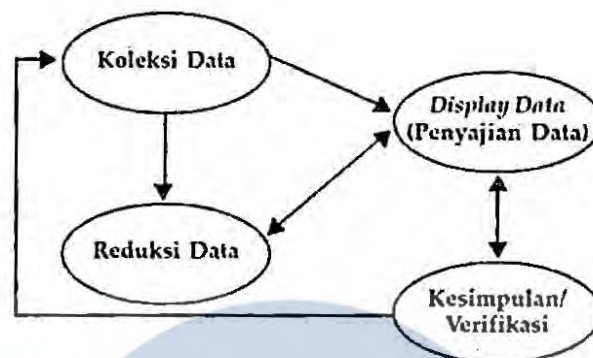
kerja, prosedur penanggulangan bencana, sedangkan wilayah terdampak Kecamatan Arut Selatan, Kecamatan Kumai dan Kecamatan Pangkalan Lada. Peneliti akan melakukan rekam gambar (Foto) areal-areal bekas terbakar dan areal yang rawan terbakar.

### 3. Dokumentasi

Penelaahan terhadap dokumen tertulis, data yang diperoleh dari metode ini berupa cuplikan, kutipan atau penggalan catatan-catatan dari dokumen yang relevan dengan penelitian, pengumpulan dokumen ditempuh dengan cara kunjungan langsung ke instansi sehingga didapatkan dokumen resmi pemerintah, maupun memanfaatkan dokumen pribadi partisipan interviu. Selain itu data didapatkan dari website Pemerintah Kabupaten Kotawaringin barat maupun website lain yang terkait dengan topik penelitian.

#### E. Metode Analisis Data

Sugiyono (2014), analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan kemudian membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Berdasarkan model alir analisis interaktif Milles dan Hubberman (Sugiyono, 2014) pada Gambar 3.1



Gambar 3.1 Model Analisis Interaktif (Milles dan Hubberman)

Dari bagan tersebut Data yang berhasil dihimpun peneliti akan melalui tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi, yang dijabarkan berikut :

### 1. Reduksi Data (*reduction data*).

Reduksi data diartikan sebagai suatu proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data yang diperoleh di lokasi penelitian tersebut kemudian dituangkan dalam uraian atau laporan yang lebih lengkap dan terinci. Sehingga laporan lapangan tersebut selanjutnya direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian, yang kemudian dicari tema atau polanya.

## **2. Penyajian Data (*Data Display*).**

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang berguna untuk memudahkan peneliti memahami gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Dimana dengan dilakukannya penyajian data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut. Dalam penelitian ini, dalam aktivitas penyajian data yang diperoleh diwujudkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif, bagan, foto atau gambar dan sejenisnya.

## **3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi**

Penarikan kesimpulan yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data. Dimana peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, yang kemudian dituangkan dalam kesimpulan.

Secara garis besar analisis dilakukan atas 2 hal yaitu tingkat kapasitas BPBD Kotawaringin Barat dan faktor pendukung serta penghambat kapasitas tersebut, yang dijelaskan sebagai berikut :

### **1. Analisis Tingkat Kapasitas BPBD Kotawaringin Barat**

Penilaian Kapasitas Lembaga BPBD Kotawaringin Barat secara umum mengacu pada Manajemen Organisasi dimana penilaian dilakukan berdasarkan 6 komponen penilaian OCPAT, dan secara khusus diimplementasikan pada

bagian-bagian dari manajemen penanggulangan bencana secara menyeluruh pada 3 Fase Prabencana, Penanganan Darurat hingga Pascabencana penanggulangan mulai dari pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.

Level Kapasitas secara umum akan mengacu pada penilaian OCPAT yang dimodifikasi penulis dimana masing-masing komponen penilaian memiliki kriteria :

1. Nilai 1 – Kapasitas Buruk : Belum ada kebijakan yang dibuat Lembaga dan Belum ada pelaksanaan atas kebijakan tersebut
2. Nilai 2 – Kapasitas Kurang : Sudah terdapat beberapa kebijakan yang disusun secara terbatas namun belum dilaksanakan secara seksama *atau* sudah ada sistem yang dilaksanakan di lapangan namun belum dibakukan menjadi kebijakan organisasi
3. Nilai 3 – Kapasitas Cukup : Kebijakan lengkap, sebagian besar disusun secara partisipatif dalam tataran internal organisasi, dan sebagian besar sudah dilaksanakan
4. Nilai 4 – Baik : sudah ada kebijakan organisasi, sudah diadaptasi sesuai perkembangan lembaga dan kebutuhannya, proses penyusunannya partisipatif melibatkan stakeholder bahkan telah dilaksanakan secara seksama.

Alat yang digunakan sebagai *tools* dalam analisis kapasitas hingga mendapatkan level kapasitas manajerial organisasi mengadopsi OCPAT – *Organisational*

*Capacity dan Performance Assessment Tools* yang berorientasi pada pengembangan kapasitas organisasi.

Dimana Komponen-Komponen Penilaian dalam penelitian ini meliputi :

1. *Komponen Orientasi Organisasi*, meliputi visi dan misi organisasi, filosofi organisasi, tata nilai dan penerapannya, serta peran dan posisi organisasi terhadap isu-isu kebencanaan.
2. *Komponen Tata Kepengurusan*, meliputi pembagian kekuasaan/wewenang, fungsi dan tugas pokok, mekanisme pengambilan keputusan, mekanisme transparansi dan akuntabilitas
3. *Komponen Manajemen Organisasi*, meliputi manajemen sumberdaya manusia, manajemen informasi, manajemen keuangan, manajemen kantor, mekanisme pengelolaan dan penyelesaian konflik
4. *Komponen Manajemen Program*, meliputi pengelolaan program dan pengembangan kegiatan
5. *Komponen Keberlanjutan*, meliputi mobilisasi sumberdaya, kaderisasi dan regenerasi, hingga kepercayaan publik
6. *Kinerja Organisasi*, meliputi penguatan proses pemberdayaan masyarakat, mengintensifkan hubungan kerja antar stakeholder, memperbanyak dan meningkatkan kualitas jaringan kerja Organisasi.

Dan kemudian Kapasitas tersebut dikaitkan dengan Bencana Kebakaran lahan dan Hutan hingga mendapatkan Level kapasitas penanggulangan bencana

dimana kesimpulan hasil mengadopsi level penghitungan kapasitas (Perka No.3 Tahun 2012 tentang Penilaian Kapasitas Daerah) sesuai Tabel 3.4

**Tabel 3.4 Kriteria Tingkat Level Kapasitas**

<b>Level</b>	<b>Pencapaian</b>
Level 1	<b>Sangat Kurang</b> Pencapaian kecil dalam penanggulangan bencana, minim dalam upaya pencegahan dan kesiapsiagaan, tindakan masih pada upaya penanganan darurat, sinkronisasi antara kebijakan dan pelaksanaan kerja di lapangan tidak ada
Level 2	<b>Kurang</b> Lini penanggulangan bersifat sporadis, terpisah-pisah, terbatas, tanpa komitmen kelembagaan menyeluruh, belum ada manajemen yang sistematis, ada kebijakan namun pelaksanaan/penerapan kebijakan belum mencapai standar yang disyaratkan
Level 3	<b>Cukup</b> Penyelenggaraan penanggulangan sampai pada taraf koordinasi yang terstruktur, pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dalam kerangka kebijakan yang belum menyeluruh
Level 4	<b>Baik</b> Penyelenggaraan penanggulangan secara menyeluruh sudah terstruktur dengan baik namun diakui masih ada keterbatasan dalam komitmen, pendanaan, pelaksanaan operasional lapangan, dan kekurangan dalam upaya pencegahan kebakaran lahan dan hutan termasuk pengurangan risikonya
Level 5	<b>Sangat Baik</b> Capaian yang komprehensif dalam penanggulangan bencana kebakaran lahan dan hutan, komitmen yang tinggi dalam semua tahapan, skor terbaik dalam setiap penanganan bahkan memiliki manajemen pengurangan risiko bencana kebakaran lahan dan hutan yang terpadu

Sumber : Peneliti \_ modifikasi Perka BNPB No.3 tahun 2012

Level yang berbeda antara OCPAT dan Kapasitas Penanggulangan Bencana bukan menunjukkan dualisme penilaian, namun lebih pada keterkaitan dengan sistem penanggulangan, dimana kapasitas manajerial lembaga secara



umum diimplementasikan dalam kerja penanggulangan bencana khusus dalam penelitian ini bencana kebakaran lahan dan hutan.

## **2. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Kapasitas BPBD Kotawaringin Barat**

Setelah dilakukan identifikasi level kapasitas pada tiap komponen penilaian tahapan selanjutnya peneliti akan melanjutkan wawancara mendalam pada informan untuk menemukan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kapasitas BPBD yang diklasifikasikan menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat. Analisis bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Peneliti akan mencari, mengumpulkan, dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkannya dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2014).

Analisis Data berperan mengatur, menurunkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengkategorikan. Data-data yang diperoleh oleh penulis dalam penelitian ini dianalisis selain menggunakan konsep penilaian juga dianalisis dengan lebih rinci dan lebih mendalam. Penelitian ini hanya sampai pada penemuan/identifikasi konsep-konsep dan tidak pada tataran pembentukan teori. Penulis menggunakan pandangan fenomena yaitu berusaha memahami arti

suatu peristiwa dalam kaitannya dengan pengalaman subyektif dari seseorang untuk memaknai suatu persoalan dan menghubungkannya dengan kriteria penilaian yang menjadi dasar dalam menggambarkan tingkat kapasitas lembaga dalam penanggulangan bencana.

#### **F. Penyajian Data**

Data Kapasitas BPBD disajikan dengan menggunakan Narasi Deskriptif dan matrik. Matrik digunakan untuk menunjukkan perbedaan jenjang kapasitas dari masing-masing komponen dengan kategori buruk, kurang, cukup dan baik. Masing-masing komponen penilaian manajerial dikaitkan dengan tahapan penanggulangan bencana yaitu pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi maka secara akumulasi akan ditarik kesimpulan menyeluruh untuk Level kapasitas Lembaga BPBD dari masing-masing komponen.

Adapun temuan dari observasi, dokumentasi dan wawancara untuk menjawab faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas dijelaskan dalam teks secara naratif.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kondisi Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

##### **1. Visi dan Misi BPBD Kotawaringin Barat**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki visi “terwujudnya masyarakat kabupaten kotawaringin Barat yang wasapada dan tangguh terhadap bencana dan untuk membantu pencapaian misi tersebut terdapat tiga misi yang ditetapkan bersama :

1. Melindungi masyarakat dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko bencana
2. Mewujudkan penanggulangan bencana yang handal dan terampil
3. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinir, menyeluruh dan berbasis masyarakat.

##### **2. Tugas Pokok dan Fungsi BPBD Kotawaringin Barat**

BPBD merupakan Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang penanggulangan bencana daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kotawaringin Barat dan secara fungsional dibina oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. BPBD dipimpin oleh seorang Kepala yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok dan fungsi BPBD KOTAWARINGIN BARAT berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2012, adalah sebagai berikut:

### **2.1.1 Tugas Pokok**

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat nomor 3 tahun 2012 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai tugas :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
- f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran dana dan barang;
- h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat;
- i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **2.1.2 Fungsi**

Sesuai Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat nomor 3 tahun 2012 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melaksanakan tugas BPBD mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Ketika dijabarkan secara rinci dalam uraian tugas, BPBD mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan dibidang penanggulangan bencana;
- d. Pelaksanaan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- e. Peningkatan komunikasi, konsultasi, pengembangan dan bimbingan dalam upaya kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi lain dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;

### 3. Struktur Organisasi BPBD Kotawaringin Barat

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2012, Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari :

#### a. Kepala

Kepala BPBD secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

#### b. Unsur Pengarah

Unsur Pengarah terdiri dari ketua dan anggota. Ketua Unsur Pengarah dijabat oleh Kepala BPBD, sedang Anggota Unsur Pengarah terdiri dari berasal dari Badan/Dinas terkait (5 orang) dan unsur profesional/ahli dibidang penanggulangan bencana (4 orang).

#### c. Unsur Pelaksana

Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana sehari-hari. Susunan Unsur Pelaksana terdiri dari :

##### A. Kepala Pelaksana

##### B. Sekretariat Unsur Pelaksana, yang membawahi :

- 1) Sub Bagian Perencanaan, Penyusunan dan Pengendalian Program
- 2) Sub Bagian Keuangan
- 3) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan

##### C. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, yang membawahi :

1) Seksi Pencegahan

2) Seksi Kesiapsiagaan

D. Bidang Kedaruratan dan Logistik, yang membawahi :

1) Seksi Tanggap Darurat

2) Seksi Logistik

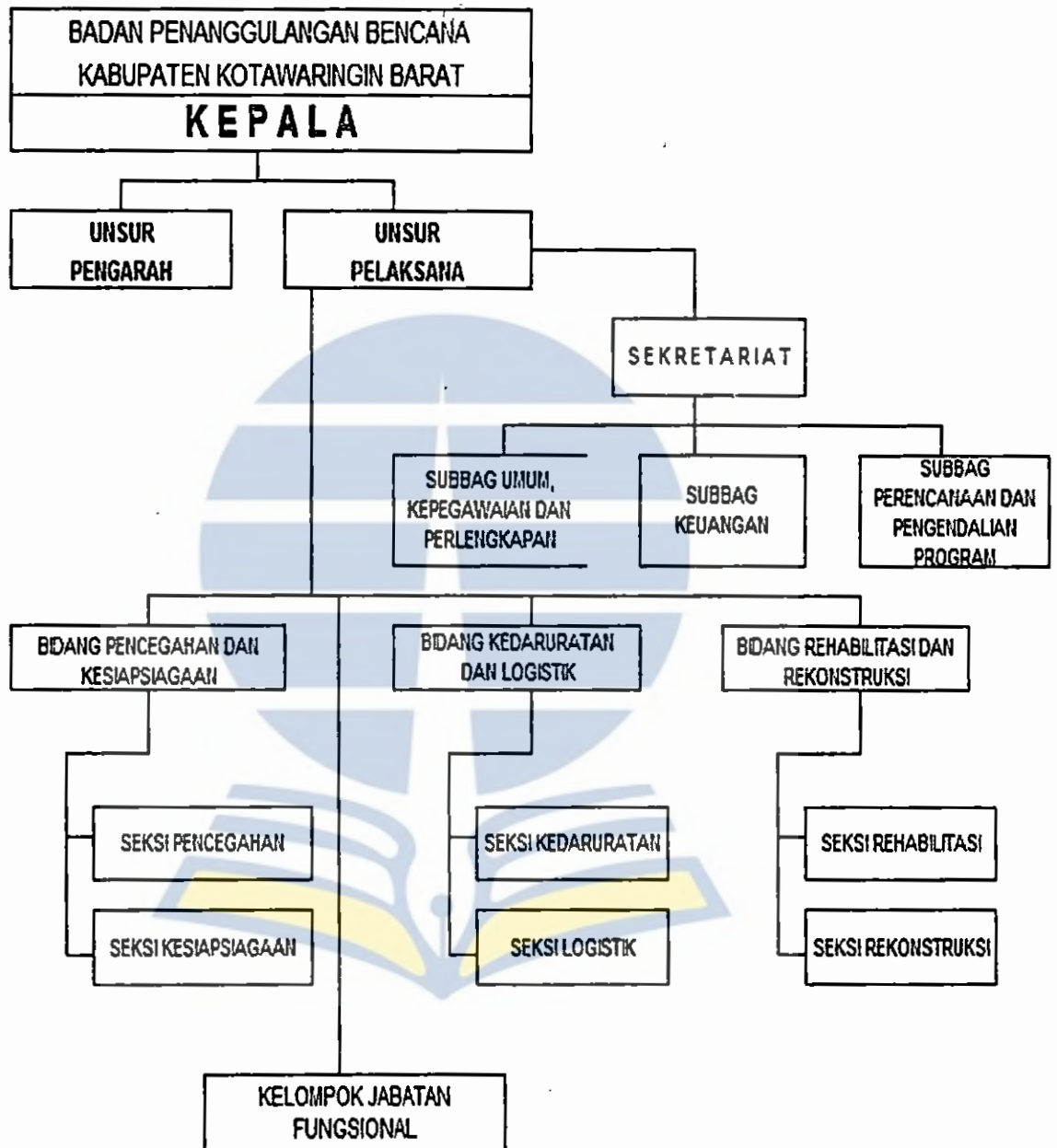
E. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, yang membawahi :

1) Seksi Rehabilitas

2) Seksi Rekonstruksi

F. Kelompok Jabatan Fungsional





**Gambar 4.1** Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat



#### **4. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat dan Bidang di BPBD Kotawaringin Barat**

Pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, BPBD memiliki 1 sekretariat dan 3 bidang teknis, yang dibjabarkan sebagai berikut :

##### **A. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai fungsi :

- 1) pengoordinasian, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;
- 2) pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
- 3) pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
- 4) fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
- 5) pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya;
- 6) pengoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana.

Secara garis besar tugas sekretariat adalah menyelenggarakan kegiatan penyusunan program, pengelolaan penatausahaan keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan serta administrasi kepegawaian. Dalam melaksanakan fungsi, Sekretariat mempunyai tugas :

- a. Merencanakan program di Sekretariat sesuai dengan rencana program BPBD dan petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas di lingkungan BPBD;

- b. Menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja BPBD berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- c. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja BPBD sebagai pertanggungjawaban Kepala BPBD kepada Bupati;
- d. Membagi tugas kepada Kepala Sub Bagian dan Stafnya di lingkungan Sekretariat sesuai dengan fungsinya masing-masing agar semua tugas dapat terlaksana dengan baik dan lancar;
- e. Memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian dan Staf di lingkungan Sekretariat sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- f. Mengkoordinasikan, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan dan perumusan di lingkungan BPBD agar semua tugas dapat terlaksana dengan baik dan lancar;
- g. Melaksanakan pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga serta hubungan masyarakat dan protokol;
- h. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- i. Mengumpulkan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

- j. Mengevaluasi kegiatan di lingkungan Sekretariat dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- k. Membuat laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada pimpinan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

#### **B. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan**

Bidang 1 atau Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

- 1) perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- 2) pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- 3) pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- 4) pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

Secara umum bidang pencegahan dan kesiapsiagaan memiliki tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pencegahan

pada situasi tidak terjadi bencana dan kesiapsiagaan dalam situasi terdapat ancaman bencana. Dalam melaksanakan fungsi, bidang pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai tugas :

- a. Merencanakan program Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan rencana program BPBD dan petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas di lingkungan BPBD;
- b. Merumuskan kebijakan di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- c. Membagi tugas kepada Kepala Seksi dan Stafnya di lingkungan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan fungsinya masing-masing agar semua tugas dapat terlaksana dengan baik dan lancar;
- d. Memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan Staf di lingkungan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- f. Memantau, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;

- g. Mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kesiapsiagaan terhadap potensi bencana;
- h. Mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan peringatan dini terjadinya bencana;
- i. Melaporkan pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang;

### **C. Bidang Kedaruratan dan Logistik**

Bidang 2 atau Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- 2) Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- 3) Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- 4) Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- 5) Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.

Secara umum, tugas bidang kedaruratan dan logistik adalah melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengkajian, penentuan wilayah bencana, status keadaan darurat dan fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana, perlindungan, bantuan kebutuhan

dasar dan logistik pada saat tanggap darurat. Dalam melaksanakan fungsi Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan rencana program BPBD dan petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas di lingkungan BPBD;
- b. Merumuskan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- c. Membagi tugas kepada Kepala Seksi dan stafnya di lingkungan Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan fungsinya masing-masing agar semua tugas dapat terlaksana dengan baik dan lancar;
- d. Memberi petunjuk kepada staf di lingkungan Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penyelamatan dan evakuasi, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- f. Mengkoordinasikan, membina, mengendalikan kegiatan operasional dan penanganan pemadam kebakaran;

- g. Memantau, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- h. Melaporkan pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Kedaruratan dan logistik sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang;

#### **D. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi**

Bidang 3 atau Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

- 1) perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan pasca bencana;
- 2) pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan pasca bencana;
- 3) pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana dan pasca bencana;
- 4) pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan pasca bencana.

Secara umum bidang rehabilitasi dan rekonstruksi memiliki tugas pokok melaksanakan Koordinasi, Pembinaan, dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi kerusakan akibat bencana. Dalam melaksanakan fungsi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas :

- a. Merencanakan program Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan rencana program BPBD dan petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas di lingkungan BPBD;

- b. Merumuskan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan pasca bencana berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- c. Membagi tugas kepada Kepala Seksi dan Stafnya di lingkungan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan fungsinya masing-masing agar semua tugas dapat terlaksana dengan baik dan lancar;
- d. Memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan Staf di lingkungan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan pasca bencana berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- f. mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perbaikan sarana dan prasarana umum;
- g. Mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemulihan sosial ekonomis;
- h. Mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengembangan partisipasi lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- i. Memantau, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan pasca bencana;



- j. Melaporkan pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang;

## **B. Hasil Temuan Lapangan**

### **1. Kapasitas Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat**

Kapasitas umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, berpedoman metode OCPAT (*Organizational Capacity and Performance Assessment Tools*) berdasarkan 6 komponen yaitu orientasi organisasi, tata kepengurusan, manajemen organisasi, manajemen program, keberlanjutan, dan kinerja organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara dan telaahan dokumen, deskripsi kapasitas berdasarkan enam (6) komponen penilaian dan dua puluh dua (22) sub komponen penilaian dijabarkan sebagai berikut :

#### **a. Komponen Orientasi Organisasi**

Komponen Penilaian Orientasi Organisasi, dibetuk dari 4 sub komponen yaitu :

##### **1) Filosofi Organisasi**

Secara umum dalam penanggulangan bencana, terdapat 4 filosofi yang sampai saat ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu

Filosofi Pertama, menjauhkan masyarakat dari ancaman bencana, Filosofi kedua adalah menjauhkan bencana dari masyarakat melalui upaya pengurangan risiko bencana, yaitu dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Filosofi ketiga, adalah harmoni bersama bahaya atau ancaman (*living harmony with risk*). Dalam kondisi ini, masyarakat harus mengenal karakter dan sifat-sifat alam. Mengenali sifat-sifat alam ini dimulai dengan memahami proses dinamikanya, waktu kejadiannya dan dampak yang ditimbulkan. Manusia diberikan dan pikiran untuk bisa mengatasi dan mengadaptasi kondisi alam di sekitarnya.

Filosofi keempat, lebih mendorong kearifan lokal dan berbagai upaya kombinasi dua filosofi sebelumnya, yaitu bagaimana masyarakat bisa hidup selaras dan bersahabat dengan ancaman bencana. Dengan demikian, apabila bencana itu terjadi, masyarakat sudah tahu dan paham benar apa yang mesti dilakukan untuk menghindari risiko bencana tersebut. Filosofi penanggulangan bencana tersebut bersumber dari Bpk Samsul Ma'arif Kepala BNPB periode 2010-2015 *dalam* rencana strategis BNPB.

Pada BPBD KOTAWARINGIN BARAT, visi dan misi tujuan organisasi, seperti yang dijabarkan pada kondisi umum BPBD Kotawaringin Barat, yaitu :

*“terwujudnya masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat yang waspada dan tangguh terhadap bencana”*

Dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat :

1. Melindungi masyarakat dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko bencana
2. Mewujudkan penanggulangan bencana yang handal dan terampil
3. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinir, menyeluruh dan berbasis masyarakat.

BPBD dibentuk dengan tujuan untuk mendukung tugas Bupati di bidang penanggulangan bencana daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

Para perumus visi dan misi ini adalah para penentu kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, dan tim perumus organisasi dan tata laksana pemerintahan pada tahun 2012 sehingga melahirkan Perda No. 3 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Selama BPBD dibentuk hingga saat ini belum pernah dilakukan perubahan visi dan misi.

## 2) Isu-Isu strategis

Pada perencanaan strategis instansi yang menjadi isu strategis bagi BPBD KOTAWARINGIN BARAT adalah :

- a. Penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan;

- b. Peningkatan kapasitas aparaturnya dan masyarakat dalam kesiapsiagaan untuk mengurangi risiko bencana;
- c. Peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana agar dapat bertindak secara cepat dan tepat dalam penanggulangan bencana;
- d. Kesiapan logistik untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat terdampak bencana;
- e. Peningkatan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam penanganan tanggap darurat bencana serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
- f. Peningkatan kelembagaan BPBD melalui pembentukan Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam program lima tahunan, yang dituangkan dalam Rencana Strategis Instansi, Sasaran strategis yang menjadi target Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah :

- 1) Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat dan Aparatur,
- 2) Meningkatnya Penanganan Tanggap Darurat Bencana,
- 3) Meningkatnya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

Dengan indikator dari masing-masing sasaran tersebut adalah :

- 1) Prosentase Desa/Kelurahan Siaga Bencana
- 2) Prosentase Penanganan Kejadian Bencana,
- 3) Prosentase Lokasi Kejadian Bencana yang telah Direhabilitasi dan Direkonstruksi dengan harapan prosentase jumlah pada tahun berikutnya harus lebih tinggi dari tahun berjalan.

### 3) Nilai –Nilai dan Penerapannya

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No.24 tahun 2007, Penanggulangan bencana berasaskan, kemanusiaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keseimbangan, keselarasan dan keserasian, ketertiban dan kepastian hukum, kebersamaan, kelestarian lingkungan hidup dan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan prinsip-prinsip :

Cepat dan tepat, prioritas, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan, pemberdayaan, nondiskriminatif dan nonproletisi.

Penanggulangan bencana bertujuan :

1. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
2. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
3. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
4. menghargai budaya lokal;
5. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
6. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
7. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

### 4) Peran atau Posisi Strategis Organisasi terhadap Isu-isu strategis

Terdapat 2 (dua) point kunci yang menjadi isu utama yang terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Kotawaringin Barat dalam lima tahun ke depan yaitu:

- 1) Peningkatan kesiapsiagaan menghadapi bencana;
- 2) Peningkatan penanganan tanggap darurat bencana;

Dengan upaya dan target program kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan pemetaan wilayah yang rawan bencana, membuat prediksi dan pencegahan dini;
- b. Pengadaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kondisi daerah, prioritas pencegahan karhutla;
- c. Penambahan personil yang terlatih dan tanggap darurat dalam antisipasi dan mengatasi bencana;
- d. Pengalokasian dana tanggap darurat, melakukan tindakan preventif terhadap potensi bencana, melakukan tindakan represif serta protektif yang bersifat konservatif pasca kejadian luar biasa (KLB);

Sehingga BPBD KOTAWARINGIN BARAT selama periode 2017 – 2022 memiliki enam point fokus kerja yang diselaraskan dan dihamonisasi dengan fokus kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana yaitu :

- a. Pengurangan risiko bencana yang terintegrasi;
- b. Kecepatan penanganan tanggap darurat bencana;
- c. Penyediaan logistik dan sarana prasarana yang optimal;

- d. Rehabilitasi dan rekonstruksi secara terkoordinasi, terencana dan terkendali;
- e. *Good governance*; dan
- f. Sistem informasi kebencanaan yang aktual dan terintegrasi.

Dijelaskan kendala dari BPBD adalah lembaga ini lembaga yang statusnya masih mengambang seperti dijelaskan oleh sekretaris BPBD dalam wawancara sebagai berikut :

“di satu sisi secara regulasi dan kelembagaan masih diperdebatkan sampai di tingkat pusat, jadi apakah dia ini masuk dibawah kementerian dalam negeri, apakah dia masuk dibawah BNPB” (08 Agustus 2017)

Dalam struktur tata pemerintahan, BPBD berada di bawah Kementerian dalam negeri, namun berdasarkan tugas pokok dan fungsi BPBD adalah bagian dari delegasi BNPB di daerah, dimana diperlihatkan bahwa aturan-aturan pelaksanaan kegiatan, visi misi, asas-asas organisasi, struktur, tugas dan fungsi, bagian-bagian organisasi banyak mengadopsi dari aturan yang dikeluarkan BNPB.

#### **b. Komponen Tata Kepengurusan**

Tata kepengurusan organisasi merujuk pada pembagian kekuasaan/wewenang, dan tugas-tugas pelaksanaan kerja, mekanisme pengambilan keputusan dan transparansi lembaga serta akuntabilitas.

Berdasarkan dari 3 sub komponen penilaian tata pengurusan dan hasil wawancara pada 3 responden ditemukan bahwa :

- 1) Pembagian kekuasaan/kewenangan, fungsi dan tugas pokok

Kekuasaan/ kewenangan dibagi habis perbidang pekerjaan yang termuat pada struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang dirumuskan dan dijalankan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Dijabarkan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam wawancaranya sebagai berikut :

“penempatan pembagian wewenang diatur sebagaimana berdasarkan surat Keputusan Bupati dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sampai dengan setingkat kasi, pejabat paling tinggi wewenang dibagi habis sesuai dengan tupoksi sesuai aturan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat No. 3 Tahun 2012” (9 September 2017)

Pembagian kekuasaan dan wewenang merujuk pada tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana, dan mengacu pada tata urutan pengelolaan bencana mulai dari tahap pencegahan dan kesiapsiagaan pada bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, tahap penanganan darurat pada bidang kedaruratan dan logistik, tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana pada bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kendala yang dihadapi dalam pembagian wewenang untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi adalah keterbatasan kompetensi personil berdasarkan pada pernyataan Kepala Pelaksana BPBD Kotawaringin Barat tentang kondisi sumberdaya manusia di instansinya, terutama dalam kemampuan manajerial, sehingga ada sebuah kegiatan yang seharusnya menjadi tugas salah satu bidang, dilimpahkan atau dikerjakan oleh bidang lainnya karena sumberdaya manusia pada bidang tersebut tidak dapat mengerjakan bagian yang seharusnya menjadi



porsi tugasnya. Hal tersebut juga didapatkan saat peneliti menelaah penanggungjawab pelaksana teknis kegiatan di instansi.

## 2) Mekanisme pengambilan keputusan

Keputusan pada BPBD berada di tangan Kepala Pelaksana BPBD, seperti disampaikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam wawancaranya sebagai berikut :

“dalam susunan birokrasi otomatis pengambilan keputusan dilaksanakan oleh kepala dinas, di bagian pelaksana BPBD dilaksanakan oleh kepala pelaksana...kewenangan untuk pelaksanaan tugas dan kegiatan harian tentunya kepala pelaksanalah menjadi kewenangan untuk keputusan internal dan fungsi kordinasi” (4 Agustus 2017)

Namun, berbeda dengan saat terjadi penanganan darurat dan kondisi tanggap bencana, maka sesuai dengan yang disampaikan Kepala Pelaksana BPBD bahwa

“ saat tanggap darurat bencana sesuai dengan arahan Bupati maka terdapat Insiden komando, komandan lapangan inilah yang akan menentukan putusan-putusan di lapangan “ (09 September 2017)

Dalam pengambilan keputusan tentunya sangat dimungkinkan terjadinya dominasi, saat ditanyakan tentang dominasi pengambilan keputusan dan mekanismenya Kepala Seksi Rehabilitasi dalam wawancaranya sebagai berikut :

saya tidak melihat adanya dominasi karena seringkali kita melakukan rapat-rapat atau meeting untuk mengambil keputusan dalam melaksanakan sesuatu, pengambilan keputusan final diserahkan pada masing-masing bidang setelah mendengar dan menerima masukan dari bidang lain secara garis komando memang ada para pihak yang ditugaskan sebagai pengambil keputusan di lapangan tapi untuk kebijakan tetap dikembalikan kepada kepala dinas, kepada kepala pelaksana” (04 September 2017)

### 3) Mekanisme transparansi dan akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas menjadi syarat dalam kepengurusan lembaga publik, dalam pengelolaan kepengurusan pendanaan hal ini bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian. Pada BPBD Kotawaringin Barat sistem pelaporan dan publikasi laporan bersifat terbatas termasuk bagian pengelolaan SKPD.

Mekanisme perencanaan di BPBD seperti dikemukakan Kepala Subbagian Perencanaan, bahwa :

- a. Tugas pokok perencanaan yaitu meliputi beberapa hal yang mendasar yaitu dalam kurun waktu 5 tahun tentunya ada Renstra dibuat sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten itu untuk perencanaan lima tahun kemudian dalam satu tahun yang biasa dikenal dengan Renja yaitu rencana kerja biasanya renja disusun pada akhir tahun yaitu sekitar bulan September tahun ini dan itu direncanakan untuk tahun berikutnya.
- b. Pada akhir tahun menjadi rencana kerja anggaran setelah anggaran disetujui, dan akan disetujui oleh DPRD, dan juga oleh BPKAD dulunya DPKD, maka disusunlah DPA, setelah RKA disetujui,
- c. DPA disahkan oleh DPRD setelah kita menerima DPA baru kita melaksanakan kegiatan2 tahunan dan membuat rencana kegiatan fisik yang memerlukan pelelangan dengan menggunakan sistem informasi pengadaan barang umum.
- d. Kemudian dalam pelaksanaan DPA pada tahun tersebut, setiap bulan dilaksanakan monitoring dan evaluasi dengan pelaporan fisik dan keuangan
- e. Biasanya laporan RFK dilaporkan kepada bappeda melalui online baik itu kegiatan yang di danai APBD maupun bantuan dari pusat
- f. Setelah kegiatan berakhir maka tugas dari subbag perencanaan yaitu menyiapkan bahan dalam penyusunan laporan kinerja (LAKIP) yang dibuat pada akhir tahun anggaran” (04 Agustus 2017)

Berdasarkan penjabaran tersebut dapat diinterpretasikan bahwa sistem perencanaan program dan kerja BPBD mengacu pada aturan baku sistem pemerintahan dimana pengelolaan kepengurusan instansi harus transparan dan terukur.

Progran dan kegiatan yang dilaksanakan BPBD setiap tahunnya disosialisasikan pada masyarakat, dalam kegiatan sosialisasi penanggulangan bencana, dengan menghadirkan para stakeholder, baik itu masyarakat dalam perwakilan relawannya, pelajar, LSM dan pihak swasta.

### c. Komponen Manajemen Organisasi

Manajemen organisasi adalah proses manajemen pada pengelolaan sumber daya termasuk sumber daya manusia, informasi, keuangan, peralatan dan logistik, pengelolaan kantor hingga mekanisme pengelolaan konflik (khususnya konflik internal). Pada penilaian manajemen organisasi, penilaian ditekankan pada lima (5) subkomponen berikut :

#### 1) Manajemen Sumberdaya Manusia

Hal-hal berikut adalah yang disampaikan sekretaris BPBD Kotawaringin Barat dan Kasubbag Umum Kepegawaian dan Perlengkapan (UKP) terkait dengan pertanyaan tentang prosedur dan sistem manajemen kepegawaian, proses penempatan staf, komposisi staf, skema pengembangan SDM, evaluasi kinerja staff. Menurut Kasubbag UKP dalam wawancara sebagai berikut :

Belum ada sistem dan prosedur manajemen SDM lembaga yang baku dan terimplementasi, untuk saat ini staff belum sesuai dengan kompetensinya, dan belum sesuai kebutuhan di tiap bagian.

Untuk mekanisme pengembangan SDM yang baku belum dimiliki. Untuk evaluasi kinerja staff dilakukan pada setiap akhir tahun dan prosesnya dilakukan.

Kepala bidang untuk mengevaluasi semua staff. yang melakukan adalah pimpinan kita disini sebagai kepala pelaksana

Evaluasi kinerja dilakukan pada akhir tahun, berdasarkan SKP perorangan yang target kinerja dibuat pada tahun sebelumnya” (15 Agustus 2017)

Sedangkan menurut Sekretaris BPBD Kotawaringin Barat :

“Kalau kita menyimak manajemen sumberdaya manusia langkah awal adalah rekrutmen, rekrutmen adalah penerimaan, ya kalo kita yang 14 orang kemaren di 2014 itu langsung ditunjuk.

selanjutnya penambahan personil staf mungkin pada pengisian lowongan-lowongan seperti itu. Pada 2015 sudah lengkap secara struktural dan untuk 2016 memang kita ada pengurangan, ada yang pensiun, dan ada yang meninggal dunia, daripada pengurangan SDM.

Untuk sistem kepegawaian memang kita masih kekurangan dari pada SDM secara teknis untuk melaksanakan manajemen kepegawaian kita tapi untuk internal ke dalam kita masih dibantu oleh personil teknis di bidang secara bersama-sama untuk melaksanakan manajemen kepegawaian kita. Memang disana-sini ada satu pola kegiatan yang masih belum bisa diterapkan kemaren kita untuk meminta supaya sebagai evaluasi kinerja kita semua staf itu kita membuka untuk membuat buku catatan kerja, membuat buku catatan kerja ini yang sampai hari ini belum bisa diterapkan. Tapi secara umum Alhamdulillah melaksanakan tupoksi kita selaku pelaksana daripada BPBD sudah terlaksana dengan baik” (08 Agustus 2017)

Sejak pemadam kebakaran berpisah dari BPBD di awal tahun 2017 terjadi Pengurangan personil BPBD dari berjumlah 58 orang menjadi 31 orang, rincian pegawai BPBD disajikan pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.2

**Tabel 4.1 Data Pegawai BPBD Berdasarkan Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin Tahun 2017**

NO	Unit Kerja	Jumlah Pegawai	Status		Jenis Kelamin	
			PNS	PHL	Laki-laki	Perempuan
1	Kepala Pelaksana BPBD	1	1		1	
2	Sekretariat	11	9	2	7	4
3	Bidang Pencegahan dan Kesiasiagaan	4	4		2	2
4	Bidang kedaruratan dan Logistik	7	7		6	1
5	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	8	7	1	6	2
6	Jabatan Fungsional					

	<b>Jumlah</b>	<b>31</b>	<b>28</b>	<b>3</b>	<b>22</b>	<b>9</b>
--	---------------	-----------	-----------	----------	-----------	----------

Sumber Lakip BPBD Kotawaringin Barat Tahun 2016

Tingkat pendidikan umum, menjadi latar belakang yang mempengaruhi kemampuan menyelesaikan masalah atau problematika dalam bekerja, rata-rata staf di BPBD memiliki tingkat pendidikan yang cukup. Proporsi pegawai/staff pada BPBD berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada Tabel 4.2

**Tabel 4.2 Data Pegawai Negeri Sipil (diluar PHL) Berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Tahun 2017**

No.	Unit Kerja	Jumlah	Tingkat Pendidikan							
			PNS	S 2	S 1	D 4	D 3	SLTA	SLTP	SD
1	Kepala Pelaksana BPBD	1	1							
2	Sekretariat	9		2		1	6			
3	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	4		4						
4	Bidang kedaruratan dan Logistik	7		3			4			
5	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	7	1	1		1	4			
6	Jabatan Fungsional	0								
	<b>Jumlah</b>		<b>2</b>	<b>10</b>		<b>2</b>	<b>14</b>			

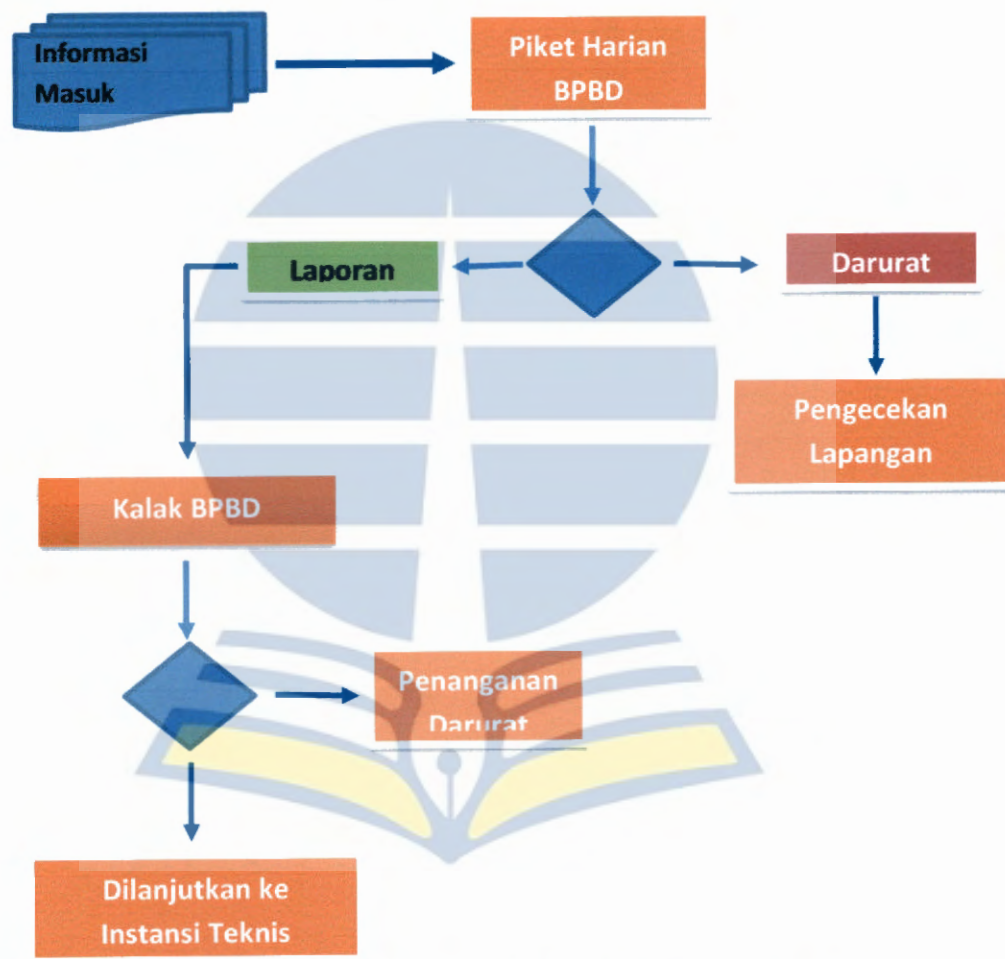
Sumber Lakip BPBD Kotawaringin Barat Tahun 2016

## 2) Manajemen Informasi

Manajemen informasi, merupakan tata kelola informasi pada instansi yang mencakup bagaimana informasi diterima dipilih diproses dan disebar, atau dalam bentuk lain informasi juga merupakan keterkaitan komunikasi antar para pihak yang terjalin dalam rangka mencapai tujuan organisasi. BPBD belum memiliki manajemen pengelolaan baku terkait informasi, baik informasi tersebut berupa informasi kebencanaan maupun informasi umum administrasi pelayanan publik, namun dalam praktek kesehariannya penerimaan, pengelolaan dan

penyebaran informasi adalah tugas wajib yang dilaksanakan BPBD Kotawaringin Barat.

Skema manajemen Informasi pada BPBD Kotawaringin Barat yang bisa dilaksanakan adalah sebagai berikut :



**Gambar 4.2. Skema Informasi dan Pelaporan BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat**

Dari gambar 4.2 dapat dilihat bahwa penentu keputusan pelaksanaan kerja penanganan bencana berada di tangan kepala pelaksana, namun wewenang pengecekan lapangan berada pada ketua tim piket harian sebagai penerima informasi awal, ketua tim piket harian selanjutnya akan menyampaikan hasil pengecekan lapangan kepada kepala pelaksana BPBD Kotawaringin Barat.

Tentang sistem informasi dijelaskan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kotawaringin Barat dalam jabaran berikut:

Manajemen informasi ini adalah sebuah bagian yang sangat penting karena BPBD tidak mungkin memantau keseluruhan kondisi yang ada di lapangan dengan luasan Kabupaten yang cukup luas, ada beberapa kecamatan, 6 kecamatan 93 desa, jadi mau tidak mau kita mengandalkan bagaimana proses informasi yang disampaikan dari tingkat lapangan, dan ketika informasi itu sampai, kita sesegeranya mengecek informasi itu melalui tim TRC atau mengecek itu melalui relawan ataupun tingkat kecamatan atau pun desa. Ketika kita memastikan bahwa kondisinya betul2 kita harus melakukan tindakan segera kita akan melakukan tindakan koordinasi di tingkat kabupaten untuk menentukan langkah-langkah dalam rangka penanganan, jadi informasi ini adalah bagian yang sangat vital dalam mempersiapkan proses penanganan di lapangan dan juga termasuk upaya kita untuk melakukan tindakan penanganan” (09 September 2017)

Sedangkan Sekretaris BPBD menjabarkan tentang Manajemen Informasi seperti berikut

“memasuki tahun 2015 BPBD termasuk salah satu kelembagaan yang diberi apresiasi, diberikan penghargaan oleh Kepala Daerah dimana pola sistem informasi, kebencanaan itu sudah kita bangun sedini mungkin, kami memang sudah komitmen kemaren apabila terjadi bencana dimanapun akan terjadi bencana KDH Bupati. Itu sebelum beliau menerima informasi dari media atau dari masyarakat, kita sudah menyampaikan itu ke beliau. Jadi itu sudah kita bangun, dan dulu kita itu, bahasanya itu “termasuk SKPD yang aneh – jadi maksud yang aneh itu kecepatan informasi kita kepada Kepala Daerah itu sangat baik, jadi tahun 2015 itu kita sudah diapresiasi oleh Bupati bahwa BPBD itu salah satu lembaga yang memang cukup cepat memberikan informasi. Untuk informasi eksternal kita sudah kita laksanakan sejak tahun 2015 kita sudah cukup baik tapi memang perlu ditingkatkan. Dan itu dilegalisasi

dengan MOU atau dengan kesepakatan bersama semua komponen yang ada di masyarakat' (08 Agustus 2017)

pernyataan ini menunjukkan belum terdapat aturan baku dan perjanjian tertulis terkait bagaimana prosedur tetap pengelolaan informasi baik internal maupun eksternal secara bersama-sama. Informasi yang masuk langsung ditanggapi cepat oleh tim TRC dan langsung dilakukan pengecekan lapangan. Sesuai dengan skema alur informasi yang telah dijelaskan prosedurnya

### 3) Manajemen Keuangan

Hal-hal berikut dikemukakan oleh Subbagian keuangan dalam wawancaranya pada tanggal 15 Agustus 2017 atas pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara tentang aturan baku manajemen keuangan, perencanaan anggaran, mekanisme control, informasi akses informasi keuangan, dan pertanggungjawaban, termasuk pembuatan laporan keuangan dan penyusunannya :

“Aturan baku menyangkut manajemen keuangan yaitu peraturan Bupati Kotawaringin Barat no.33 tahun 2013 tentang mekanisme pembayaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Peraturan tersebut kami aplikasikan secara konsisten, dalam perencanaan anggaran organisasi dilakukan dengan melibatkan Pengguna Anggaran, semua Kepala Bidang selaku Kuasa Pengguna Anggaran, bagian Perencanaan Keuangan dan Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan. Mekanisme kontrol keuangan yaitu setiap semester dan akhir tahun anggaran, masing-masing pelaksana kegiatan menyusun hasil evaluasi pelaksanaan dan disusun dan laporan semester dan laporan akhir tahun disampaikan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, laporan disusun oleh pembuat laporan keuangan dan penatausahaan keuangan, dalam hal ini dijadwal oleh Kasubbag Keuangan. Informasi keuangan dapat diakses oleh pihak-pihak yang memiliki wewenang yaitu pihak badan pengelola keuangan dan aset daerah serta bagian keuangan SKPD yang bersangkutan. Mekanisme pertanggungjawaban keuangan dilakukan dengan cara sebagai berikut (a) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyetarakan akuntansi dan



transaksi keuangan, aset, utang, dan pembiayaan yang berada dalam tanggungjawab (b) Laporan disampaikan ke Bupati lewat DPKAD (c) Laporan-laporan isinya pertanggungjawaban ada laporan realisasi anggaran, neraca laporan arus kas, dan CALK pakai standar akuntansi pemerintah (d) Laporan keuangan disusun oleh pembuat laporan keuangan SKPD dengan ditambah LRA, Neraca, Laporan Arus Kas, dan CALK. (e)Aturan yang dipakai biasanya PP No.71 tahun 2010 di Pemda Kotawaringin Barat menggunakan SIMBADA. Penyusunan laporan keuangan tidak dikerjakan sendiri tapi sama-sama dengan bagian umum, pengurus barang, Kuasa Pengguna Anggaran dan PPTKnya diperiksa dan ditandatangani oleh Kalak sebelum disampaikan” (15 Agustus 2017)

Keseluruhan manajemen pengelolaan dana pada BPBD KOTAWARINGIN BARAT mengacu pada aturan yang diterapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang sebelum adalah Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Aturan yang diterapkan mengacu pada PP no.58 Tahun 2005.

#### 4) Manajemen Peralatan dan Logistik

BPBD memiliki beberapa peralatan operasional, pada saat satuan Damkar masih dalam satu instansi di BPBD sebelum tahun 2017, peralatan Damkar cukup banyak dan menjadi bagian tak terpisahkan dari sarana prasarana penanggulangan bencana, namun sejak awal tahun 2017, peralatan dan perlengkapan yang dimiliki BPBD Kotawaringin Barat yang secara operasional menjadi alat penanggulangan bencana diluar alat inventaris kantor disajikan pada Tabel 4.3

**Tabel 4.3 Data Peralatan Operasional BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017**

No.	Jenis Aset	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak
1	Kendaraan Operasional Jabatan Roda 4	1	1	
2	Kendaraan Operasional Jabatan Roda 2	6	6	

3	Megaphone	2	2	
4	Camera Film	2	2	
5	Handy Cam	1	1	
6	Kendaraan Opeasional Lapangan Roda 6 (Truck Serbaguna)	1	1	
7	Kendaraan Operasional Lapangan Roda 4 (Mobil Rescue)	1	1	
8	Kendaraan Operasioal Lapangan Roda 2 ( Motor Trail)	4	4	
9	Speed Boat	1	1	
10	Alat Pemadam Portable	3	3	
11	Alat Pembantu Pemadam Kebakaran	2	2	
12	Handy Talky	25	22	3
13	Alat Pemancar VHF/FM Lain-lain	1	1	
14	Tenda Posko	1	1	
15	Tenda Pengungsi	2	2	
16	Tenda Keluarga	7	6	1
17	Solar Handle Lamp	7	7	
18	Velbed	35	30	5
19	Genset 1,2 KVA	2	2	
20	Genset 5,5 KVA	1	1	
21	Senter Rescue HID	5	5	
22	Chainsaw	3	3	
23	Rig	5	5	
24	SSB	3	3	
25	WTP	1	1	
26	Perahu Poly Ethyllene (PE)	2	2	
27	Mesin Perahu Kap 9,8 PK	2	2	
28	Perahu Karet	1	1	

29	Mesin Perahu Kap 18 PK	1	1	
----	------------------------	---	---	--

Sumber : LAKIP Kotawaringin Barat Tahun 2016

Terdapat dua (2) perbedaan dalam pengelolaan peralatan dan logistik pada BPBD Kotawaringin Barat, yaitu :

- a) Pengelolaan peralatan dan logistik harian, artinya merupakan pengelolaan barang dan peralatan kantor secara umum dalam penyelenggaraan aktifitas harian instansi yang dibawah sekretariat dan subbagian umum perlengkapan dan kepegawaian mulai dari perencanaan, pengelolaan hingga pengawasan dan pelaporan. Pengelolaan peralatan dan perlengkapan kantor sebagai aset daerah menggunakan SIMBADA – Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah, yang terhubung dengan Aset dan Neraca Instansi.
- b) Pengelolaan peralatan dan logistik kebencanaan, pengelolaan ini merupakan pengelolaan peralatan dan logistik yang berhubungan dengan penanggulangan kebencanaan terkait penanganan darurat pada saat kondisi tanggap bencana, pengelolaan manajemennya dibawah oleh bidang kedaruratan dan logistik seksi peralatan dan logistik, peralatan pada bidang ini selain diadakan oleh pemerintah daerah melalui anggaran instansi, terdapat pula yang bersifat hibah, pinjam dan hak guna pakai yang diserahkan dari BPBD Provinsi dan BNPB

Secara internal pengelolaan peralatan dan logistik pada instansi belum tersusun secara baik dan belum memiliki dokumen baku Prosedur Standar

Operasional pengelolaan baik itu dalam penataan, peminjaman, pendistribusian, perawatan hingga pengawasan dan pelaporan. Namun, dalam praktek keseharian hal tersebut sudah dilakukan, dinyatakan oleh kepala seksi logistik dalam wawancara sebagai berikut :

“kami melakukan pengelolaan logistik mengacu pada PP no. 21 dan 22 tahun 2008 tentang penyelenggaraan bencana dan tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana dengan melaksanakan penyusunan perencanaan, pendistribusian pemantauan evaluasi dan laporan” (3 Agustus 2017)

Sedangkan menurut Kepala bidang kedaruratan dan logistik dalam wawancara sebagai berikut :

‘Kalau manajemen logistik kita jalankan sesuai dengan bencana, bencana apa yang kita lihat dilapangan apakah itu bencana kebakaran atau bencana banjir nah itu nanti kita tetapkan kita buat laporannya baru nanti kita jalankan apa yang perlu dilapangan contohnya apakah itu berupa makanan atau pakaian itu yang bisa kita lihat dulu terus kita petakan dulu diperlukan apa di tempat kejadian itu’ (03 Agustus 2017)

Namun dalam prakteknya, surat-surat peminjaman, surat pertanggungjawaban pemakaian, stock alat keluar dan masuk, stock opname logistik korban bencana dilakukan administrasinya secara rutin.

Penegasan bahwa logistik didistribusikan berdasarkan jenis dan kebutuhan korban bencana serta dikelola oleh salah satu seksi dalam struktur BPBD dijelaskan oleh Kepala pelaksana BPBD Kotawaringin Barat sebagai berikut:

“Salah satu bidang di BPBD yaitu bidang peralatan dan logistik, bidang kedaruratan dan logistik, jadi salah kasinya ada dua, satu kasi peralatan dan logistik dan yang satunya kasi kedaruratan jadi pelaksanaan tugas sebagaimana tugas pokok dan fungsi dilaksanakan oleh bidang, dalam pelaksanaan di lapangan itu dilaksanakan oleh SKPD secara keseluruhan. Baik itu di skala manajemen atasnya di tingkat pemerintah

daerah sampai kepada di tingkat SKPD, ataupun di tingkat unit kerja yaitu BPBD. Untuk manajemen peralatan dan logistik kita didukung, ketika di dalam institusi mengalami keterbatasan kita didukung sarana dan prasarana ataupun logistik baik itu di tingkat masyarakat di tingkat korporate, maupun di tingkat instansi vertikal dan daerah, ketika kita masih mengalami keterbatasan dan disupport, kita juga disupport pihak Provinsi, oleh Gubernur dan juga oleh BPBD tingkat Propinsi dan juga SKPD terkait tingkat Provinsi, dan juga dinas sosial, kemudian di tingkat pusat kita didukung sepenuhnya oleh BNPB baik itu dukungan peralatan maupun logistik, yang di dukung secara langsung melalui bidang kedaruratan dan juga logistik” (09 September 2017)

Penjabaran yang dijelaskan Kepala Pelaksana BPBD tersebut menunjukkan bahwa penggunaan peralatan dan logistik eksternal atau di lapangan terkait dengan kondisi tanggap darurat bencana, tidak dilakukan sendiri, terdapat pengerahan sumber daya dan mobilisasi dari para pihak terkait.

Disampaikan pula oleh Kepala Seksi Rehabilitasi bahwa “

“secara umum, garis besar dari pengelolaan logistik di kantor kita ini rata-rata pengerahan sumberdaya peralatan dan manusia otomatis terjadi pada saat ada kejadian bencana” (04 Agustus 2017)

BPBD Kotawaringin Barat pada saat kejadian bencana dan kondisi darurat secara otomatis juga menerima barang batuan dari pihak ketiga selain juga menerima barang bantuan stok BPBD Provinsi dan BNPB sebagai instansi yang menyalurkan barang bantuan bagi korban bencana.

##### 5) Manajemen Kantor

Manajemen kantor merujuk pada pengelolaan kantor, pemanfaatan sumberdaya organisasi, manajemen kantor secara administrasi dikelola oleh

Sekretariat dan secara teknis dikelola oleh bidang-bidang berdasarkan pada tugas fungsi masing-masing.

Disampaikan oleh kasubbag umum kepegawaian dan perlengkapan bahwa

‘Iya, kita memiliki manajemen kantor yang konsisten dijalankan sesuai tugas pokok dan fungsi, untuk bagian penanggulangan bencana ini ada yang mengelola untuk keuangan ada bidang keuangan, Penanggulangan Bencana untuk kedaruratan ada di bidang dua, bidang dua itu ada kedaruratan dan logistik, adapun untuk kesiapsiagaan ada di bidang 1 dan untuk menilai tingkat kerusakan, ada di bidang 3’ (15 Agustus 2017)

Penyelenggaraan tugas dan fungsi hingga wewenang, masing-masing bidang dijalankan secara konsisten, hal tersebut terikat pada aturan baku uraian tugas masing-masing bidang dan masing-masing personil. Kendala yang muncul terjadi jika kelebihan beban kerja pada salah satu bidang, sedangkan bidang tersebut kekurangan personil.

#### 6) Mekanisme pengelolaan dan/atau penyelesaian konflik

Secara internal, BPBD Kotawaringin Barat sangat minim konflik, artinya para staff hingga pimpinan mampu bekerja secara selaras dan harmonis, terlihat dalam penanganan bencana di lapangan, sistem satu komando menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas lapangan.

Disampaikan oleh Kasubbag UKP bahwa :

“Untuk penyelesaian konflik secara internal kami menyelesaikan secara kekeluargaan, kita panggil staff yang bermasalah dan kita lakukan penyelesaian secara kekeluargaan” (15 Agustus 2017)

Berbeda dengan konflik internal, secara eksternal terkait dengan fungsi koordinasi, seringkali ego sektoral instansi mampu meimbulkan konflik kepentingan, terutama saat pembagian kerja di lapangan.

Secara baku, model penanganan konflik belum dibuat oleh BPBD baik itu standar prosedur penanganan maupun standar kebijakan penyelesaian konflik.

Disampaikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi bahwa penanganan konflik dilakukan berjenjang

‘penanganan konflik internal BPBD ini harus dimulai dengan kepala kantornya dalam hal ini kepala pelaksana nah kepala pelaksana inilah menjadi sebagai mediator maupun sebagai inisiator dalam bagaimana konflik internal bisa diatasi, kepala pelaksana bisa menjadi penengah, penyelesaian konflik dilakukan berjenjang bila konfliknya setingkat staf berarti penengah setingkat kasi, jika konflik terjadi di tingkat kasi ya mencoba kepala bidang kuncinya jadi jika kepala bidang bisa meredam konflik tidak perlu sampai ke kepala pelaksana, dan seterusnya ...’ (04 Agustus 2017)

#### **d. Komponen Manajemen Program**

BPBD adalah instansi pemerintahan yang masuk dalam urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, terkait dengan pelaksanaan anggaran program dan kegiatan, sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran yang dijabarkan hasilnya dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi, program yang dijalankan BPBD sejak Tahun 2015 -2017 adalah sebagai berikut :

##### **1. Program Tahun 2017**

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

- c. Program peningkatan disiplin aparatur
  - d. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
  - e. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
  - f. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
  - g. Program Tanggap Darurat Pasca Bencana
  - h. Program Tanggap Darurat
- 2. Program tahun 2016**
- a. Program pelayanan administrasi perkantoran
  - b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
  - c. Program peningkatan disiplin aparatur
  - d. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
  - e. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
  - f. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
  - g. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
  - h. Program tanggap darurat pasca bencana
  - i. Program tanggap darurat
- 3. Program tahun 2015**
- a. program pelayanan administrasi perkantoran
  - b. program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
  - c. program peningkatan disiplin aparatur



- d. program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- e. program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- f. program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
- g. program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
- h. program tanggap darurat pasca bencana
- i. program tanggap darurat

Penilaian komponen manajemen program, dibentuk dari tiga (3) sub komponen yaitu

#### 1) Pendekatan Pengelolaan Program

Program kerja BPBD tidak terlepas dari visi, misi, tugas pokok, fungsi dalam penanggulangan bencana, program dikelola bidang perencanaan program sub bagian perencanaan program instansi,

“Dalam kurun waktu 5 tahun tentunya ada Renstra dibuat sebagai penjabaran RPJMD kabupaten itu untuk perencanaan lima tahun kemudian dalam satu tahun yang biasa dikenal dengan Renja yaitu rencana kerja biasanya renja disusun pada akhir tahun yaitu sekitar bulan September tahun ini dan itu direncanakan untuk tahun berikutnya Pada akhir tahun menjadi rencana kerja anggaran setelah anggaran disetujui, dan akan disetujui oleh DPRD, dan juga oleh BPKAD dulunya DPKD, maka disusunlah DPA, setelah RKA disetujui. DPA disahkan oleh DPRD setelah kita menerima DPA baru kita melaksanakan kegiatan-kegiatan tahunan dan membuat rencana kegiatan fisik yang memerlukan pelelangan dengan menggunakan sistem informasi pengadaan barang umum. Kemudian dalam pelaksanaan DPA pada tahun tersebut, setiap bulan dilaksanakan monitoring dan evaluasi dengan pelaporan fisik dan keuangan Biasanya laporan RfK dilaporkan kepada bappeda melalui online baik itu kegiatan yang didanai APBD maupun bantuan dari pusat. Setelah kegiatan berakhir maka tugas dari subbag perencanaan yaitu penyiapan bahan dalam penyusunan laporan kinerja (LAKIP) yang dibuat pada akhir tahun anggaran” (04 Agustus 2017)

Dalam implementasi dan monitoring, semuanya didasarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) yang dibuat dan realisasi fisik dilaksanakan berdasarkan patokan program satuan kerja sekretariat dan bidang yang dibuat masing-masing dan dilaporkan.

Evaluasi program dilakukan pada semesteran dan akhir tahun anggaran sebelum menyusun prognosis anggaran, pembuatan Laporan Tahunan dan LAKIP.

Pada BPBD Kotawaringin Barat, kegiatan-kegiatan tersebut belum memiliki pedoman pelaksanaan standar setaraf SOP, namun dalam prakteknya sudah dilakukan, BPBD menerapkan proses manajemen berjenjang (secara struktural) dimulai dari level pimpinan paling bawah yaitu kepala seksi dilanjutkan dengan kepala bidang dan sampai pada kepala pelaksana yang menjadi kepanjangan tangan dari Kepala Badan.

Dalam pengelolaan program semua berawal dari Rencana strategis, kemudian pada Rencana Kerja tahunan dan dokumen pelaksanaan kegiatan yang berbasis pada anggaran. Monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan secara regular melalui laporan realisasi fisik dan keuangan untuk masing-masing kegiatan, dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan program dan kegiatan lanjutan pada tahun-tahun berikutnya.

## 2) Pelibatan Penerima Manfaat

Masyarakat adalah sasaran utama dalam setiap program dan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh BPBD Kotawaringin Barat, dalam pertanyaan yang diberikan apakah ada keterlibatan aktif masyarakat, keterlibatan pihak ketiga dalam penyusunan program dan pelaksanaan program, dijelaskan oleh Kasubbag Perencanaan Program berikut :

Dalam penyusunan program masyarakat terlibat, dalam hal ini keterlibatan masyarakat adalah dalam menyusun proposal atau usulan kegiatan yang disampaikan dalam forum musrenbang desa musrenbang Kecamatan dan berlanjut sampai ke musrenbang kabupaten. Menyangkut peran aktif masyarakat yaitu untuk kegiatan fisik atau infrastruktur masyarakat tidak terlibat secara aktif, keterlibatan masyarakat secara aktif terjadi pada kegiatan non fisik yaitu berupa peningkatan kapasitas yaitu berupa pelatihan, sosialisasi serta penanganan kejadian atau aksi penanggulangan kejadian bencana masyarakat ikut terlibat secara aktif. Sedangkan keterlibatan instansi swasta atau dunia usaha dalam program kegiatan organisasi adalah dalam peningkatan kapasitas, kerjasama dilakukan ketika ada kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan atau dunia usaha biasanya mereka meminta kepada BPBD untuk mengirimkan salah satu aparaturnya untuk menjadi narasumber, sedangkan untuk kejadian apabila terjadi sesuatu di lapangan pihak swasta juga terlibat aktif contohnya dalam *penanggulangan* kebakaran, kerjasama tersebut biasanya di dahului dengan sesuatu kerjasama operasional yang terjadi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dengan BPBD” (04 Agustus 2017)

Pernyataan dukungan atas apa yang disampaikan oleh Kasubbag Perencanaan Program dan dijelaskan pula oleh Kepala Seksi Rehabilitasi bahwa

“Kalo keterlibatan (masyarakat) dalam penyusunan program selama ini karena kita bentuknya adalah birokrasi yang sifatnya masih menerima dan melakukan perencanaan berdasarkan visi dan misi Bupati, kita hanya bisa mengusulkan dan menerima apa-apa yang diinginkan masyarakat melalui musrenbang, itu pun hanya sebagian dari aspirasi yang bisa diimplementasikan di lapangan. Termasuk usulan proyek kegiatan di desa-desa hanya bisa dilanjutkan usulannya ke Bupati, karena sebagai instansi pelaksana, kebijakan mengelola proyek yang diusulkan tidak berada di tangan BPBD” (04 Agustus 2017)

Program kerja BPBD banyak terkait dengan instansi atau dinas badan lain, dikarenakan bencana dan kebencanaan baik dalam urusan prabencana, penanganan darurat hingga pascabencana terkait dengan banyak bidang, dan menjadi tanggung jawab bersama.

Hal yang terpenting juga dalam mengelola administrasi adalah pengawasan. Berkaitan dengan evaluasi dan monitoring program disampaikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi bahwa

“bagaimana program perencanaan itu bisa dilaksanakan sehingga program itu bisa berjalan nah apabila program itu sudah berjalan tentunya masing-masing personil dalam bidang itu harus mampu memonitoring kembali mengevaluasi kembali program yang sudah menjadi tujuan atau langkah pelaksanaan mereka dalam setiap programnya, nah jadi semua itu ada A ke B B ke A gitu bahasanya jadi sinkronisasi program kalau program itu dari dasar ada lini A jadi dia harus mencapai ke B. B dan A itu dikombinasikan menjadi acuan bahwa program itu akan berkelanjutan jadi tanggung jawab satu bidang jadi semua itu merasa memiliki apa yang menjadi program dan apa yang menjadi tanggung jawab ini proses evaluasi, tersebut itu adalah menilai kembali tercapai tidaknya program yang menjadi kesepakatan di bidang nah. dalam hal level berikutnya program ini sinkronisasi dengan menuju visi misi dan tujuan SKPD” (04 Agustus 2017)

### 3) Pengembangan proses Pembelajaran/Ruang Pembelajaran

Ruang pembelajaran atau proses pembelajaran, pada sub komponen ini, tinjauan yang dimaksud adalah apakah organisasi mampu membentuk program-program baru dan kegiatan-kegiatan terobosan hasil dari pembelajaran selama berkegiatan dan berkarir di organisasi/lembaga.

Disampaikan oleh Kepala Pelaksana BPBD KOTAWARINGIN BARAT

bahwa :

“ Sesuai tupoksi semuanya berjalan dengan maksimal, karena ini kantor baru terus kita diberi ruang untuk melakukan berbagai hal, mempelajari hal-hal baru, jadi memberikan semangat juga bagi para pejabat yang ada, baik di tingkat atas, menengah maupun di tingkat bawah untuk berkreasi, membangun tupoksi yang ada, membangun hubungan kerja baik di skala internal maupun dengan pihak luar termasuk dengan masyarakat. Kemudian kinerja bidang-bidang terkait sampai saat ini sangat bagus walaupun terbatas seperti yang disampaikan di awal kapasitas kita untuk pelatihan kompetensi juga terbatas namun semangat dan kemampuan untuk belajar, peningkatan kemampuan itu dilakukan oleh masing-masing. Kita tetap melakukan peningkatan kapasitas secara internal, walaupun tidak ada pelatihan tidak ada diklat dan lain sebagainya. Peningkatan kapasitas internal adalah melalui proses pembelajaran yang dilakukan baik itu oleh personil yang menjabat di bidangnya maupun juga maupun melalui binaan atau dukungan dari pimpinan di tingkat atas seperti bagaimana penanganan di lapangan, ya kita melakukan kondisi di lapangan itu berdasarkan kemampuan masing-masing dan saling mendukung agar pelaksanaan di lapangan itu bisa terlaksana dengan baik” (09 September 2017)

**e. Komponen Berkelanjutan**

Berkelanjutan dalam lembaga atau organisasi merujuk pada 3 hal :

1. Lembaga atau organisasi yang senantiasa ada – tidak mati/ bangkrut, kolaps,
2. Program dan Kegiatan yang kontonyu dijalankan sesuai dengan target dan rencana, dijalankan secara berkesinambungan
3. Pengembangan Inovasi atas pengetahuan, teknologi dan keahlian sumberdaya manusia di dalamnya dilaksanakan terus.

Komponen Keberlanjutan, dibentuk dari tiga (3) sub komponen yaitu :

### 1) *Fundraising*/mobilisasi sumberdaya

Mobilisasi diartikan sebagai penggunaan serentak, bersama-sama sarana dan prasarana yang telah dipersiapkan. Mobilisasi sumber daya dalam penguatan kapasitas organisasi menunjukkan perluasan sumber-sumber daya, peningkatan keterampilan, pengetahuan dan kapasitas dalam pengelolaan sumberdaya yang dimiliki organisasi. Mobilisasi sumberdaya adalah upaya memastikan tercukupinya sumber daya organisasi dalam pengembangan, pelaksanaan dan keberlanjutan pencapaian visi dan Misi.

Mobilisasi menunjukkan tingkat kebebasan penggunaan, jika mobilisasi sumberdaya dalam organisasi, menunjukkan kebebasan para anggota organisasi untuk memanfaatkan penggunaan sumberdaya semaksimal mungkin dalam memenuhi kebutuhannya akan itu. Mobilisasi merupakan proses yang dimulai dengan mengidentifikasi sumberdaya utama organisasi.

Kasi Rehabilitasi menjelaskan bahwa :

“Sementara yang bisa dimobilisasi adalah peralatan dan logistik yang dimiliki BPBD, terkait dengan pengerahan logistik dan peralatan dari luar masih dikoordinasi oleh Kalak BPBD, karena bukan bagian dan wewenang dari kita agak sulit melakukan mobilisasi logistik dari pihak lain. Namun secara internal mekanismenya sudah dijelaskan tadi- jika terjadi kondisi kebakaran atau kondisi kebencanaan secara khusus maka kita akan langsung menurunkan peralatan dan logistik. Lalu belum ada mekanisme khusus untuk memobilisasinya terutama jika peralatan dan personilnya terkait dengan instansi lain yang ada hanya posko terpadu dengan para staf yang melaksanakan penjagaan secara bergantian” (04 Agustus 2017)

BPBD Kotawaringin Barat belum memiliki strategi khusus dalam melaksanakan mobilisasi, namun mobilisasi yang diterapkan, cukup berhasil di lapangan karena

pengerahan sumberdaya mampu mencukupi kebutuhan di lapangan. Dimana para personil penanganan bencana secara tanggap berkumpul dan aktif mengerahkan kemampuannya untuk menanggulangi kejadian bencana.

## 2) Regenerasi dan Kaderisasi

Regenerasi dan Kaderisasi merupakan inti keberlanjutan organisasi, Regenerasi adalah melakukan pembaruan generasi dari yang lama ke yang baru, sedangkan kaderisasi adalah mempersiapkan calon-calon pengganti. kaderisasi adalah keperluan mutlak untuk membangun struktur kerja yang mandiri dan berkelanjutan. Kaderisasi diperlukan untuk melakukan regenerasi. Kaderisasi merupakan sebuah proses yang memerlukan waktu.

Penjabaran tentang regenerasi dan kaderisasi yang berkaitan dengan strategi regenerasi personil, pendistribusian keahlian, penyeberluasan pengetahuan, faktor yang menjadi pendukung dan penghambat serta sejauhmana keberhasilan strategi dijabarkan di BPBD Kotawaringin Barat, disampaikan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kotawaringin Barat bahwa :

“Pada saat ini kita masih belum melakukan pendidikan khusus yang terkait dengan keahlian walaupun ada sempat beberapa yang kita kirim ke Jakarta dalam pelatihan ke BNPB untuk tenaga TRC setelah itu praktis kita sampai pada saat ini masih belum ada melakukan peningkatan kapasitas, kita tetap melakukan peningkatan kapasitas secara internal. Walaupun tidak ada pelatihan tidak ada diklat dan lain sebagainya. Peningkatan kapasitas internal adalah melalui proses pembelajaran yang dilakukan baik itu oleh personil yang menjabat di bidangnya maupun juga maupun melalui binaan atau dukungan dari pimpinan di tingkat atas seperti bagaimana penanganan di lapangan. Ya kita melakukan pembagian tugas sesuai kondisi di lapangan itu berdasarkan kemampuan masing dan saling mendukung agar pelaksanaan

di lapangan itu bisa terlaksana dengan baik. Namun demikian catatan juga bahwa untuk peningkatan kapasitas dan kompetensi ini tetap akan kita lakukan peningkatan ke depan sesuai dengan kemampuan anggaran, karena setiap ada upaya untuk peningkatan kapasitas itu dibarengi dengan dukungan anggaran, itu yang terkadang menjadi kendala dalam rangka peningkatan kapasitas. Untuk kaderisasi, di lapangan kita tidak sendiri, walaupun mungkin kantor secara institusi jumlah pegawai kita terbatas namun di lapangan kita bisa membangun dukungan lewat relawan yang kita bangun di setiap Desa maupun Kecamatan jadi jika ada kejadian kita didukung oleh relawan baik itu di tingkat Desa Kelurahan ataupun Kecamatan, jadi jumlah yang ada itu masih mampu untuk kita menangani kebencanaan di lapangan". (09 September 2017)

Dikarenakan instansi BPBD Kotawaringin Barat masih sangat muda, secara operasional kegiatan dimulai sejak tahun 2014, maka kaderisasi dan regenerasi pada lembaga ini terbilang minim. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, bahwa :

"saat ini kita kekurangan tenaga ahli yang ada di bidang seperti Manajemen Peralatan dan Logistik kita harusnya belajar bagaimana memanje itu , kemudian bagaimana membuat standar pemeliharaan ataupun penyimpanan di gudang, ya jd demikian juga untnk peralatan prosesnya mulai penyimpanan pemeliharaan sampai ke penggunaan dan kembali lagi itu juga peru dipelajari, kemudian juga untuk kegiatan lain seperti standar keahlian sampai pada saat ini kita masih belum melakukan pendidikan khusus yang terkait dg keahlian walaupun ada sempat beberapa yang kita kirim ke Jakarta dalam pelatihan ke BNPB utk tenaga TRC setelah itu praktis kita sampai pada saat ini masih belum ada melakukan peningkatan kapasitas." (09 Sepetember 2017)

### 3) Kepercayaan dan Legitimasi Publik

Tingkat Kepercayaan terhadap lembaga pemerintah dipengaruhi oleh anggapan masyarakat atas kinerja pemerintah, yang artinya apakah lembaga



dapat diandalkan, cepat tanggap dan adil, mampu melindungi masyarakat dari risiko-risiko yang membahayakan dan memberikan pelayanan pada publik secara efektif.

Beberapa pertanyaan dalam poin kepercayaan dan legitimasi publik menjabarkan tentang komunikasi dan interaksi dengan masyarakat luas, proses pelaksanaannya, tingkat keberhasilannya dan perubahan persepsi publik setelah terjadi interaksi dan komunikasi.

Dalam wawancara bersama Kasubbag UKP disampaikan :

“Alhamdulillah kepercayaan masyarakat pada BPBD sangat tinggi dengan adanya setiap ada masalah, ada kejadian orang hilang ataupun orang tenggelam masyarakat langsung menelpon BPBD untuk meminta pertolongan, dan pohon tumbang, masyarakat juga meminta kita untuk memotong pohon yang tumbang di jalan, Itulah tingkat kepercayaan masyarakat dan masyarakat mau BPBD bisa membantu dalam penanggulangan bencana” (15 Agustus 2017)

Pernyataan lainnya tentang interaksi dan komunikasi disampaikan oleh Kasi Rehabilitasi bahwa

“Selama ini belum ada mekanisme khusus untuk mengembangkan interaksi dan komunikasi dengan public. Umumnya kita belum memiliki orang-orang tertentu sebagai sumber informasi atas kejadian bencana. Jadi kita selama ini belum membuat jejaring komunikasi resmi semacam forum komunikasi yang jelas baku dan regular, sehingga cara komunikasinya bagian dari yang acak” (04 Agustus 2017)

Saat ditanyakan tentang keberhasilan komunikasi disampaikan pula bahwa :

“Karena termasuk institusi/instansi publik yang cukup cepat geraknya dan tanggap atas segala kejadian, selama ini mekanisme ini cukup berhasil karena biasanya jika ada kejadian bencana BPBD selalu lekas datang dan masyarakat selalu merasa kita ada. Tingkat keberhasilannya saya anggap cukup terutama jika dilihat dari kepercayaan masyarakat

pada kita, artinya apa apa saja pun masyarakat melaporkan ke BPBD, dan ada saja informasi yang diterima oleh BPBD tentang bencana. Lalu jika terjadi perubahan persepsi publik buat tahun belakangan ini bisa dilihat BPBD menjadi memiliki nama yang jauh lebih baik, karena selalu ada di depan saat kejadian bencana”. (04 Agustus 2017)

Ketiga pernyataan di atas saling mendukung bagaimana persepsi publik tentang BPBD yang sangat baik, hal tersebut dikuatkan pula oleh masyarakat sekitar wilayah terdampak bencana yang diwawancarai, bahkan instansi lain pun menyampaikan hal yang sama terkait hal tersebut,

Dijelaskan oleh pihak Manggala Agni DAOPS III Kalimantan Tengah di Pangkalan Bun bahwa “

“Fungsi BPBD terutama di Kabupaten Kotawaringin Barat berjalan dengan sangat baik, sebagai fungsi koordinator berjalan dengan baik, dimana kami tim teknis di lapangan tim pemadam lapangan benar-benar merasa terorganisir dengan segala sesuatu yang sudah disusun dan direncanakan teman-teman BPBD, termasuk kegiatan seperti apel gelar siaga bencana kemudian kita juga untuk persiapan apel, patroli-patroli lapangan, rapat-rapat koordinasi, sampai dengan di tingkat posko terpadu yang juga kita jalankan di kantor damkar, dan menurut saya citra kantor BPBD Kotawaringin Barat sangat baik dengan tanggapnya temen-temen dari BPBD terkait bencana-bencana” (21 Agustus 2017)

Hanya saja informasi dan komunikasi tersebut belum memiliki wadah khusus yang dinamakan forum, dimana forum tersebut dapat melakukan interaksi secara regular, pertemuan-pertemuan khusus, memberikan tanggapan dan pertanyaan atas kejadian-kejadian bencana.

#### **f. Komponen Kinerja Organisasi**

Kinerja organisasi dinilai berdasarkan implementasi perencanaan yang diterapkan pada masyarakat sebagai kelompok sasaran aktif dalam hal

penanggulangan bencana. Menurut Kepala Pelaksana BPBD Kotawaringin Barat

“Kalau saya melihatnya kinerja organisasi cukup baik, artinya setiap pihak setiap bidang bekerja sesuai dengan tupoksinya’.(09 September 2017)

Komponen kinerja organisasi, dinilai dari empat (4) sub komponen yaitu

1) Penguatan proses kualitas pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai upaya peningkatan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri harkat dan martabat secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.

Kepala seksi Rehabilitasi menyampaikan dalam wawancaranya bahwa :

“Secara khusus harmonisasi antara kita dan masyarakat itu cukup baik, tentang kerjasama otomatis ada kerjasama dan pelibatan masyarakat, khususnya para relawan yang nantinya akan menjadi ujung tombak poin informasi dan komunikasi kejadian bencana, dan BPBD sangat memerlukan para relawan tersebut sebagai orang-orang yang akan bergerak di lapangan yang akan memberikan informasi khusus kepada kita (dapat menjadi pemberi informasi khusus) terutama di bidang kebakaran lahan dan hutan”(04 Agustus 2017)

Saat pertanyaan tentang harmonisasi antar bidang, layanan terhadap masyarakat, komponen-komponen internal yang berpengaruh atas layanan tersebut serta harmonisasi kerja antara BPBD Kotawaringin Barat dan masyarakat, dinyatakan oleh Kepala Pelakasana BPBD Kotawaringin Barat bahwa :

“Setiap bidang sudah menjalankan tupoksinya dengan baik, masing-masing dapat berjalan sesuai fungsinya. Layanan terhadap masyarakat sangat baik, saya biasa gerak cepat untuk menyelesaikan laporan dan pengaduan dari masyarakat, karena kami memiliki grup WA maka informasi yang saya terima, saya sampaikan dan bisa langsung ditindaklanjuti, ada mereka yang turun ke lapangan, mengecek dan memberikan laporannya langsung ke saya. Penyebarluasan informasi internal yang memberi pengaruh dalam kinerja, karena tindakan yang salah di Lapangan akan membuat nama buruk di masyarakat, selama ini kami berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat korban bencana, bukan hanya korban yang banyak, baik satu rumah, dua rumah kami sebisa mungkin membantu. Untuk harmonisasi kerja dengan masyarakat, masyarakat ada juga yang membantu kita saat di lapangan, namun karena belum adanya kelompok relawan tetap dan koordinator tetap relawan maka bentuk bantuan hanya bersifat lokal di wilayah kejadian bencana” (09 September 2017)

Dari hasil wawancara tersebut, bisa disimpulkan pemberdayaan aktif masyarakat dalam penanggulangan bencana bentuknya belum baku, dan pelibatan lebih pada kegiatan lokal saja, masyarakat lebih pada penerima manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan BPBD Kotawaringin Barat.

## 2) Penguatan tingkat kepercayaan masyarakat

Tingkat kepercayaan masyarakat mendukung nilai kinerja, karena dengan kepercayaan dari masyarakat akan mempermudah penyebaran informasi dan pengefektifan komunikasi.

Menurut Kasubbag UKP dalam wawancara tentang komunikasi dan kerjasama dengan masyarakat, dijelaskan bahwa

“Kita melakukan komunikasi antara masyarakat dan organisasi, setiap kita akan melakukan penanganan bencana, kita melibatkan masyarakat dalam melakukan pencegahan, kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana di daerah kita” (15 Agustus 2017)

Namun penegasan tersebut belum menjadi bukti baku, di lapangan saat ditanyakan kepada warga masyarakat apakah terlibat dalam penanganan bencana di wilayah sekitar kediamannya, di Kelurahan Raja Seberang, disampaikan oleh bapak Adi dalam wawancaranya, warga yang tinggal cukup dekat dengan area bekas kebakaran lahan, bahwa

‘saya belum ikut mematikan api bu, tapi warga yang lain ada yang ikut, yang punya lahan atau kebun gitu yang ikut bu, belum bu, saya bukan relawan bu, saya belum ada bantu. saya cuma lihat saja kalau ada kejadian (30 Agustus 2017)

Di lain hal, masyarakat belum bisa memilih dengan jelas hal-hal yang semestinya dilaporkan pada BPBD, hal ini tentunya menunjukkan bahwa masyarakat percaya pada lembaga ini, sehingga hampir semua hal yang dianggap bencana atau kejadian khusus dilaporkan pada BPBD, seperti yang dijelaskan oleh Kalak BPBD Kotawaringin Barat berikut :

“Hubungan relasi dengan masyarakat cukup baik, kemudian juga kita punya relawan di tingkat lapangan yang mendukung penanganan, kemudian utk mengukur tingkat kepercayaan publik, sampai pada saat ini kita belum melakukan pengukuran yang sifatnya formal, tapi kalau melihat apa yang kita terima laporan dari masyarakat karena luasan cakupan kegiatan, pada akhirnya yang diluar tanggung jawab BPBD pun terkadang orang menginformasikan ke BPBD untuk mendukung kegiatan, jadi ada mungkin cerita-cerita yang kadang jauh dengan tugas pokok dan fungsi seperti ada anjing masuk sumur, BPBD yang ditelpon untuk membantu, kemudian orang tenggelam yang sebetulnya bukan domain khusus oleh karena itu lebih kepada SAR tapi yang lebih dominan malah dari BPBD. Ya jadi dari hal-hal seperti itu kepercayaan masyarakat pada BPBD cukup tinggi, pohon tumbang BPBD ditelpon walaupun ada dinas tata kota ataupun dinas pertamanan atau dinas DLH, ya artinya bahwa BPBD masih dipercaya oleh masyarakat untuk penanganan kebencanaan di lapangan. (09 September 2017)

Dijelaskan oleh Kasi rehabilitasi tentang komunikasi yang belum baku dan berstandar khusus antara masyarakat dengan BPBD Kotawaringin Barat, serta kerjasama yang terjadi dalam wawancaranya bahwa :

“Sementara ini belum ada komunikasi secara regular jadi komunikasi hanya bersifat opsional, kondisional pada saat terjadi bencana. Lalu ya, kita melakukan kerjasama namun kerjasama itu bentuknya belum baku, jejaring komunikasi yang dibuat pun personal saja , belum ada struktur khusus untuk jejaring komunikasi yang dilakukan artinya kita tidak melakukan forum komunikasi antara instansi dan masyarakat. Forum komunikasi dapat dilakukan berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten, yang paling urgent atau penting adalah forum komunikasi di daerah-daerah yang terpetakan sebagai daerah rawan bencana dan berisiko tinggi’ (04 Agustus 2017)

- 3) Perluasan intensifikasi hubungan kerja dengan stakeholder dalam rangka memperjuangkan isu dan peningkatan perluasan gagasan

Penanggulangan bencana tidak bisa dikerjakan sendiri terutama terkait dengan penanganan satu kabupaten, hubungan kerja dengan pihak-pihak terkait sangat penting, terutama dalam hal penyelarasan dan harmonisasi kegiatan jika dikaitkan dengan isu strategis untuk melindungi masyarakat luas. Selain itu juga penetapan status kedaruratan, perluasan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi, perencanaan mitigasi, pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menanggulangi bencana tidak diputuskan sendiri. Dijelaskan tentang keterkaitan para pihak oleh Kalak BPBD bahwa

“penanganan bencana tidak bisa sendiri. karena bencana itu sesuatu yang luas dan mencakup semua aspek, ketika terjadi kebencanaan itulah sebabnya kita pasti membentuk tim gabungan yang akan melakukan

penanganan di lapangan, dan sesuai dengan tupoksi masing-masing semuanya bergerak simultan, umpamanya dari BPBD kita akan melakukan pengecekan lapangan kemudian pada saat penanganan kita bersama-sama dengan instansi terkait termasuk juga dinas sosial, SAR kemudian ketahanan pangan, dan sektor lain kesehatan semuanya membentuk sebuah organisasi ataupun kebersamaan yang nanti untuk melaksanakan penanganan di lapangan, koordinasi yang terbentuk itu lewat Tim yang dibentuk dengan tupoksi masing-masing ya dan kita kalo sudah penanganan darurat ada *insiden commando* yang nanti akan memberikan perintah atau pun membagi tugas masing-masing untuk kegiatan di lapangan. untuk proses penanggulangan pasti kita tidak sendiri. Kita bersama dengan seluruh pihak. Termasuk koorporate, perusahaan dan masyarakat. Pengusaha dan masyarakat. (09 September 2017)

Dari hasil wawancara tersebut dapan dinyatakan bahwa BPBD Kotawaringin Barat memiliki hubungan partnership/kerjasama dengan pihak lain dalam semua aspek penanggulangan bencana, banyak pihak yang terkait bukan haanya lintas instansi dalam satu pemerintahan seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR dan lainnya sesuai dengan wewenang dan tupoksi instansi pemerintahan tersebut, bahkan kerjasama dengan isntansi vertikal seperti SAR dan BMKG, juga Instansi Militer dan Kepolisian.

Fungsi koordinasi dijalankan oleh BPBD Kotawaringin Barat sesuai dengan fungsinya sebagai koordinator penaggulangan bencana, forum komunikasi bencana Kabupaten Kotawaringin Barat belum dibetuk, sehingga pertemuan periodik belum dilakukan, namun pertemuan lintas sektor dan lintas organisasi tetap dilaksanakan secara insidental dalam penanganan darurat kebencanaan baik oleh bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, bidang

ke daruratan dan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi terkait dengan tugas masing-masing bidang dalam menangani bencana.

Namun saat ditanyakan tentang perjanjian baku antara para pihak pernyataan berbeda dari Kasi Rehabilitasi

“karena kita bagian dari sistem pemerintahan sementara ini tidak ada hubungan kerja atau partnership dengan pihak lain, atau pihak dunia usaha secara terbuka, sehingga otomatis segala sesuatunya dikembalikan kepada pihak Setda, atau Pemerintah Daerah. Jadi sebagai bagian dari instansi pelaksana kita hanya merencanakan dan melaksanakan program yang sudah ditetapkan/ditentukan sebelumnya” (04 Agustus 2017)

Hal yang disampaikan tersebut menunjukkan jika terjadi kesepakatan ataupun kesepakatan antara para pihak dengan pihak swasta, hal tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kotawaringin Barat dan bukan oleh lembaga BPBD Kotawaringin Barat, artinya kesepakatan tersebut dilakukan oleh instansi yang lebih tinggi dengan wewenang yang lebih luas.

#### 4) Penguatan keberlanjutan program dan kegiatan di Masyarakat

Program dan kegiatan yang dilakukan di masyarakat terutama program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam merupakan program yang tidak bisa dilakukan secara singkat karena mitigasi non fisik berupa sosial dan psikologi bukan mudah.

Program-program sosialisasi, penyadaran perilaku, perubahan cara pandang, perubahan paham, harus dilakukan secara kontinyu dan tiap tahun, untuk program tersebut BPBD Kotawaringin Barat bekerjasama dengan para



pihak lainnya melakukan kegiatan tersebut dan pihak lain pun mengundang BPBD Kotawaringin Barat menjadi Narasumber dalam acara yang mereka buat.

Dijelaskan oleh Kasi Rehabilitasi dalam wawancaranya bahwa

“ kita setiap tahun melaksanakan sosialisasi baik itu berkaitan dengan pencegahan, kesiapsiagaan maupun rehabilitasi dan rekonstruksi sehingga masyarakat tau apa-apa saja yang bisa dilakukan apa-apa saja yang patut dilakukan dan hal-hal apa saja yang bisa buat masukan ke instansi. Program-program itu dilaksanakan secara kontinyu karena memang setiap tahun itu menjadi agenda dalam program dan kegiatan yang dilaksanakn instansi atau badan” (04 Agustus 2017)

Program keberlanjutan kegiatan juga ditunjukkan dalam renstra BPBD bahwa setiap program yang diajukan merupakan program jangka panjang, terutama terkait dengan pencegahan dan kesiapsiagaan serta pemulihan pasca bencana, karena mempersiapkan masyarakat dan memulihkan masyarakat memerlukan waktu yang tidak pendek.

Rangkuman penilaian 6 komponen yang telah dijelaskan seperti pada tabel 4.4 berdasarkan tabel tersebut ditemukan bahwa nilai rata-rata komponen penilaian kapasitas berada di kategori 2, yang menunjukkan bahwa sudah terdapat beberapa kebijakan namun tidak/belum dipraktekkan secara seksama atau juga dapat dikatakan bahwa sudah banyak praktek-praktek dilakukan namun secara kebijakan baku belum dituliskan atau belum dibuat

Tabel 4.4 Tinjauan Penilaian Hasil Wawancara dan Telaahan Dokumen

KOMPONEN	SUB-KOMPONEN	PENJABARAN NILAI (TEMUAN DI LAPANGAN)	
1	2		
<b>ORIENTASI ORGANISASI</b>	Filosofi organisasi (visi, misi dan tujuan)	Kebijakan Cukup Lengkap dan sebagian besar disusun secara partisipatif di tataran organisasi	kategori 3
	Isu-Isu Strategis	Sudah ada beberapa kebijakan namun tidak dipraktekkan secara seksama,	kategori 2
		Partisipasi pada proses perumusan terbatas	kategori 2
	Nilai-nilai dan penerapannya	Sudah ada beberapa kebijakan namun tidak dilaksanakan secara seksama,	kategori 2
	Peran atau posisi strategis organisasi terhadap isu-isu strategis	Sudah ada beberapa kebijakan namun tidak dilaksanakan secara seksama,	kategori 2
Proses partisipasi perumusan meluas ke tataran internal organisasi		kategori 3	
<b>TATA KEPENGURUSAN</b>	Pembagian kekuasaan/kewenangan, fungsi dan tugas pokok	Kebijakan cukup lengkap dan sebagian besar sudah dipraktekkan	kategori 3
	Mekanisme Pengambilan Keputusan	sudah ada sistem yang dijalankan namun belum dibakukan menjadi kebijakan organisasi	kategori 2
	Mekanisme transparansi dan akuntabilitas	sudah ada sistem yang dijalankan namun belum dibakukan menjadi kebijakan organisasi	kategori 2
<b>MANAJEMEN ORGANISASI</b>	Manajemen Sumberdaya manusia	sudah ada sistem yang dijalankan namun belum dibakukan menjadi kebijakan organisasi	kategori 2
	Manajemen Informasi	Sudah ada sistem yang dijalankan namun belum dibakukan menjadi kebijakan organisasi	kategori 2
	Manajemen Keuangan	Kebijakan cukup lengkap dan sebagian besar sudah dipraktekkan	kategori 3

	Manajemen Kantor	Kebijakan cukup lengkap dan sebagian besar sudah dipraktekkan	kategori 3
	Mekanisme pengelolaan dan/atau penyelesaian konflik	Sudah ada sistem yang dijalankan namun belum dibakukan menjadi kebijakan organisasi	kategori 2
<b>MANAJEMEN PROGRAM</b>	Pendekatan Pengelolaan Program	sudah ada sistem yang dijalankan namun belum dibakukan menjadi kebijakan organisasi	kategori 2
	Pelibatan Penerima Manfaat	sudah ada sistem yang dijalankan namun belum dibakukan menjadi kebijakan organisasi	kategori 2
	Pengembangan Proses Pembelajaran/Ruang Pembelajaran	sudah ada sistem yang dijalankan namun belum dibakukan menjadi kebijakan organisasi	kategori 2
<b>KEBERLANJUTAN</b>	Fundraising/mobilisasi sumberdaya	sudah ada sistem yang dijalankan namun belum dibakukan menjadi kebijakan organisasi)	kategori 2
	Kaderisasi dan Regenerasi	sudah ada sistem yang dijalankan namun belum dibakukan menjadi kebijakan organisasi	kategori 2
		Partisipasi pada proses perumusan terbatas	kategori 2
	Kepercayaan dan legitimasi public	Sudah ada praktek-praktek namun belum dibakukan menjadi kebijakan organisasi	kategori 2
<b>KINERJA ORGANISASI</b>	Penguatan Proses kualitas pemberdayaan masyarakat	Cukup	kategori 3
	Penguatan tingkat kepercayaan masyarakat	Baik	kategori 4
	Perluasan intensifikasi hubungan kerja dengan stakeholder dalam rangka memperjuangkan isu dan peningkatan perluasan gagasan	Baik	kategori 4

	Penguatan keberlanjutan program dan kegiatan di Masyarakat	Baik	kategori 4
--	--	------	------------

Berdasarkan kriteria dalam penilaian bahwa : kategori 1 menunjukkan kapasitas yang buruk kategori 2 menunjukkan kurang dan kategori 3 menunjukkan cukup serta kategori 4 menunjukkan baik, tabel rangkuman penilaian di atas menunjukkan bahwa sebagian besar sub komponen kapasitas BPBD berada pada posisi Kurang, namun beberapa sub komponen penilaian menunjukkan kondisi cukup dan baik.

Kapasitas manajemen umum BPBD KOTAWARINGIN BARAT secara keseluruhan berada pada kategori *kurang*, yang ditinjau berdasarkan 6 komponen penilaian yang didukung oleh sub-sub komponen, didapatkan bahwa :

- a) Komponen orientasi organisasi bernilai kurang, dimana sudah ada beberapa kebijakan, namun belum dilaksanakan secara seksama dengan perumusan yang terbatas dan proses partisipasi internal pada level terbatas.
- b) Komponen tata kepengurusan bernilai kurang, yang dijabarkan bahwa sudah terdapat beberapa kebijakan dan sebagian besar sudah dilaksanakan namun belum menyeluruh, terkait dengan mekanisme kepengurusan dilihat bahwa pelaksanaan tata kepengurusan telah dilakukan dengan baik, sayangnya kebijakan baku organisasi belum dibuat.
- c) Komponen manajemen organisasi bernilai cukup yang dijabarkan bahwa sudah terdapat kebijakan baku dan sebagian besar sudah dilaksanakan namun belum menyeluruh. Pada sisi pengelolaan keuangan, terdapat nilai yang berbeda karena

aturan baku Manajemen Keuangan sudah ada dan penerapannya sudah dijalankan dengan baik mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan aturan di atasnya

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

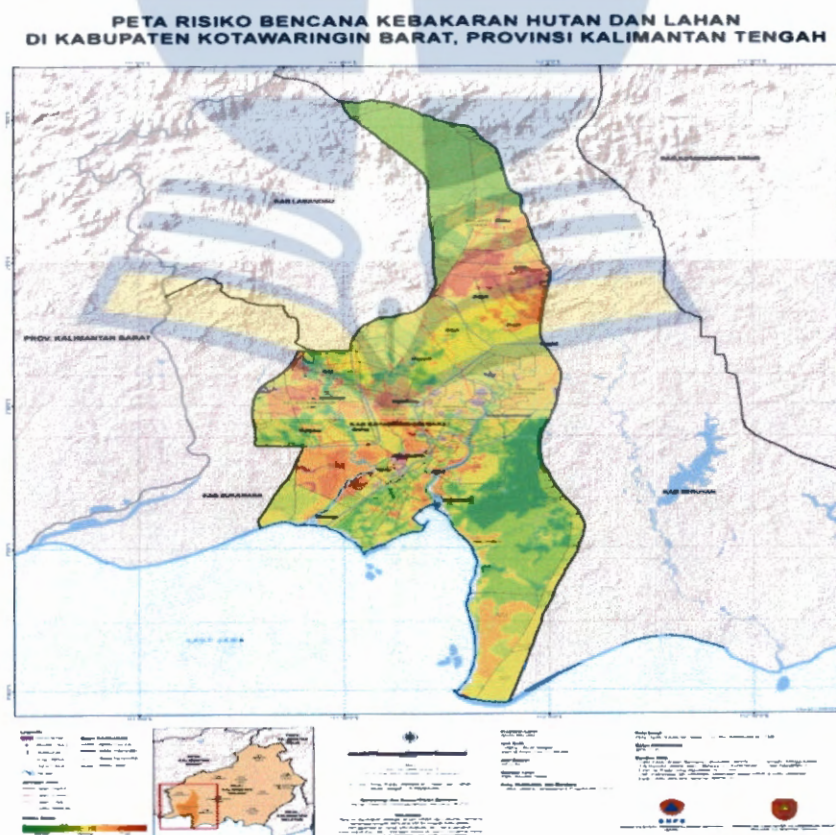
- d) Komponen manajemen program bernilai kurang yang dijabarkan bahwa sudah terdapat beberapa kebijakan dan sebagian besar sudah dilaksanakan namun belum menyeluruh, terkait dengan mekanisme kepengurusan dilihat bahwa pelaksanaan kerja di instansi/lembaga telah dilakukan, sayangnya kebijakan baku organisasi seperti protap, junknis dan SOP Administrasi belum dibuat.
- e) Komponen keberlanjutan bernilai kurang yang dijabarkan bahwa sudah terdapat beberapa kebijakan dan sebagian sudah dilaksanakan namun belum menyeluruh, terkait dengan dan; dalam hal kaderisasi dan regenerasi, dalam usia organisasi yang relative muda, hal ini sangat minim dilakukan.

- f) Kinerja Organisasi bernilai Cukup, ditunjukkan dari penilaian kualitas pemberdayaan masyarakat, tingkat kepercayaan masyarakat, hubungan kerja dengan stakeholder dan keberlanjutan program yang semuanya bernilai baik.

Dalam sebuah Grafik dapat ditunjukkan sebagai berikut :

## 2. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan di Kabupaten Kotawaringin Barat

Penyelenggaraan Penanggulangan Kebakaran Lahan dan Hutan di Kabupaten Kotawaringin Barat tidak terlepas dari Rencana Penanggulangan Bencana yang disusun oleh BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat dan berpatokan pada Peta Risiko Kebakaran Lahan dan Hutan seperti pada Gambar 4.3



Gambar 4.3 Peta Risiko Kebakaran Lahan dan Hutan

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Karlahut, tidak dilaksanakan sendiri oleh BPBD KOTAWARINGIN BARAT, namun merupakan kerja bersama lintas instansi lintas sektor. Penyelenggaraan Penanggulangan Kebakaran Lahan dan Hutan meliputi 3 proses menyeluruh, yaitu :

- a) Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- b) Penanganan Darurat (Pemadaman Kebakaran)
- c) Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Pemulihan Pascabencana)

Berdasarkan hasil temuan penelitian, penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terkoordinir dan terpadu, hanya dilaksanakan pada saat Penanganan Darurat (Penanganan Kondisi Darurat) setelah adanya Surat Darurat Bencana dan Surat Keputusan Pembentukan Satgas Kabupaten oleh Bupati Kepala Daerah tingkat II,

Berdasarkan hasil temuan penelitian, penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terkoordinir dan terpadu, hanya dilaksanakan pada saat Penanganan Darurat (Penanganan Kondisi Darurat) setelah adanya Surat Darurat Bencana dan Surat Keputusan Pembentukan Satgas Kabupaten oleh Bupati Kepala Daerah tingkat II. Sedangkan tugas Prabencana yaitu kegiatan pencegahan, kesiapsiagaan dan mitigasi dilakukan secara terpisah pada masing-masing instansi seperti :

- a) BPBD Kotawaringin Barat
- b) Manggala Agni
- c) Polres Kotawaringin Barat

Penjelasan dari Kepala Daops III Kalimantan Tengah yang bertempat di Pangkalan Bun memperkuat hasil temuan bahwan penanggulangan parsial oleh masing-masing instansi juga dilaksanakan, dalam wawancaranya sebagai berikut

‘sejak Tahun 2016 kita lebih konsentrasi banyak melakukan upaya-upaya kegiatan pencegahan dalam penanggulangan bencana, saat ini kita sudah melakukan beberapa kegiatan patroli dimana pada di bulan agustus 2017 ini kita melakukan posko terpadu yang ada di 5 Kabupaten didesa-desanya untuk melakukan patroli setiap harinya dimana patroli ini bukan hanya berkeliling tapi juga mengumpulkan data-data daerah rawan kebakaran kemudian juga mengumpulkan data-data sumber air terdekat dari daerah rawan kebakaran tersebut kemudian melakukan anjangsana, atau penyuluhan kemasyarakatan terdekat, untuk memberikan himbauan bahwa **KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN** itu cukup mempunyai nilai yang tidak baik, baik itu bagi kesehatan maupun juga secara ekonomis dan kegiatan itu sudah kita lakukan di Kabupaten Kotawaringin Barat Kotawaringin Timur Seruyan Sukamara dan bulan depan akan kita lakukan di Lamandau’. (04 September 2017)

Dan penjelasan dari pihak Kepolisian Resort Kotawaringin Barat oleh Bapak Yongki dalam wawancara juga memperkuat pernyataan tersebut,

“Jauh-jauh hari sebelum musim kemarau kita sudah melakukan langkah-langkah terutama di bidang preemetif dan preventif tadi, artinya langkah-langkah **preemetif** ini kita laksanakan contohnya mensosialisasikan bahaya api dan asap atau kebakaran hutan serta dampak yang ditimbulkan dengan adanya kebakaran hutan tersebut ya memang di satu sisi ini masalah perut tapi dampaknya tidak hanya perut pribadi tapi sangat luas di dunia yang lain terutama dunia pendidikan, transportasi perekonomian dan lain lain. Jadi program keberlanjutan kami setiap tahun seperti itu. Kemudian juga menyadarkan masyarakat tentang bagaimana cara membuka lahan tanpa membakar” (29 Agustus 2017)

Penjelasan dari BPBD Kotawaringin Barat sendiri yang disampaikan oleh Kasi Pencegahan tentang hal-hal yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana kebakaran lahan dan hutan dalam wawancara sebagai berikut :



Untuk kegiatan yg telah kita lakukan sampai sekarang, di awal tahun kita telah melaksanakan patroli satgas pencegahan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kotawaringin Barat berikutnya memberikan himbauan kepada masyarakat dalam upaya pencegahan bencana KHL di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat. Kita juga telah melaksanakan penandatanganan MOU- Nota kesepahaman antara Pemda Kotawaringin Barat dengan pihak perusahaan atau swasta yang beroperasi di wilayah Kab Kotawaringin Barat dalam upaya penanggulangan bencana.

Yang berikutnya kami telah melakukan sosialisasi kepada aparat desa, kecamatan, terkait dalam pencegahan bencana KHL di wil Kabupaten Kotawaringin Barat tentang peraturan-peraturan terkait larangan pembukaan lahan atau pembakaran hutan khususnya di wilayah Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kotawaringin Barat. Berikutnya kami telah melakukan pelatihan, simulasi pemadaman Kebakaran Hutan Lahan bersama pihak swasta dalam hal ini perusahaan dan instansi pemerintah, dan masyarakat. Selanjutnya kami juga telah melakukan pemadaman bersama masyarakat dari bulan Juni sampai dengan sekarang. Berikutnya pemasangan spanduk, baleho, banner terkait dengan larangan membakar lahan dan hutan di wilayah yg rawan bencana. Kami juga telah menyebarkan pamflet, himbauan pencegahan kebakaran hutan dan lahan serta menyebarkan informasi pencegahan kebakaran melalui media elektronik. (02 Agustus 2017)

Dalam aturan yang berbeda di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/MenLHK/Setjen/kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, disampaikan bahwa penyelenggaraan pencegahan Kebakaran hutan dan lahan, meliputi :

1. Pemberdayaan masyarakat
2. Penyadartahuan
3. Pengurangan risiko karhutla
4. Kesiapsiagaan

5. Pelaksanaan peringatan dini, dan
6. Patroli pencegahan

Di Kabupaten Kotawaringin Barat, saat kondisi Tanggap Darurat atau penanganan darurat kebakaran lahan dan hutan, pelaksanaan kerja/kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana mengacu pada struktur organisasi satuan tugas dan komando yang dikeluarkan oleh Bupati Kotawaringin Barat, merupakan tanggung jawab bersama antar unsur yang dikomandoi oleh Komandan Distrik Militer 1014 Pangkalan Bun, dibantu oleh :

1. BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat
2. Kepolisian Resort Kotawaringin Barat
3. Manggala Agni DAOPS III Kalimantan Tengah
4. Satpol PP dan Damkar
5. Tagana (Taruna Siaga Bencana) Kotawaringin Barat
6. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Pangkalan Bun

Satuan Tugas Penanganan Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017 ditetapkan berdasarkan SK Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat, nomor : 050/ 55 /BPBD.IV.1/ /2017 tanggal 1 Agustus 2017, dan dibentuk dengan menggunakan SK Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat nomor : 050/ 56 /BPBD.IV.1/ /2017 tanggal 1 Agustus 2017,, dengan struktur Organisasi pada Gambar 4.2 Pada struktur satuan tugas pos komando penanganan siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan tahun 2017 BPBD KOTAWARINGIN BARAT (BPBD Kotawaringin

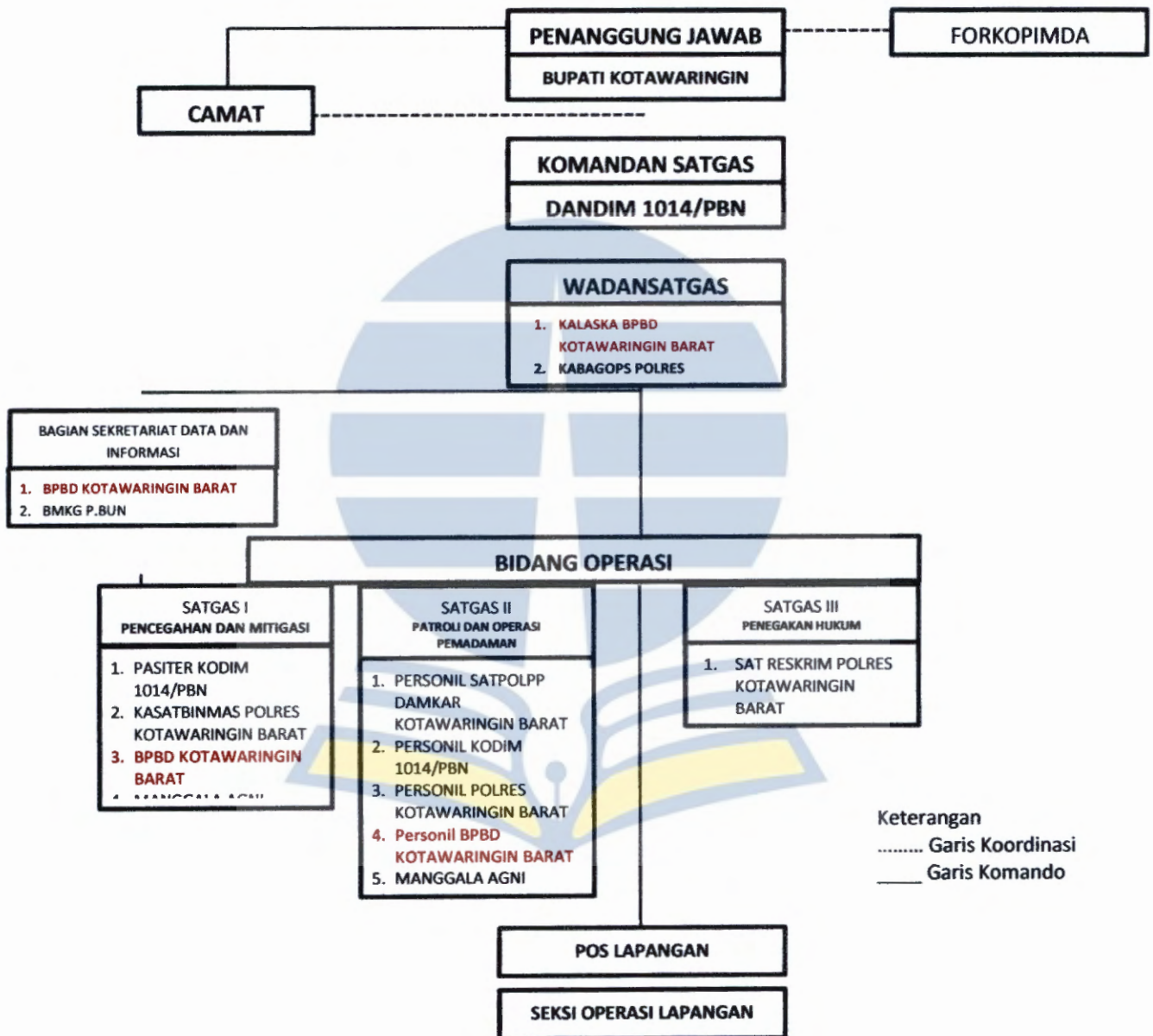
Barat) termasuk dalam semua lini dan menjalankan 3 fungsi yaitu Fungsi Komando, Fungsi Pelaksana dan Fungsi Koordinasi, karena keberadaannya sebagai Wakil Komandan Satgas, lini patroli dan pemadaman serta bagian sekretariat dan informasi.

Sebagai Wakil Komandan Satgas, Kepala pelaksana menjalankan fungsi komando, sebagai petugas patroli dan pemadaman menjalankan fungsi pelaksana dan di bagian sekretariat dan informasi menjalankan fungsi koordinasi.

Satgas Pengendali Kabupaten/Kota Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud berkedudukan di Kantor Pemerintah Kabupaten/Kota bersangkutan, yang memiliki fungsi mengkoordinasikan perencanaan, pengorganisasian, operasional, pengawasan dan evaluasi dalam setiap usaha karhutla di wilayahnya. Dalam aturan lain yang terpisah pada kementerian lingkungan hidup dan kehutanan Penyelenggaraan penanggulangan Karhutla, meliputi :

1. Deteksi dini
2. Pemadaman awal
3. Koordinasi pemadaman
4. Mobilisasi pemadaman
5. Pemadaman lanjutan
6. Demobilisasi pemadaman
7. Evakuasi dan penyelamatan

**STRUKTUR SATUAN TUGAS POS KOMANDO PENANGANAN  
SIAGA DARURAT BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN  
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2017**



**Gambar 4.4 Struktur Satgas PosKomando Penanganan Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2017**

Disampaikan oleh kepala Manggala Agni DAOPS III Kalimantan Tengah di Pangkalan Bun dalam wawancaranya menjelaskan tentang manajemen organisasi dan manajemen program di organisasinya bahwa :

Di Manggala Agni kita punya SOP dimana masing kegiatan Manggala Agni memang selalu diatur dengan SOP. Tadi diawal sudah disampaikan bahwa kegiatan pengendalian KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN di Manggala Agni terdiri dari 3 kegiatan utama yaitu Kegiatan Pencegahan, Pemadaman, dan Penanganan setelah terjadi Kebakaran. Jadi proses-proses masing-masing kegiatan itu sudah tertuang di SOP dan juga sudah dilegalkan dengan adanya surat atau pedoman dari kementerian, menteri lingkungan hidup dan kehutanan sehingga kami di daerah operasi Manggala Agni di masing-masing daerah sudah tinggal menjalankan saja apa sih protap-protap standar-standar prosedur yang akan kita lakukan. Misalnya pada saat pemadaman apa yang harus dilakukan pertama adalah setelah menerima laporan atau memantau Hotspot ternyata ditemukan Hotspot. Yang kedua yang kita lakukan selanjutnya adalah melakukan check up atau pemeriksaan di lapangan atau bisa juga dilakukan ground check dg hanya terdiri dari dua personil saja dengan menggunakan peralatan kendaraan roda dua juga peralatan pemadaman ringan kemudian apabila ternyata di lapangan ditemukan terjadinya kebakaran maka tim tadi akan melakukan pemanggilan kepada tim posko untuk dikirim tenaga bantuan serta mesin dan peralatan-peralatan pemadaman lainnya yang lebih besar sehingga pemadaman bisa lebih optimal. Termasuk sampai dengan kembalinya ke daerah operasi kita punya seluruh SOP yang telah ditetapkan oleh menteri LHK sehingga di masing-masing daops sudah tinggal melaksanakannya saja” (21 Agustus 2018)

Untuk pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi atau pemulihan kondisi lahan pasca kebakaran sampai saat ini belum pernah ada dilakukan oleh lembaga atau instansi pemerintahan, karena hal tersebut berkaitan dengan status kepemilikan lahan. Untuk lahan milik pribadi atau berstatus milik perorangan

dan swasta-pemulihan baik itu rehabilitasi maupun rekonstruksinya dikembalikan kepada masing-masing pihak/pemilik.

Penanganan bencana kebakaran lahan dan hutan dilakukan hingga pada tahapan penanganan akhir darurat yaitu kondisi api dinyatakan benar-benar padam dan tidak berisiko kembali

Pada proses setelah pemadaman hingga api benar-benar dinyatakan padam, terdapat kegiatan monitoring dan pengawasan, dalam kegiatan ini termasuk dilaksanakan pencatatan luasan areal terbakar dan estimasi kerugian akibat kebakaran lahan dan hutan.

Dalam aturan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan dalam instruksi menteri Instruksi Presiden No. 11 Tahun 2015 tentang peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Penyelenggaraan penanganan pasca Karhutla, meliputi :

1. pengawasan bekas areal terbakar
2. inventarisasi luas karhutla
3. penaksiran kerugian
4. koordinasi penanganan pasca karhutla

selanjutnya dijabarkan lebih rinci bahwa kegiatan tersebut meliputi :

- a. penaksiran luas
- b. analisa vegetasi bekas terbakar
- c. penaksiran kerugian

- d. rekomendasi pelaksanaan rehabilitasi areal bekas terbakar
- e. investigasi sebab-sebab kebakaran
- f. melakukan penandaan dengan garis polisi dan atau garis PPNS lingkungan hidup dan kehutanan
- g. data sering terhadapp areal pasca karhutla
- h. melakukan penyidikan; dan
- i. monitoring dan menindaklanjuti segala hal terkait pelaksanaan penanganan proses penegakan hukum, bidang karhutla

Keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan kebakaran secara terpadu yang dikoordinatori oleh BPBD Kotawaringin Barat, ditunjukkan dari tahun ke tahun. Berdasarkan laporan penyelenggaraan bencana kejadian kebakaran pada tahun 2015 - 2017, terdapat 138 kejadian dengan luasan 17.835 Ha dan yang tertangani hanya 1.761 Ha, sedangkan pada tahun 2016 terdapat 56 kejadian dengan luasan 1.094 Ha yang tertangani 839,1 Ha. Pada tahun 2017 terdapat 18 Kejadian dengan luasan 178 Ha yang tertangani 154 Ha. Dukungan personil lintas instansi BPBD, Dinas Satpol PP dan Damkar,TNI, Polres, Manggala Agni, BKSDA, BMKG,TNTP, Camat dan Masyarakat secara luas mampu meningkatkan keberhasilan dalam pelaksanaan penanggulangan kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

### **3. Kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Kebakaran Lahan dan Hutan**

Kapasitas lembaga yang dijabarkan berikut merupakan penjabaran dari komponen penilaian administrasi secara umum dan lebih bersifat pada teknis kerja dan kegiatan khusus yang berbeda dari yang dijabarkan sebelumnya, dan secara khusus lebih terkait pada kapasitas masing-masing bidang kerja penyelenggaraan penanggulangan kebakaran lahan dan hutan.

#### **a. Pencegahan dan Kesiapsiagaan**

Pencegahan bencana seperti dimaksud pada Peraturan Pemerintah no.21 tahun 2008 merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana, sedangkan kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

Hal-hal yang dilakukan dalam kegiatan pencegahan meliputi :

- a. Identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana
- b. Pemantauan terhadap :
  - 1) penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam;
  - 2) penggunaan teknologi tinggi



- c. Pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup
- d. Penguatan ketahanan sosial masyarakat

Kegiatan pencegahan menjadi tanggungjawab pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Kegiatan kesiapsiagaan meliputi :

- a. Penyusunan ujicoba rencana penanggulangan kedaruratan bencana
- b. Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini
- c. Penyediaan dan penyiapan barang
- d. Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat
- e. Penyiapan lokasi evakuasi
- f. Penyusunan data akurat, informasi, dan pemuntukhairan prosedur tanggap darurat bencana
- g. Penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana

Kegiatan kesiapsiagaan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah dan dilaksanakan bersama-sama masyarakat dan lembaga usaha.

Penelaahan dokumen dilakukan untuk melihat sejauh mana aturan baku dibuat oleh lembaga/istansi, khususnya untuk bidang pencegahan dan kesiapsiagaan yang memiliki tugas dan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana pada

fase prabencana. Telaahan dokumen ini menjadi bagian dari dukungan kapasitas regulasi terkait dengan kapasitas inti lembaga/instansi. Temuan disajikan pada Tabel 4.5 berikut yang menunjukkan hasil identifikasi dokumen terkait kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan

**Tabel 4.5 Identifikasi Dokumen Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan**

No	Komponen	Ada/Memiliki		Tidak Ada	Ket
		Lengkap	Tidak Lengkap		
1	Dokumen Uraian Tugas	✓			
2	Dokumen RPB – Rencana Penanggulangan Bencana		✓		
3	Dokumen Pengurangan Risiko Bencana			✓	
4	Dokumen rencana kontinjensi			✓	
5	Dokumen rencana aksi kebakaran hutan dan lahan		✓		
6	Peta Rawan Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan		✓		
7	Dokumen Kajian Risiko Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan			✓	
8	Dokumen Renstra Bidang		✓		
9	Dokumen Renja Bidang		✓		
10	SOP Administrasi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan		✓		
11	SOP Monitoring Titik Panas			✓	
12	SOP Sosialisasi Bahaya Kebakaran Lahan dan Hutan			✓	
13	SOP Simulasi Penanganan Kebakaran Lahan dan Hutan		✓		
14	SOP Apel Siaga			✓	
15	SOP Evaluasi Program dan Kegiatan		✓		

Sumber : Peneliti, berdasarkan Dokumentasi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Terkait dengan penyelenggaraan pencegahan dan kesiapsiagaan dijelaskan oleh

Kasi Pencegahan bahwa :

“beberapa upaya yang telah kita lakukan khususnya BPBD Kotawaringin Barat, dlm pengendalian kebakaran hutan dan lahan (a) Yang pertama BPBD sudah melaksanakan atau membuat himbauan instruksi yang isinya ditujukan kepada instansi pihak perusahaan serta seluruh lapisan masyarakat untuk

bersama sama meningkatkan kewaspadaan dan antisipasi terhadap kebakaran hutan, lahan dan pekarangan serta fasilitas publik yg berpotensi bencana kabut asap (b) Yang berikutnya kami telah menyebarkan informasi bencana kebakaran hutan dan lahan yg berpotensi mengakibatkan bencana kabut asap melalui media elektronik setempat (c) Yang selanjutnya melakukan inventarisasi peralatan pemadam kebakaran yg dimiliki baik dari instansi maupun pihak perusahaan (d) Yang berikutnya dalam rangka kesiapan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kab Kotawaringin Barat telah dibentuk tim terpadu langsung oleh Bupati Kotawaringin Barat” (02 Agustus 2017)

Tahap Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana merupakan tugas pokok dan fungsi dari bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, secara struktural bidang merupakan organisasi penyelenggara penanggulangan bencana khusus pada tahapan pencegahan dan kesiapsiagaan. Sebelum dijabarkan disajikan dalam sebuah grafik, perbandingan level kapasitas BPBD KOTAWARINGIN BARAT dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan per komponen tinjauan kapasitas



Gambar 4.5 Gambaran Perbandingan Kapasitas per Komponen Tinjauan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Perbandingan antar komponen menyajikan kelemahan kapasitas bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, secara orientasi organisasi, tata kepengurusan, keberlanjutan, dan kinerja organisasi kategori kapasitas berada pada level cukup, sedangkan pada komponen manajemen organisasi dan manajemen organisasi bernilai kurang. Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan hanya memiliki 4 personil yaitu 1 orang kepala bidang, 2 orang kepala seksi dan 1 orang administrator, hal ini menunjukkan sangat kurangnya sumberdaya manusia di bidang ini sehingga beban pekerjaan pada masing-masing personil nilainya menjadi besar, dan ini menjadikan kekurangan dalam manajemen organisasi, dimana keterbatasan sumberdaya personil membuat bidang ini tidak dapat bekerja secara optimal.

Keterbatasan sumberdaya ini berbuntut pada keterbatasan dalam pengelolaan program, khususnya dalam perencanaan dan monitoring evaluasi. Berbeda halnya dengan pelaksanaan kerja di lapangan, kedua kepala seksi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan adalah personil yang sangat kompeten di lapangan, mereka cukup mampu menyelesaikan pekerjaan pekerjaan lapangan dengan baik, seperti disampaikan oleh Kasubbag UKP bahwa :

‘ iya betul, kasi yang berdua itu memang paling bisa dan sigap di lapangan, tapi kalau menyelesaikan beberapa administrasi jadi lebih lama” (15 Agustus 2017)

Pencegahan berprinsip pada bagaimana mengurangi ancaman bencana dan mengurangi kerentanan pihak yang terancam bencana dengan tujuan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, sedangkan kesiapsiagaan

berprinsip pada kepastian akan kecepatan dan ketepatan dalam pelaksanaan tindakan saat terjadi bencana, dengan tujuan mempersiapkan segala sumberdaya yang ada untuk dapat mengatasi kejadian bencana. Prinsip yang menjadi dasar bagi bidang pencegahan dan kesiapsiagaan untuk melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan.

Program dan kegiatan yang diselenggarakan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang berada di bawah tanggung jawab bidang pencegahan dan kesiapsiagaan adalah :

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam, dengan 3 kegiatan yaitu :

1. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam

Dua sub kegiatan yaitu :

- Sosialisasi dan Pelatihan Bersama diikuti 6 Kecamatan dan Perusahaan
- Sosialisasi dan Pelatihan Penanganan Bencana untuk Sekolah se-Kab. Kotawaringin Barat

2. Patroli Satgas dan Posko Penanggulangan Kebakaran Hutan, Lahan dan Pekarangan

3. Patroli Pencegahan dan Siap Siagaan Terhadap Banjir dan Tanah Longsor

Kegiatan dalam dokumen pelaksanaan anggaran tersebut, belum mengakomodir keseluruhan penyelenggaraan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan yang harus dilakukan dalam penanggulangan bencana kebakaran pada tahapan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah no.21 tahun 2008.

Masyarakat adalah sasaran utama dalam setiap program dan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh BPBD Kotawaringin Barat, Salah satu kegiatan pencegahan yang memerlukan dukungan semua pihak adalah sosialisasi dan pelatihan baik yang diikuti oleh pelajar, warga masyarakat dan pihak dunia usaha.

Berdasar pada 6 komponen penilaian Kapasitas tahapan pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Kotawaringin Barat dinilai Cukup, hal tersebut ditunjukkan pada hasil temuan lapangan, bahwa program pencegahan kebakaran lahan dan hutan, dalam prakteknya telah dikerjakan dengan baik dilihat dari laporan penyelenggaran kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 dan tahun 2016, namun yang menjadi kekurangan dalam fase ini adalah pada standar baku kebijakan. Belum ditemukan dokumen rencana kontijensi, rencana aksi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta belum ada prosedur baku operasional atau standar operasional prosedur yang dibuat sebagai pedoman resmi pelaksanaan administrasi kerja di instansi. Hal tersebut menunjukkan lemahnya manajemen program pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

#### **b. Penanganan Darurat**

Penanganan darurat bencana atau tanggap darurat bencana seperti dimaksud pada PP no.21 tahun 2008 adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, penyelenggaraan penanganan darurat meliputi :

- a. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumberdaya
- b. Penentuan status keadaan darurat bencana
- c. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana
- d. Pemenuhan kebutuhan dasar
- e. Perlindungan terhadap kelompok rentan, dan
- f. Pemulihan segera prasarana dan sarana vital

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dikendalikan oleh kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya. Dalam aturan lain yang terpisah pada kementerian lingkungan hidup dan kehutanan Penyelenggaraan penanggulangan Karhutla, meliputi :

1. Deteksi dini
2. Pemadaman awal
3. Koordinasi pemadaman
4. Mobilisasi pemadaman
5. Pemadaman lanjutan
6. Demobilisasi pemadaman
7. Evakuasi dan penyelamatan

Penelaahan dokumen dilakukan untuk melihat sejauh mana aturan baku dibuat oleh lembaga/istansi, khususnya untuk bidang pencegahan dan kesiapsiagaan yang memiliki tugas dan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana pada fase tanggap darurat.

Temuan disajikan pada Tabel 4.6 berikut menunjukkan identifikasi dokumen terkait kegiatan di bidang kedaruratan dan logistik

**Tabel 4.6 Identifikasi Dokumen Bidang Kedaruratan dan Logistik**

No	Komponen	Ada/Memiliki		Tidak Ada	Ket.
		Lengkap	Tidak Lengkap		
1	Dokumen Uraian Tugas	✓			
2	Dokumen RPB – Rencana Penanggulangan Bencana		✓		
3	Dokumen Pengurangan Risiko Bencana			✓	
4	Dokumen rencana kontinjensi			✓	
5	Dokumen rencana aksi kebakaran hutan dan lahan		✓		
6	Peta Rawan Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan		✓		
7	Dokumen Renstra Bidang		✓		
8	Dokumen Renja Bidang		✓		
9	SOP Administrasi Bidang Kedaruratan dan Logistik			✓	
10	SOP Pengerahan Peralatan untuk Pemadaman			✓	
11	SOP Pelaksanaan Pemadaman		✓		
12	SOP Pengawasan setelah Pemadaman			✓	
13	SOP Koordinasi lintas sektor			✓	
14	SOP Penyebaran Informasi dan Laporan			✓	
15	SOP Evaluasi Kegiatan Pemadaman		✓		
16	SOP Penyaluran Bantuan Logistik		✓		
17	SOP Evaluasi Program dan Kegiatan			✓	

Sumber : Peneliti, berdasarkan Dokumentasi Bidang Kedaruratan dan Logistik

Disampaikan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat bahwa penanganan Karlahut adalah tugas bersama dan BPBD adalah koordinatonya

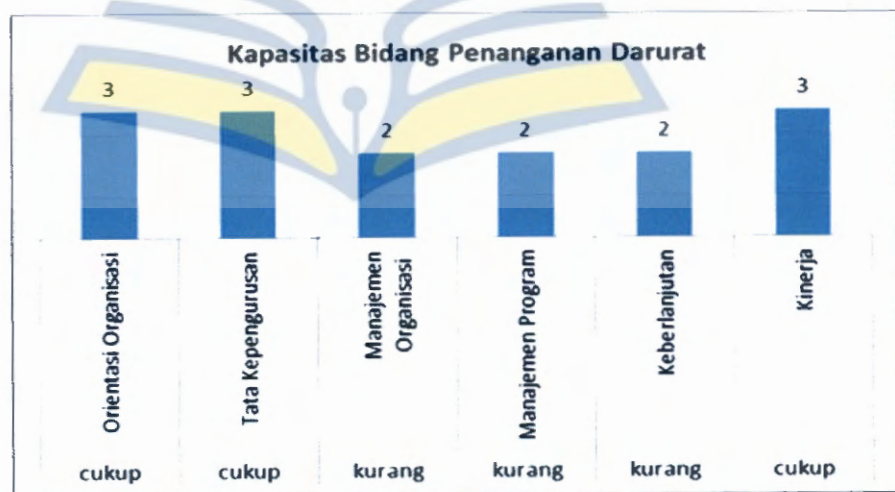
“kalo penanganan kebakaran hutan dan lahan biasanya kita akan membentuk tim gabungan atau tim penanganan terpadu yang diSKkan oleh bupati. Kemudian di bentuk posko, posko bersama, posko gabungan, beberapa tempat sudah kita jadikan posko seperti di BPBD kemudian di manggala agni, kemudian di satpol PP dan damkar. Setiap yang bertugas yang diSKkan untuk melakukan posko ataupun siaga akan berkumpul disana dan menunggu ataupun melakukan patroli menyerap informasi dari masyarakat



dan melakukan tindakan lapangan yang di dukung oleh seluruh instansi yang terkait. Umpamanya terjadi kejadian di lapangan, ketika mereka sampai di lapangan dan itu membutuhkan dukungan maka akan turun baik itu dari BPBD dari damkar kemudian Manggala Agni, bahkan dari BKSDA untuk mendukung penanganan di lapangan, kerjasama di lapangan cukup baik. Kalo SOP itu kita sudah punya tinggal bagaimana penerapannya, hanya yang menjadi kendala adalah disiplin personil, itu yang terkadang menjadi kendala dalam penanganan ketika untuk jaga di posko yang seharusnya mempunyai tugas jaga di posko ia tidak dilakukan, tapi kalau terjadi bencana kita memiliki komitmen yang sama bahwa bencana harus segera diatasi, demikian. (09 September 2017)

Tahap Penanganan Darurat dalam penanggulangan bencana merupakan tugas pokok dan fungsi dari bidang kedaruratan dan logistik, secara struktural bidang merupakan organisasi penyelenggara penanggulangan bencana khusus pada tahapan penanganan darurat.

Perbandingan antar komponen Kapasitas Bidang Kedaruratan dan Logistik, disajikan pada Gambar 4.6



Gambar 4.6 Gambaran Perbandingan Kapasitas per Komponen Tinjauan Bidang Penanganan Darurat

Grafik 4.6 merupakan penggambaran tingkat kapasitas dalam kategori kurang dan cukup dimana dinyatakan bahwa manajemen program dan keberlanjutan menempati posisi lebih rendah dibanding komponen penilaian lainnya, yang menunjukkan kedua komponen tersebut bernilai kurang sedangkan empat komponen lainnya bernilai cukup. Perbandingan antar komponen menyajikan kelemahan kapasitas bidang Penanganan Darurat. Kedaruratan atau tanggap darurat berdasar pada prinsip penyelamatan dan evakuasi korban serta membatasi lokasi terdampak bencana, dengan tujuan meminimalkan jumlah korban, kerusakan, kerugian, kehilangan dan dampak yang ditimbulkan akibat bencana. Hal ini yang menjadi dasar dalam pelaksanaan kerja kedaruratan, namun berbeda pada bencana kebakaran lahan dan hutan prinsip penanganan darurat terletak pada meminimalisasi dampak kebakaran.

Respon Time waktu penanganan kebakaran lahan dan hutan adalah indikator utama yang menjadi tolak ukur keberhasilan, selama tahun 2015 – 2017, tim TRC dan tindak lanjut penanganan rata-rata memiliki nilai responsif, dimana waktu tanggap atas kejadian kebakaran sangat cepat, dari informasi yang diterima ditindaklanjuti dalam hitungan menit dan tim reaksi cepat mampu hadir di lokasi bencana kebakaran dalam hitungan jam. Selain itu bidang kedaruratan dan logistik, sangat terbantu dengan kerjasama penanggulangan lintas sektor dengan adanya tim terpadu, tim gabungan, dan posko kedaruratan gabungan serta posko-posko bentukan di kecamatan, sehingga kerja yang memerlukan banyak personil dapat

didukung oleh instansi lain baik pemerintah lintas sektor maupun masyarakat dan pihak swasta.

Komponen organisasi utama yang menjadi fokus dalam penanganan darurat adalah Tata Kepengurusan dan Manajemen Organisasi, karena kedua komponen ini adalah komponen penilaian untuk melihat bagaimana fungsi komando dan fungsi koordinator dari BPBD Kotawaringin Barat saat penanganan darurat dilaksanakan. Bidang Kedaruratan dan Logistik, memiliki 2 seksi yaitu seksi kedaruratan dan seksi logistik dengan 6 orang personil yaitu 1 kepala bidang, 2 kepala seksi, 2 staf administrasi dan 1 staf penyimpan logistik, jika dibandingkan dengan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan personil pada bidang ini lebih baik.

Kelemahan Bidang Kedaruratan dan Logistik terletak pada Manajemen Program dan Keberlanjutan, Manajemen Program terkait pada perencanaan, proses pengelolaan program, pelibatan masyarakat dan pembelajaran.

Program dan kegiatan yang diselenggarakan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang berada di bawah tanggung jawab bidang kedaruratan dan logistik adalah

Program Tanggap Darurat , dengan 3 kegiatan yaitu :

1. Penyediaan Jasa Keuangan dan Pembentukan TRC/SRC
2. Pengangkutan Logistik
3. Monitoring dan Evaluasi Status Keadaan Darurat Bencana

Jika berkaitan dengan penanganan darurat kebakaran lahan dan hutan, ketiga kegiatan tersebut belum mampu mengakomodir kebutuhan penanganan darurat. Itulah mengapa nilai komponen manajemen program kurang, selain itu dukungan masyarakat atas penanganan darurat kebakaran lahan dan hutan masih kurang, seperti yang disampaikan Kasi Kedaruratan, bahwa :

'yah, masyarakat terlibat, jika lahan yang terbakar adalah lahan miliknya. Jika yang terbakar adalah lahan milik orang lain Cuma ditonton saja" (09 Agustus 2017)

Belum adanya struktur organisasi baku relawan menjadi kendala pula dalam peningkatan peran serta aktif perwakilan masyarakat dalam penanganan kedaruratan.

Kinerja organisasi penanganan darurat dalam hal ini pemadaman kebakaran, terlihat dari berkurangnya luasan wilayah yang terbakar dan berkurangnya titik hotspot yang muncul, pada tahun 2015 ± 17.835 Ha lahan terbakar dan pada tahun 2016 hanya ± 1.094 Ha lahan terbakar dan pada tahun 2017 ± 134 Ha lahan terbakar dengan 18 kali kejadian kebakaran. Dengan tidak mengesampingkan cuaca yang pada tahun 2017 lebih banyak hari hujan dibanding tahun sebelumnya. Secara keseluruhan berdasar pada 6 komponen penilaian Kapasitas kinerja organisasi kapasitas BPBD dalam fase Penanganan Darurat dinilai Cukup yang berarti bahwa penanganan darurat telah dilaksanakan di lapangan dalam kerja tim, namun masih terdapat kekurangan secara manajerial khususnya pada pengelolaan program dan keberlanjutan kegiatan.

### **c. Rehabilitasi dan Rekonstruksi**

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. Sedangkan Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

Berdasarkan UU no,24 tahun 2007 dan PP no.21 Tahun 2008 Rehabilitasi pada wilayah pascabencana dilakukan melalui kegiatan

- a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
- b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
- c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- d. pemulihan sosial psikologis;
- e. pelayanan kesehatan;
- f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- g. pemulihan sosial ekonomi budaya;
- h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
- i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan

j. pemulihan fungsi pelayanan publik.

Rekonstruksi dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik, meliputi

- a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
- b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
- f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
- g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
- h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Bencana kebakaran lahan dan hutan memiliki karakter yang berbeda dalam proses pemulihannya, dan jenis korbannya, dimana bencana ini lebih mengarah pada ancaman lingkungan dan dukungan kualitas hidup karena berdampak pada adanya kabut asap sehingga pada bencana kebakaran lahan dan hutan tahapan yang dilakukan berbeda lebih mengacu pada aturan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, dimana kegiatan yang dilakukan pada tahap pasca bencana meliputi :

1. pengawasan bekas areal terbakar
2. inventarisasi luas karhutla
3. penaksiran kerugian
4. koordinasi penanganan pasca karlahut

Temuan disajikan pada Tabel 4.7 berikut menunjukkan identifikasi dokumen terkait kegiatan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.

**Tabel 4.7 Identifikasi Dokumen Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi**

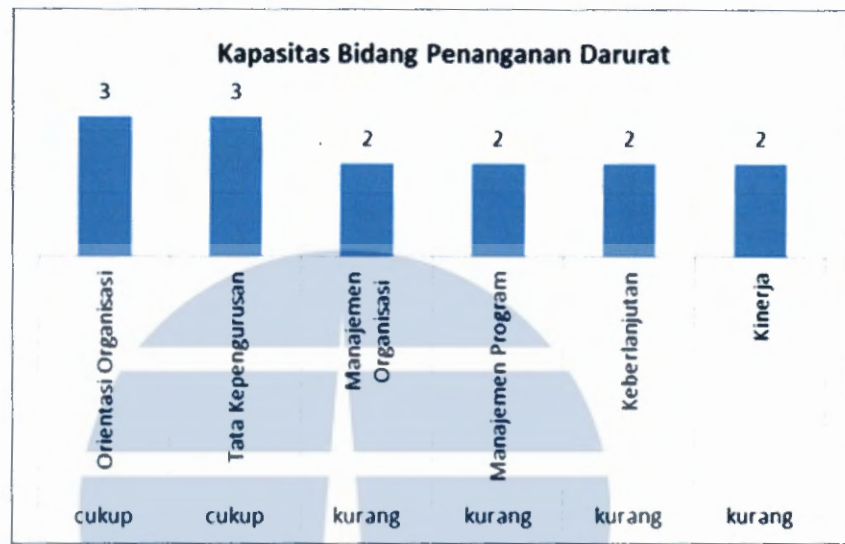
No	Komponen	Ada/Memiliki		Tidak Ada	Ket.
		Lengkap	Tidak Lengkap		
1	Dokumen Uraian Tugas	✓			
2	Dokumen RPB -- Rencana Penanggulangan Bencana		✓		
3	Dokumen Pengurangan Risiko Bencana			✓	
4	Dokumen rencana kontinjensi			✓	
5	Dokumen rencana aksi kebakaran hutan dan lahan		✓		
6	Peta Rawan Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan		✓		
7	SOP Pengawasan bekas areal terbakar			✓	
8	SOP Inventarisasi luas areal terdampak		✓		
9	SOP DALA			✓	
10	SOP rencana rehabilitasi pasca kebakaran lahan dan hutan			✓	
11	SOP Evaluasi Program dan Kegiatan			✓	

Sumber : Peneliti, berdasarkan Dokumentasi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Tidak banyak yang dilakukan dalam tahapan ini, sementara ini yang terlihat dan ditemukan dokumen laporannya adalah rekap laporan yang berisi luasan kebakaran hutan dan lahan, tempat kejadian kebakaran. Sedangkan penghitungan dampak dan kerugian belum dilakukan dan kebutuhan pemulihan sebagai *recovery* pascabencana juga belum dilakukan, terlebih lagi duduk bersama dalam penanganan pada pasca kebakaran lahan dan hutan selama ini belum dilakukan.

Tahap Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana dalam penanggulangan bencana merupakan tugas pokok dan fungsi dari bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dalam Grafik pada Gambar 4.7 ditunjukkan perbandingan level kapasitas BPBD KOTAWARINGIN BARAT dalam Rehabilitasi dan rekonstruksi



Gambar 4.7 Gambaran Perbandingan Kapasitas per Komponen Tinjauan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Grafik hanyalah penggambaran tingkat kapasitas dalam kategori kurang dan cukup dimana dinyatakan bahwa orientasi organisasi dan tata kepengurusan berada pada posisi lebih tinggi dibanding komponen penilaian lainnya, yang menunjukkan kedua komponen tersebut bernilai cukup sedangkan empat komponen lainnya bernilai kurang. Perbandingan antar komponen menyajikan kelemahan kapasitas bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Rehabilitasi dan rekonstruksi berprinsip pada '*Build back better and safer*, artinya mengutamakan untuk membangun kembali dengan lebih baik dan lebih aman. Secara umum seperti itu, dan di dalam penanggulangan kebakaran lahan dan hutan, rehabilitasi dan rekonstruksi lebih pada perbaikan lingkungan, perbaikan kualitas lahan. Secara struktural bidang rehabilitasi dan rekonstruksi terbagi menjadi



dua seksi yaitu seksi rehabilitasi dan rekonstruksi, dengan 6 personil yaitu 1 kepala bidang, 2 kepala seksi dan 3 staf yaitu 1 staf penghimpun data, 1 staf administrasi dan pelaporan serta 1 staf pengumpul data.

Program dan kegiatan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi yang tercatat dalam dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2016 dan 2017 adalah :

Program Tanggap Darurat Pasca Bencana, dengan empat kegiatan :

- a. Penyusunan Program dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- b. Penyusunan Laporan dan Evaluasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
- c. Pengendalian Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- d. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

Program dan Kegiatan pasca bencana terkait kebakaran lahan dan hutan, hingga saat ini belum banyak dilakukan, kegiatan yang dilakukan baru sampai pada tahap pencatatan kejadian kebakaran, luasan wilayah terbakar, akibat yang ditimbulkan pasca kebakaran, monitoring lapangan pasca kebakar namun belum menyentuh kondisi pemulihan pasca kebakaran. Saat hal tersebut ditanyakan pada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, disampaikan bahwa :

“bidang rehabilitasi dan rekonstruksi belum banyak bergerak di bidang kebakaran lahan dan hutan, personil kami lebih dikerahkan pada penanganan darurat. Kami belum menyelenggarakan pengkajian kebutuhan pasca bencana dan pemulihan lingkungan karena terbentur dengan status kepemilikan lahan. Hal-hal yang kami lakukan lebih mendekati pada kegiatan bencana lainnya. Untuk kebakaran lahan dan hutan, yang dilakukan hanya mencatat saja, mencatat luasan

kebakaran, letaknya dimana, kira-kira rugi berapa, akibat kebakarannya apa. Tindak lanjut dari kondisi itu belum dilakukan banyak hal.

Hal tersebut menegaskan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan bidang ini belum menyentuh pada pemulihan lingkungan pasca kebakaran lahan dan hutan. Hal terpenting yang menjadi awal dalam program pemulihan pasca bencana adalah pengkajian kebutuhan pasca bencana, sebagai pedoman dasar untuk pemulihan. Namun keterbatasan kompetensi personil untuk menyelenggarakan kegiatan ini menjadi hambatan besar dalam tersedia dokumen perencanaan pemulihan pasca bencana, disampaikan oleh kepala seksi rehabilitasi dalam wawancaranya bahwa :

“rencana kerja bidang rehabilitasi dan rekonstruksi memang belum menyentuh pada pengkajian kebutuhan pascabencana, namun pekerjaan-pekerjaan awal untuk kajian itu sudah dilakukan, pendataan, pencatatan kami lakukan pasca kejadian bencana, yang belum dilakukan adalah perhitungan nilai kerugian dan dampak karena ini menyangkut kompetensi penghitungan, menghitungnya tidak bisa sembarangan diperlukan ahli untuk melakukannya’ (04 Agustus 2017)

Kegiatan rekonstruksi pascabencana yang pernah dilakukan oleh BPBD pada tahun 2016 adalah pembuatan kanal untuk mendukung ketersediaan air sebagai sumber pasokan air bagi pemadaman kebakaran lahan di Kelurahan Baru, dan selain itu juga rekonstruksi mengatasi bencana di luar kebakaran lahan dan hutan adalah pembuatan sumur bor, bangunan pengaman pantai, bangunan pengaman tebing sungai, serta penimbunan jalan penghubung desa.

Berdasar pada 6 komponen penilaian kapasitas yaitu kapasitas BPBD dalam fase Rehabilitasi dan Rekonstruksi berada pada level kurang, karena BPBD secara umum belum melaksanakan Rehabilitasi dan/atau rekonstruksi pasca kebakaran lahan dan hutan sehingga banyak hal yang belum dapat deskripsikan. Secara garis besar berdasarkan dokumen laporan penyelenggaraan penanggulangan kebakaran lahan dan hutan Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2016, penanggulangan kebakaran lahan dan hutan telah dilaksanakan dalam kegiatan penanganan kebakaran lahan dan hutan pada tahun 2016 dalam bentuk sosialisasi, pendirian posko gabungan, patroli gabungan, pemadaman dini kebakaran hutan dan lahan serta penanganan darurat dengan mengintegrasikan seluruh stakeholder baik personil maupun sarana prasarana melalui jalur darat dan udara. Dimana kegiatan rinci dan permasalahannya dapat dilihat pada Lampiran 5.

Dalam laporan tersebut dijelaskan secara lengkap hal-hal yang dilakukan tim satgas penanggulangan kebakaran lahan dan hutan pada tahun 2016, yang dikoordinatori oleh BPBD Kotawaringin Barat. Dan dalam evaluasi penyelenggaraan Posko Siaga pengendalian kebakaran hutan dan lahan Tahun 2017, terjadi perubahan konsep dan pola operasi penanganan kebakaran hutan dan lahan dari tahun-tahun sebelumnya, dimana pembagian tugas Tim Satgas dijalankan perbagian sebagai berikut :

1. Satgas Pencegahan dan Mitigasi: pengerahan seluruh kekuatan yang berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk merubah pola pikir/*mindset* masyarakat untuk tidak membakar hutan dan lahan;

2. Satgas patroli dan operasi pemadaman : pengerahan seluruh kekuatan yang berada di wilayah kab. Kotawaringin barat utk penanganan pemadaman kebakaran hutan dan lahan;
3. Satgas gakkum : pengerahan kekuatan untuk melakukan penindakan terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.

Dan pelaksanaan kerja tim di lapangan menjadi lebih terkonsep dan lebih jelas dari sebelumnya.

#### 4. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Dalam rancana strategis BPBD KOTAWARINGIN BARAT 2017-2022 disampaikan beberapa permasalahan yang dialami dan menjadi kendala bagi instansi berdasarkan aspek kajian yang menjadi isu strategis instansi seperti tabel 4. 8

**Tabel 4.8 Permasalahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat**

No	Aspek Kajian	Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan yang Dihadapi
				Internal	Eksternal	
1	Kajian risiko bencana dan mitigasi bencana	Belum adanya kesepakatan antar stakeholder untuk melakukan aksi bersama dalam pengurangan resiko bencana	PP No. 21 Tahun 2008  Permendagri No. 33 Tahun 2006  Perka BNPB No. 4 Tahun 2008	Dibutuhkan kesepakatan dengan stakeholder lain dalam melaksanakan langkah pengurangan resiko bencana secara efektif	Belum adanya kesepakatan antar stakeholder untuk melaksanakan upaya pengurangan resiko bencana	Belum terlibatnya stekholder terkait dalam penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk Pengurangan Resiko Bencana
2	Sumber Daya Manusia Aparatur	Kurangnya kapasitas dan kuantitas aparatur pada BPBD	UU No. 5 Tahun 2014	Kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan sebagai	Penanganan bencana yang sigap dan tanggap memerlukan SDM yang	Aparatur BPBD belum memiliki kompetensi di bidang kebencanaan

				akibat kurangnya kapasitas dan kuantitas SDM	kompeten dan dalam jumlah yang memadai	dalam jumlah yang memadai
3	Sarana dan prasarana	Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk pelaksanaan tugas dan fungsi	UU No. 24 tahun 2007, Perka BNPB No 17 tahun 2009	Kebutuhan akan sarana prasarana yang memadai untuk pelaksanaan tugas dan fungsi	Tuntutan masyarakat akan penanganan bencana yang cepat dan tepat	Kurangnya sarana dan prasarana untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal
4	Sumber Dana	Belum optimalnya anggaran untuk penanganan prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana	UU No. 24 Tahun 2007 Pasal 8 huruf d	Belum terlaksananya beberapa rencana kegiatan disebabkan kurangnya anggaran	Penanganan bencana yang komprehensif memerlukan sumber dana yang memadai	Kurang optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi
5	Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana	Partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanganan bencana belum terlembaga dengan optimal	UU No. 24 tahun 2007, PP No. 21 tahun 2008, Perka BNPB No. 1 tahun 2012, Perka BNPB No. 11 tahun 2014	Belum terjalannya koordinasi yang optimal antara BPBD dengan Usur masyarakat dalam penanganan bencana	Adanya peraturan perundangan yang meminta untuk melembagakan partisipasi masyarakat dalam penanganan bencana	Belum optimalnya Sosialisasi, Pembinaan, Pembentukan Desa/ Kelurahan Siaga Bencana
6	Unsur Pengarah	Perlunya arahan dan panduan dalam pengelolaan bencana dari unsur-unsur yang kompeten.	UU No. 24 Tahun 2007, PP No. 21 Tahun 2008	Diperlukan arahan dari pihak yang kompeten untuk pengelolaan bencana.	Dinamisnya kondisi lapangan dan kompleksnya permasalahan penanggulangan bencana memerlukan sumbangan pemikiran dan kajian dari pihak yang kompeten.	Belum terbentuknya unsur pengarah penanggulangan bencana sesuai peraturan perundang-undangan
7	Penanganan tanggap darurat bencana	Penanganan tanggap darurat belum	UU no. 24 tahun 2007 & PP No. 21	Personil BPBD yang ada tidak mencukupi	Dibutuhkan penanganan tanggap darurat	Belum optimalnya Kapasitas dan Peran Personil BPBD

		optimal	tahun 2008	untuk secara cepat menangani tanggap darurat bencana	secara cepat dan akurat	
8	Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana belum optimal	UU no. 24 tahun 2007 & PP No. 21 tahun 2008	Anggaran dan personil serta kerjasama dengan stakeholder lain belum memadai	Meningkatnya tuntutan akan ganti kerugian dari masyarakat akibat kejadian alam	Belum optimalnya Koordinasi antar Stakeholder dalam penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

Sumber : Renstra BPBD Kotawaringin Barat 2017-2022

Jika dicermati tabel 4.9 dapat diidentifikasi permasalahan yang dialami BPBD terkait pada belum adanya anggota kerja unsur pengarah, belum adanya dokumen baku kajian risiko bencana, kurangnya sumberdaya baik itu sumberdaya keuangan, sumberdaya personil hingga sarana dan prasarana. Sedangkan dalam wawancara Kalak BPBD Kotawaringin Barat menyampaikan bahwa :

“Yang pertama adalah dukungan anggaran karena untuk penanganan bencana itu kita membutuhkan dana yang cukup besar, baik itu dukungan peralatan juga dukungan dalam mengatasi kebencanaan di tingkat lapangan atau ditingkat masyarakat, kemudian yang kedua adalah kekurangan personil, sampai pada saat ini dukungan personil kita terbatas jadi ketika terjadi kebencanaan mau tidak mau kita selalu menggerakkan seluruh sistem yang ada, karena kemampuan penanganan internal kita itu terbatas, jadi penghambat atau kendala kita itu yang pertama anggaran kemudian yang kedua jumlah personil yang terbatas. Kalau untuk pelaksanaan di dalam internal, secara manajemen dukungan kemampuan masing-masing institusi ulangi masing-masing staf ataupun pejabat kita yang ada itu sudah sangat baik” (09 September 2017)

Dari hasil wawancara itu dapat diambil ringkasan bahwa yang menjadi penghambat dalam peningkatan kemampuan organisasi adalah keterbatasan anggaran/pendanaan, kekurangan personil sedangkan yang menjadi daya dukung

adalah kemampuan personil pada masing-masing bidang serta loyalitas personil tersebut pada tugas dan pekerjaannya.

**a. Faktor Pendukung**

Berdasarkan telaahan dokumen Renstra BPBD Kotawaringin Barat dinyatakan bahwa yang menjadi kekuatan dan peluang pada BPBD Kotawaringin Barat adalah:

1. Adanya komitmen dari pemerintah melalui pendanaan dan sarana prasarana yang semakin meningkat, hal tersebut memang ditemukan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari tahun 2014 hingga 2017 terjadi peningkatan jumlah anggaran yang disediakan untuk instansi yaitu Pada tahun 2014 Belanja Langsung (merupakan belanja program dan kegiatan diluar gaji pegawai) sebesar Rp.1.995.847.100,- Pada tahun 2015 sebesar Rp. 15.724.539.000 dimana terdapat nilai besaran Dana hibah bagi pembangunan fisik pasca bencana sebesar Rp. 9.080.597.000,- sehingga nilai APBD sebesar Rp 6.643.942.000,- Dimana nilai uang besaran hibah ini diluncurkan pada tahun anggaran 2016 dan dilaksanakan pada tahun tersebut. Pada tahun 2016 sebesar Rp. 12.769.640.050 dimana terdapat nilai besaran Dana hibah bagi pembangunan fisik pasca bencana sebesar Rp. 9.522.597.000,- sehingga nilai APBD sebesar Rp. 3.247.043.050,- Dan Pada tahun 2017 sebesar Rp. 3.034.234.000,-

2. Tingginya tingkat kepedulian para pihak akan bencana melalui dukungan sumberdaya; hal ini disampaikan pula oleh Kalak BPBD bahwa :

“penanganan bencana tidak bisa sendiri. Karena bencana itu sesuatu yang luas dan mencakup semua aspek, ketika terjadi kebencanaan itulah sebabnya kita pasti membentuk tim gabungan yang akan melakukan penanganan dilapangan, dan sesuai dengan tupoksi masing-masing semuanya bergerak simultan, umpamanya dari BPBD kita akan melakukan pengecekan lapangan kemudian pada saat penanganan kita bersama-sama dengan instansi terkait termasuk juga dinas sosial, SAR kemudian ketahanan pangan, dan sektor lain kesehatan semuanya membentuk sebuah organisasi ataupun kebersamaan yang nanti untuk melaksanakan penanganan di lapangan, koordinasi yang terbentuk itu lewat Tim yang dibentuk dengan tupoksi masing-masing ya dan kita kalo sudah penanganan darurat ada insiden commando yang nanti akan memberikan perintah atau pun membagi tugas masing-masing untuk kegiatan di lapangan. Untuk proses penanggulangan pasti kita tidak sendiri. Kita bersama dengan seluruh pihak. Termasuk koorporate, perusahaan dan masyarakat, pengusaha dan masyarakat” (09 September 2017)

3. Tingginya tingkat kepedulian masyarakat terhadap korban bencana;
4. Masih tingginya kepedulian masyarakat untuk membantu penanganan bencana.
5. Tingginya kepercayaan masyarakat pada instansi, poin 3, 4 dan 5 adalah poin dukungan masyarakat yang sangat penting dalam pelaksanaan kerja personil BPBD di lapangan, kalimat yang disampaikan oleh Adi, warga



masyarakat yang berdomisili di kelurahan raja seberang dalam wawancaranya

“Ya biasanya kalau mereka anu tu bu apa matikan api tu ya masyarakat tu ikut juga gitu sama-sama matikan api gitu bu” (30 Agustus 2017)

dan, warga lainnya yaitu Kalpin dari kelurahan Mendawai Seberang yang diwawancarai, saat ditanyakan tentang hal-hal apasaja yang pernah dikerjakan bersama BPBD, menyatakan bahwa

“Kegiatannya berupa memadamkan api jika terjadi kebakaran hutan dan lahan dan kemudian jika terjadi banjir dilakukan penanggulangan jika juga terjadi peristiwa orang tenggelam saya juga ikut membantu dalam pencarian dengan turun langsung ke lapangan membantu dalam menangani bencana yang terjadi” (05 September 2017)

Sedangkan warga lainnya M. Tasli yang diwawancarai sebagai berikut;

“saya terlibat melaksanakan BPBD waktu ada kebakaran bencana di daerah sini kemaren pernah jadi saya ikut terlibat ikut memadam juga disitu sama yang masyarakat sini lah sama-sama memadamkan api gitu aja bu.. kadang kalau ada api saya informasikan saya hubungi-hubungi mereka yang punya nomer hp disaya lah bahwa disitu ada tempat ini titik api saya memberikan informasi yang lain lah..” (30 Agustus 2017)

Dukungan masyarakat dan komponen lainnya sudah pula dijabarkan pada hasil penilaian kapasitas sebelumnya, yang menunjukkan dukungan masyarakat, peran aktif dan keterlibatan, tingkat kepercayaan hingga program keberlanjutan.

Namun berbeda dengan pendukung kerja BPBD secara eksternal, pendukung Kapasitas BPBD secara internal BPBD terkait dengan bagaimana

BPBD dapat mencapai Visi dan Misi, dan mampu mencapai tujuan yang diinginkan, ini bisa dikatakan sebagai modal dasar dalam pengelolaan sumberdaya, telah ditelaah berdasarkan penjelasan dan wawancara narasumber penelitian dikategorikan dalam empat hal berikut :

#### 1. Kesamaan Nilai dan Budaya

Sistem kekeluargaan dan nilai relawan, menjadi dasar para personil BPBD menjalankan tugas dan fungsinya, kesepahaman ini menjadi pengikat erat, dan modal dasar utama dalam bekerja demi pencapaian tujuan.

Ditegaskan dalam wawancara Kalak BPBD seperti berikut :

‘kalo SOP itu kita sudah punya tinggal bagaimana penerapannya, hanya yang menjadi kendala adalah disiplin personil, itu yang terkadang menjadi kendala dalam penanganan ketika untuk jaga di posko yang seharusnya mempunyai tugas jaga di posko ia tidak dilakukan, tapi kalau terjadi kebencanaan kita memiliki komitmen yang sama bahwa kebencanaan harus segera diatasi, demikian.’ (09 September 2017)

#### 2. Komitmen bersama yang tinggi akan pelaksanaan kerja,

Kinerja bidang-bidang teknis dalam BPBD dikatakan cukup baik, dimana masing-masing bidang menjalankan tugas pokok dan fungsi beserta uraian tugasnya seoptimal mungkin, pelaksanaan kerja dilapangan, kemauan untuk terus belajar, kebersamaan dalam penanggulangan bencana menjadi hal yang paling utama dalam bekerja, disampaikan oleh Kepala pelaksana BPBD bahwa

‘...kemudian kinerja bidang-bidang terkait sampai saat ini sangat bagus walaupun terbatas seperti yg disampaikan di awal kapasitas kita untuk pelatihan kompetensi juga terbatas namun semangat dan kemampuan untuk belajar, peningkatan kemampuan itu dilakukan oleh masing-masing bidang dan masing-masing personil’ (09 September 2017)

Selain itu disampaikan pula oleh Kasi Pencegahan bahwa pencegahan dan kesiapsiagaan para personil dalam menangani bencana saat darurat sangat baik.

“kita memiliki tim TRC yang akan turun pertama kali saat kejadian bencana, dan tim inilah yang pertama-tama akan hadir di tempat bencana, baru kemudian tim ini lapor ke posko jaga dan atau ke kantor, buat kasih tau bagaimana dan seperti apa kondisi lapangan, setelah itu barulah kita bersama-sama turun menangani bencana. Kalo bencananya besar maka hampir semua personil kita kerahkan kesana, bahkan kita juga minta bantu dari pihak-pihak lainnya. (02 Agustus 2017)

### 3. Kepemimpinan yang kondusif

Disampaikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi bahwa pemimpin yang ada sekarang (Kepala Pelaksana BPBD) mampu mengayomi dan berperan sangat aktif dalam membina para staf di instansi

“yang menjadi kekuatan dari BPBD kemampuan pemimpin inilah yang diharapkan bisa menempatkan personil sesuai kemampuan dan tahun pertahun sudah bisa kita rasakan bahwa proses ini cukup mampu oleh pimpinan ini kepala pelaksana menempatkan personel-personel yang memang sudah ditempatkan melalui pembimbingan pembinaan baik itu untuk level estelon 3 estelon 4 dan staff itu sudah bisa dipegang pimpinan sehingga mereka akhirnya mampu untuk mencapai dari pada kinerjanya ini bisa tercapai memang ada beberapa hal yang tidak tercapai tapi sebagian besar sudah mampu kita ditanggulangi sendiri oleh organisasi kemudian berkaitan dengan manajemen organisasi berkaitan dengan sdm kemudian berkopetensi tetap organisasi eselon di BPBD selama ini sudah melaksanakan itu” (04 Agustus 2017)

### 4. Koordinasi yang efektif

Koordinasi yang efektif ditunjukkan dari lancarnya arus komunikasi, dikarenakan media informasi yang cukup membantu dalam mengkomunikasikan kejadian bencana, bahkan informasi dan laporan dari para pihak terkait.

Secara internal, koordinasi yang efektif ditunjukkan dengan adanya pertemuan, briefing, meeting dan rapat-rapat internal untuk memutuskan sesuatu atau pun menyelesaikan masalah.

Hal ini terlihat sangat efektif, jika dihubungkan dengan tingkat konflik, dilihat bahwa konflik internal BPBD sangat minim atau sangat jarang ditemukan..

Penerapan koordinasi contohnya dilakukan pada saat penilaian maupun penetapan keputusan atau masalah terkait dengan rencana dan misi strategis seperti yang disampaikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, bahwa

“Dalam melaksanakan penataan SDM di dalam maupun fungsi dari personilnya berkaitan implementasi strategis tentunya kita sudah mempunyai pembinaan dan koordinasi melalui rapat-rapat terbatas baik bidang maupun keseluruhan kita rapatkan personil dari BPBD. Jadi dalam hal mengimplementasikan isu strategis itu sudah kita koordinasikan secara bersama kepala pelaksana kepala bidang maupun staf itu kita pertemukan dalam rapat bersama. Sejak berjalannya BPBD pada 2014 itu kita masing bidang dan kepala pelaksana melakukan mengevaluasi seluruh personil kita layaknya dimana, kita evaluasi kemampuan dia, sampai dimana intelektual dalam hal kebencanaan dan hasil dari penilaian tersebut kita koordinasikan bersama kembali baik di masing-masing bidang maupun di level kepala pelaksana’ (04 Agustus 2017)

#### **b. Faktor Penghambat**

Berdasarkan telaahan dokumen Renstra BPBD Kotawaringin Barat dinyatakan bahwa yang teridentifikasi sebagai kelemahan dan ancaman BPBD Kotawaringin Barat adalah :

1. Tingginya tingkat ancaman risiko bencana Kabupaten Kotawaringin Barat  
Skor Indeks Kerawanan Bencana menurut data BNPB tahun 2014 sebesar 144 = Tinggi

Hal ini dinyatakan dalam Indeks Risiko Bencana Indonesia tahun 2014 yang diterbitkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam dokumen Rencana Strategis BNPB.

2. Penanggulangan bencana belum terkoordinir secara terpadu dan terencana;

Jika dikatakan belum terkoordinir, hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa penanggulangan bencana sudah memiliki koordinasi yang cukup di sebagian lini, hanya saja perencanaan yang sinergis antar lembaga/instansi baik swasta maupun pemerintahan dan masyarakat masih dilakukan parsial, program dan kerja di lakukan masing-masing lembaga sesuai perencanaan kerja masing-masing, dinyatakan pada hasil wawancara bersama Kepolisian Resort Kotawaringin Barat

“Peranan instansi Polres Kotawaringin Barat dalam Penanggulangan Bencana berperan sebagai preventive repesive dan penegakan hukum, kemudian untuk keterkaitan instansi kami dalam hal ini sebagai penanggulangan bencana baik secara langsung ataupun tidak langsung, yang langsung ini ketika ada melaksanakan penanganan titik api, tidak langsung ini seperti contohnya baik itu upaya preventif maupun premetif, namun tetap kita laksanakan langsung dari kepolisian sendiri mungkin ada juga yang berkerja sama dengan instansi terkait apabila mungkin ada undangan maupun bersama-sama dengan instansi terkait BPBD Kodim maupun MA yang selama ini sudah dilakukan” (29 Agustus 2017)

Dan Kepala Manggala Agni DAOPS III Kalimantan Tengah menyampaikan bahwa

“Manggala Agni pada dasarnya berada di bawah kementrian KLH dalam hal ini UPTnya adalah Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan di wilayah Kalimantan dimana manggala agni salah satu tupoksinya adalah penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, dan di manggala agni itu ada beberapa kegiatan utama :

(a) Yang pertama adalah kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan itu sendiri (b) Yang kedua melakukan pemadaman bencana kebakaran itu sendiri (c) Yang ketiga adlh penanganan setelah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Keterlibatan dalam penanggulangan bencana yang pertama kita juga terlibat dalam kegiatan pencegahan baik itu sosialisasi di masyarakat, dan juga melakukan pelatihan-pelatihan kepada desa-desa ataupun juga desa-desa binaan dari MA berupa MPA maupun desa dari BPBD, kita juga melakukan pelatihan-pelatihan pada pelaku-pelaku usaha seperti juga perusahaan-perusahaan yang memiliki wilayah konsesi baik itu perusahaan perkebunan kelapa sawit perusahaan HTI, atau IUPHH yang ada di Kab. Kotawaringin Barat itu semua adalah kegiatan-kegiatan yang kita lakukan” (21 Agustus 2017)

3. Kapasitas aparatur penanggulangan bencana masih belum memadai;

Kapasitas yang belum memadai, dimaksudkan sebagai latar belakang keahlian dan kompetensi aparatur yang masih belum sesuai, menurut Kalak BPBD dalam wawancaranya disampaikan bahwa :

“saat ini kita kekurangan tenaga-tenaga ahli yang ada di bidang seperti Manajemen peralatan dan logistik kita hanya belajar bagaimana manajemen itu” (09 September 2017)

Selain itu dapat dilihat selain jumlah personil yang kurang, latar belakang pendidikan aparatur masih sangat terbatas, terlebih lagi jika dikaitkan pada profesionalitas yang berbasis kebencanaan.

4. Belum tersedianya kajian-kajian untuk pengurangan risiko bencana

5. Belum tersedianya analisis risiko bencana hingga peta risiko bencana, poin 4 dan 5 adalah satuan kebijakan yang menjadi dasar dalam penanggulangan bencana, jika dokumen perencanaan termasuk kajian detil kebencanaan Kabupaten Kotawaringin Barat, saat ini belum dibuat.

BPBD Kotawaringin Barat memiliki dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang berakhir masa berlakunya pada tahun ini, sehingga perlu ditelaah ulang/direvisi dan direncanakan kembali.

Berdasarkan ceklis dokumen memang belum ditemukan Rencana Pengurangan Risiko Bencana, Rencana Kontijensi dan Rencana Aksi yang menjadi pedoman umum pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Hampir mirip dengan kelemahan dan ancaman pada BPBD Kotawaringin Barat berdasarkan Renstra, penghambat Kapasitas BPBD secara internal BPBD terkait dengan bagaimana BPBD dapat mencapai Visi dan Misi, dan mampu mencapai tujuan yang diinginkan, ini bisa dikatakan sebagai modal dasar dalam pengelolaan sumberdaya, dilihat oleh penulis seperti :

1. Keterbatasan sumberdaya

Keterbatasan sumberdaya meliputi sumberdaya keuangan, personil, sarana dan prasarana.

Seperti disampaikan Kepala Pelaksana BPBD bahwa :

“saat ini kita kekurangan tenaga-tenaga ahli yang ada di bidang seperti Manajemen peralatan dan logistik kita hanya belajar bagaimana manajemen itu” (09 September 2017)

Bahkan hal tersebut ditegaskan pula oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi bahwa kemampuan individu yang sesuai dengan tugas dan fungsinya diperlukan dalam penanganan kebencanaan.

“Kemampuan individu ini yang harus perlu di pertimbangkan dalam hal penanganan di BPBD jadi dalam kewenangan itu yang perlu prakteknya pun tentunya selama ini yaitu terkendala kemampuan individu aturan sudah dibuat tupoksi sudah dibuat uraian tugas sudah dibuat tapi kemampuan individu karena dia basicnya bukan ahli dalam hal kebencanaan maupun tidak memiliki jiwa relawan ini yang perlu prioritas di penanggulangan bencana jiwa relawan itu kuncinya nah itu yang menjadi bagaimana organisasi itu berjalan baik jadi bagaimana individunya kemampuan individu yang menjadi dasar pendukung daripada tugas masing-masing “ (04 Agustus 2017)

2. Regulasi yang belum menyeluruh, regulasi yang belum lengkap dapat dilihat dari tabel ceklis poin dokumen aturan yang dimiliki bidang berdasarkan pada tingkat kebutuhan aturan pelaksanaan di lapangan, terlihat bahwa BPBD hanya masih mengacu pada aturan pusat yaitu kementerian dalam negeri dan BNPB, sedangkan BPBD sendiri belum memiliki aturan sendiri yang di desain dan dibuat berdasarkan kebutuhan dan lokalitas.

Selain itu hal ini dijelaskan pula dalam wawancara bersama Sekretaris BPBD saat ditanyakan tentang aturan baku, ataupun aturan main organisasi, disampaikan bahwa :

“Yang pertama perlu kita ketahui, operasional BPBD Kotawaringin Barat itu mulai 1 januari 2014, nah dari segi perencanaan memang disana sini kita masih mencari bentuk daripada rencana jangka panjang... secara manajemen perencanaan, kita sudah menyusun tapi itu kita sudah masuk tahun ketiga ini, untuk renstra kita memang banyak kekurangannya (08 Agustus 2017)

Aturan baku yang belum menyeluruh juga disampaikan oleh pernyataan Kepala Seksi Rehabilitasi pada saat ditanyakan tentang aturan baku pengelolaan informasi dalam instansi, dinyatakan bahwa :

“Secara baku, standar operasional prosedur pengelolaan informasi memang belum dibuat oleh BPBD” (04 Agustus 2017)



Selain itu saat ini aturan baku yang dibuat pemerintah daerah tentang kebencanaan pun hanya dua, sehingga aturan-aturan yang digunakan oleh BPBD Kotawaringin Barat lebih banyak aturan Perka BNPB, Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang yang pada kenyataannya adalah aturan-aturan umum yang menyeluruh, sehingga seharusnya BPBD atau minimal Pemerintah Daerah duduk bersama untuk merumuskan regulasi kebencanaan sehingga dapat diterapkan dengan optimal.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kotawaringin Barat dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan**

Milen (2006) mendefinisikan kapasitas sebagai kemampuan individu, organisasi atau sistem untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya secara efektif efisien dan terus menerus sedangkan Morgan merumuskan pengertian kapasitas sebagai kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumberdaya dan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap individu, organisasi, jaringan kerja/sector dan sistem yang lebih luas untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu (Milen, 2006).

Kapasitas pada level lembaga/organisasi/instansi menunjukkan kebijakan internal, sistem dan strategi, prosedur dan kerangka kerja yang membuat organisasi mampu menjalankan perannya dengan baik, bekerja sistematis, efektif dan efisien dalam secara bersama dalam seluruh komponen dalam rangka

pencapaian tujuan. Kapasitas organisasi termasuk di dalamnya kepemimpinan, kemampuan bekerjasama/partnership, kemampuan mengelola konflik dan perubahan, bahkan mampu beradaptasi dengan perkembangan dan memperbaiki diri. Kapasitas BPBD Kotawaringin Barat dalam penanggulangan kebakaran lahan dan hutan lebih ditekankan pada kapasitas inti internal organisasi dan kapasitas fungsional terkait dengan pelaksanaan fungsi BPBD sebagai koordinator, komando dan pelaksana, dan hal tersebut dihubungkan dengan tiga fase/tahapan dalam penanggulangan bencana yaitu tahap pencegahan dan kesiapsiagaan, tahap penanganan darurat (pemadaman api) dan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi (pemulihan pasca kebakaran)

#### **A. Pencegahan dan Kesiapsiagaan**

Pencegahan adalah fase penanggulangan bencana pada tahapan prabencana, dimana kondisi normal tidak terjadi bencana, sedangkan kesiapsiagaan adalah fase penanggulangan bencana dimana terdapat potensi bencana yang siap menjadi bencana kapan saja. Menurut UU No. 24 tahun 2007 dan dijabarkan dalam PP no. 21 tahun 2008 serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana, sedangkan kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

Kegiatan pencegahan kebakaran lahan dan hutan meliputi pemetaan risiko, identifikasi daerah rawan kebakaran dan menuangkannya dalam peta rawan bencana, penyusunan rencana strategis penanggulangan bencana termasuk di dalamnya rencana kontigensi dan rencana aksi penanggulangan kebakaran lahan dan hutan, serta penguatan ketahanan sosial masyarakat termasuk peningkatan kapasitasnya. Sedangkan kegiatan kesiapsiagaan secara umum lebih pada bagaimana menguatkan masyarakat untuk siap dan mampu menyelamatkan dirinya untuk terhindar dari bahaya bencana, dan kegiatan yang dilaksanakan dalam fase ini adalah penyediaan dan penyiapan sarana dan prasarana evakuasi, penyusunan SOP tanggap darurat, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini, ujicoba model dan sistem penanggulangan kedaruratan termasuk simulasi penanggulangan bencana. Namun berbeda dengan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, karena tipikal bencana yang khusus, dengan tidak adanya kegiatan evakuasi korban bencana maka kesiapsiagaan lebih pada penyiapan sarana prasarana penanganan darurat termasuk peralatan pemadaman dan inventarisir kemampuan dari semua lini, pengaktifan patroli, pengaktifan satgas, pembentukan tim reaksi cepat/satuan reaksi cepat, penyusunan struktur organisasi penanggulangan kebakaran lahan dan hutan.

Istilah yang berbeda tentang kebakaran lahan dan hutan berdasarkan aturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan no. p.32/menLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan, Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla adalah suatu peristiwa

terbakarnya hutan dan/atau lahan, baik secara alami maupun perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik, dalam aturan yang sama disebutkan pula bahwa pencegahan karhutla adalah semua usaha tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan.

Pada BPBD Kotawaringin Barat, fase pencegahan dan kesiapsiagaan menjadi kewenangan dan tanggungjawab Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, beberapa kegiatan yang dilaksanakan bidang mencakup sosialisasi dan penyuluhan kebakaran lahan dan hutan, iklan masyarakat tentang bahaya kebakaran lahan dan hutan pada Media TV LSokal, pemasangan spanduk, pengaktifan patroli siaga, hingga simulasi pemadaman api. Jika ditinjau berdasarkan implementasi enam komponen penilaian kapasitas yaitu orientasi organisasi, tata kepengurusan, manajemen organisasi, manajemen program, keberlanjutan, dan kinerja organisasi, kapasitas fungsional dalam fase/tahapan dinilai Cukup. Nilai cukup untuk kapasitas penyelenggaraan bencana dalam fase ini menggambarkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan sudah pada taraf koordinasi yang terstruktur, namun belum dalam kerangka kebijakan yang menyeluruh. Jika digambarkan dalam sebuah bagan tentang kapasitas pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan kebakaran lahan dan hutan seperti pada gambar 4.8.



**Gambar 4.8** Gambaran Nilai Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan

Gambar 4.8 dibuat dalam sebuah lingkaran yang menunjukkan keterkaitan antar komponen dan keenam komponen tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Komponen orientasi organisasi dan komponen tata kelola dikategorikan bernilai cukup, karena bidang pencegahan dan kesiapsiagaan telah memiliki struktur yang jelas dan pembagian wewenang yang lengkap, dengan tugas pokok fungsi yang di jabarkan dalam uraian tugas secara jelas, namun dalam pelaksanaannya, dalam komponen manajemen organisasi dan manajemen program bernilai kurang, dikategorikan kurang karena jumlah personil bidang yang kurang lengkap, yaitu 1 kepala bidang, 2 kepala seksi dan 1 staff hal ini menunjukkan piramida terbalik dimana pemimpin lebih banyak dari pada yang

dipimpin, sehingga terjadi ketimpangan pelaksanaan kerja dan kesulitan dalam menjalankan bidang secara sehat.

Namun komponen keberlanjutan dan kinerja bernilai cukup, hal ini ditemukan bahwa bidang ini memiliki cukup banyak kerja yang berkesinambungan dan melibatkan banyak stakeholder, dimana peran koordinasi juga dipegang oleh bidang pencegahan dan kesiapsiagaan. Hal tersebut ditunjukkan pada hasil penelitian, bahwa program pencegahan kebakaran lahan dan hutan, dalam prakteknya telah dikerjakan dengan baik terdapat struktur pengendalian, koordinasi yang baik lintas sektor namun yang menjadi kekurangan dalam fase ini adalah pada standar baku kebijakan dimana belum ditemukan rencana kontijensi, rencana aksi, prosedur baku operasional atau standar operasional prosedur masih belum ditetapkan.

#### **B. Penanganan Darurat**

Berdasarkan PP no 21 tahun 2008 secara umum penanganan darurat atau lebih dikenal dengan istilah tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan segera sarana dan prasarana. Menurut PermenLHK no. p.32/menLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 Pemadaman karhutla adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan atau mematikan api yang membakar hutan dan/atau lahan.

Evakuasi pada penanganan darurat kebakaran lahan dan hutan lebih pada penyelamatan tumbuhan dan satwa serta aset publik.

Pada BPBD Kotawaringin Barat, penanganan darurat atau tanggap darurat menjadi kewenangan dan tanggungjawab Bidang Kedaruratan dan Logistik. Pada bencana kebakaran lahan dan hutan, penanganan darurat adalah tahapan yang menjadi titik berat penanggulangan bencana, karena disinilah diperlukan kerjasama, koordinasi, keahlian, sarana prasarana lengkap hingga pendanaan yang cukup.

Kapasitas lembaga/instansi/organisasi menjadi poin penting dalam penyelenggaraan pada fase ini. Dalam penanganan darurat komponen kapasitas terpenting adalah Tata Kepengurusan dan Manajemen Organisasi yang menyangkut pembagian kekuasaan/wewenang, fungsi dan tugas pokok, mekanisme pengambilan keputusan hingga mekanisme transparansi dan akuntabilitas, manajemen sumberdaya manusia, manajemen informasi, manajemen keuangan, manajemen peralatan dan logistik, hingga mekanisme pengelolaan dan penyelesaian konflik. Dalam tataran fungsi koordinasi penanggulangan bencana kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Kotawaringin Barat tidak dilakukan sendiri oleh BPBD namun dilaksanakan secara tim lintas sektoral seperti pada struktur satgas struktur satuan tugas pos komando penanganan siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di kabupaten kotawaringin barat tahun 2017 sehingga kapasitas lembaga sebagai koordinator tentunya merupakan modal yang sangat penting.

Berdasar pada 6 komponen penilaian kapasitas yaitu yaitu orientasi organisasi, tata kepengurusan, manajemen organisasi, manajemen program, keberlanjutan, dan kinerja organisasi, kapasitas BPBD dalam fase Penanganan Darurat dinilai Cukup. Jika digambarkan dalam sebuah bagan tentang kapasitas penanganan darurat penanggulangan kebakaran lahan dan hutan seperti pada gambar 4.9. Gambar 4.9 dibuat dalam sebuah lingkaran yang menunjukkan keterkaitan antar komponen dan keenam komponen tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan.



**Gambar 4.9** Gambaran Nilai Kapasitas Penanganan Darurat dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan

Gambar 4.9 menunjukkan komponen orientasi organisasi, dan tata kepengurusan bernilai cukup karena hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa telah ada visi, misi tujuan dan program yang dirumuskan walaupun tidak menyeluruh



namun telah diteapkan dengan baik, seperti mobilisasi peralatan dan logistik di lapangan, yang sayangnya belum memiliki SOP yang lengkap.

Nilai komponen tata kepengurusan pun berada pada level cukup, hal ini dikarenakan bidang kedaruratan dan logistik memiliki tugas pokok fungsi dan tujuan yang sangat jelas, yang sayangnya dalam pelaksanaannya masih belum dijalankan dengan lengkap dan menyeluruh. Nilai komponen manajemen program dan keberlanjutan berada pada level kurang, hal ini dikarenakan temuan di lapangan menunjukkan bahwa beberapa fungsi kerja manajemen dikerjakan oleh bidang lain, dan tidak ditangani langsung oleh bidang kedaruratan dan logistik. Dalam hal manajemen sumberdaya manusia, Bidang kedaruratan dan logistik sebagai penanggung jawab pelaksanaan tanggap darurat/penanganan darurat memiliki personil yang lebih lengkap di bandingkan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan yaitu 1 kepala bidang 2 kepala seksi dan 3 staff tapi kompetensi keahlian para personil di bidang ini dapat dikatakan tidak sesuai. Dan terkait pula dengan keberlanjutan, khususnya kaderisasi dan regenerasi bisa dikatakan sangat kurang.

### **C. Rehabilitasi dan Rekonstruksi**

Menurut PermenLHK no.p.32/menLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 Penanganan pasca karhutla adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang meliputi inventarisasi, monitoring, dan koordinasi dalam rangka menangani hutan dan/atau lahan setelah terbakar. Pada BPBD Kotawaringin Barat, penanganan pasca bencana menjadi kewenangan dan tanggungjawab Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi,

berdasar pada 6 komponen penilaian Kapasitas yaitu yaitu orientasi organisasi, tata kepengurusan, manajemen organisasi, manajemen program, keberlanjutan, dan kinerja organisasi kapasitas BPBD dalam fase Rehabilitasi dan Rekonstruksi tidak dapat dikategorikan hingga penulis menggambarkannya pada level kurang, karena BPBD secara umum belum melaksanakan Rehabilitasi dan/atau Rekonstruksi pasca kebakaran lahan dan hutan. Jika digambarkan dalam sebuah bagan tentang kapasitas rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan kebakaran lahan dan hutan seperti pada gambar 4.10. Gambar 4.10 dibuat dalam sebuah lingkaran yang menunjukkan keterkaitan antar komponen dan keenam komponen tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan.



**Gambar 4.10** Gambaran Nilai Kapasitas Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan

Kapasitas rehabilitasi dan rekonstruksi bernilai kurang, karena hasil temuan menunjukkan bahwa belum ada kegiatan pemulihan pasca kebakaran

lahan dan hutan yang dilaksanakan oleh BPBD Kotawaringin Barat secara nyata, memang telah ada sistem nilai yang dianut, visi misi dan tujuan yang dibuat, kewenangan, tugas pokok dan fungsi, sayangnya terkait dengan bencana kebakaran lahan dan hutan, semua itu belum dilaksanakan. Poin paling penting dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi adalah mengembalikan kondisi areal terdampak bencana kembali seperti sedia kala atau bahkan lebih baik, dan hal tersebut dapat dikerjakan jika perencanaan untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi sudah dibuat. BPBD Kotawaringin Barat belum memiliki rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi khusus bencana kebakaran lahan dan hutan, dan belum pernah mengkaji kebutuhan pemulihan pasca kebakaran. Yang selama ini dilakukan hanyalah pengukuran luasan areal terbakar.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah tahapan yang menyeluruh dari ketiga fase tersebut dan merupakan siklus jangka panjang dalam manajemen pengelolaan kebencanaan, hal tersebut menjelaskan bahwa fungsi masing-masing bidang dan fungsi penyelenggaraan bencana tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Keseluruhan fungsi tersebut berada dalam satu kesatuan walaupun penilaian dilakukan per tahapan penyelenggaraan. Secara keseluruhan kapasitas BPBD dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana kebakaran lahan dan hutan dapat dikatakan cukup, yang artinya Penyelenggaraan penanggulangan sampai pada taraf koordinasi yang terstruktur, pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat,

rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dalam kerangka kebijakan yang belum menyeluruh.

Seperti telah dijabarkan dalam pembahasan bahwa kekurangan-kekurangan yang terjadi lebih disebabkan karena usia instansi ini yang belum cukup matang, dengan pengalaman masing-masing individu dalam penanganan bencana bisa dikatakan masih sangat minim. Sehingga selanjutnya perbaikan-perbaikan, peningkatan dan pengembangan kapasitas sangat diperlukan.

## **2. Faktor Pendukung dan Penghambat Kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan**

Faktor-faktor yang berpengaruh pada kapasitas lembaga menurut Supardal dan Santoso (2004) adalah 1) tujuan atau nilai yang beda 2) adanya aturan main 3) komitmen moral dan etos 4) kepemimpinan 5) organisasi sebagai wadah operasional 6) sarana dan prasarana.

Dalam penelitian ini ditemukan faktor pendukung dan penghambat kapasitas instansi BPBD yang dijabarkan sebagai berikut :

### **A. Faktor pendukung**

Berdasarkan pada hasil temuan di lapangan, dapat dibandingkan dua telaahan tentang faktor pendukung kapasitas penanggulangan bencana di BPBD yang membandingkan antara dokumen renstra dan hasil wawancara, yang secara terpisah menjadi faktor pendukung eksternal dan faktor pendukung internal organisasi.

Faktor pendukung eksternal organisasi adalah :

1. Adanya Komitmen pemerintah dalam pendanaan dan sarpras,

Sarana dan Prasarana merupakan komponen penting dalam organisasi, sesuai fungsinya sarana dan prasarana adalah *tools* untuk mempermudah pelaksanaan pekerjaan, mempercepat pelaksanaan pekerjaan, dan meningkatkan produktifitas. Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sarana dan prasarana sangat dibutuhkan untuk mengatasi kondisi darurat bencana.

BPBD Kotawaringin Barat menerima peralatan pendukung pelaksanaan kerja, baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, dan juga pengadaan barang menggunakan dana pemerintah daerah kabupaten.

Adanya komitmen pemerintah baik kementerian lembaga, dan provinsi dalam mendanai pengadaan sarpras menjadi dukungan penting. Namun dalam pelaksanaannya komitmen ini memerlukan proses yang panjang, sehingga terlihat menjadi dukungan semu dalam pelaksanaan kerja dilapangan.

2. Tingginya tingkat kepedulian para pihak akan bencana melalui dukungan sumberdaya, sumber daya utama yang tersedia dari pihak lain adalah sumber daya personil.
3. Tingginya tingkat kepedulian masyarakat terhadap korban bencana
4. Tingginya kepedulian masyarakat untuk membantu penanganan bencana
5. Tingginya kepercayaan masyarakat pada instansi

Poin 2, 3, 4 dan 5 menunjukkan kepercayaan dan kepedulian dari masyarakat, baik kalangan masyarakat umum, dunia usaha, lembaga pemerintahan lainnya diluar BPBD. Tingkat kepedulian menunjukkan simpati dan empati atas para korban bencana. Masyarakat bukan hanya relawan namun juga secara umum, sangat mudah memberikan bantuan dan pertolongan bagi korban, baik diminta mupun secara sukarela.

Berdasarkan penelaahan dapat dirangkum hal-hal yang menjadi faktor penghambat eksternal adalah :

1. Adanya komitmen pemerintah dalam pendanaan dan peningkatan sarana prasarana penanggulangan bencana
2. Tingginya tingkat kepedulian para pihak dalam penanggulangan bencana
3. Tingginya kepercayaan masyarakat pada instansi

Hal positif internal yang mendukung kapasitas lembaga dijabarkan dalam uraian berikut :

#### 1. Kesamaan Nilai dan Budaya

Kesamaan nilai dan budaya akan membentuk persepsi dan pemahaman yang hampir mirip, persepsi yang sama akan menjadi modal bagi organisasi yang bergerak secara sinergis dan harmonis, pergerakan inilah yang akan membuat pelaksanaan kerja, pencapaian tujuan manajemen organisasi, tata kepengurusan, keberlanjutan dapat berjalan dengan baik. Supardal dan Santoso (2004) berpendapat bahwa jika jajaran aparat pemerintah daerah yang jumlahnya begitu banyak memiliki persepsi sendiri tentang apa yang mereka lihat dan salah

memahami apa yang mereka lihat, maka apapun yang dilakukan dapat menimbulkan kesalahan langkah yang ditempuh bahkan menghambat pencapaian visi dan misi.

Budaya Organisasi menurut Robbins (2001) dan Luthans (1998) dalam Asri L. Riani (2011) berfungsi sebagai identitas tiap organisasi (*sence of identity*), merajut sebuah komitmen untuk mencapai tujuan bersama, pemersatu antara anggota organisasi, dan sebagai arah kendali untuk membentuk perilaku anggota organisasi. Di BPBD Kotawaringin Barat, budaya kerja bersemangat relawan, membentuk sikap siap turun tangan dan bekerja keras dalam menangani darurat bencana seperti yang telah dipaparkan pada hasil penelitian.

Menurut Indrawijaya (1989) budaya kerja yang efektif akan membuat hubungan kerja yang baik, komunikasi yang lebih terbuka, rasa kebersamaan dan rasa turut memiliki serta tanggung jawab sehingga koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi akan mudah dijalankan. Dukungan kesamaan nilai dan budaya kerja terlihat pada BPBD Kotawaringin Barat, yang telah dijabarkan sebelumnya pada hasil penelitian, temuan di lapangan semangat relawan menjadi bagian kerja dalam penanggulangan bencana, nilai ini membuat kerja para personil menjadi lebih lancar, yang terlihat dalam kesigapan menanggapi informasi bencana.

## 2. Komitmen bersama yang tinggi akan pelaksanaan kerja

Komitmen bersama merupakan modal dasar yang harus dipegang teguh oleh seluruh komponen yang terlibat dalam organisasi, komitmen menjadi dasar

dari keseluruhan rancangan kegiatan yang akan dikerjakan organisasi, komitmen bersama yang tinggi memperlancar kerja organisasi.

Kapasitas yang kuat ditandai dengan komitmen jangka panjang dari semua pihak yang terlibat, terutama internal instansi. Komitmen bersama adalah modal dasar yang harus terus menerus ditumbuhkembangkan dan dipelihara dengan baik, komitmen ini meliputi seluruh komponen yang ada dalam organisasi, tanpa adanya komitmen baik dari level pimpinan hingga para pegawai sangatlah mustahil tujuan, misi dan visi organisasi dapat dicapai.

Komitmen bersama para personil BPBD terlihat saat BPBD memiliki tugas atau kerja, yang berhubungan dengan pihak luar. Pada saat pekerjaan dilaksanakan seluruh personil meleburkan dirinya menjadi satu nama BPBD Kotawaringin Barat tanpa lagi memiliki egosentris kebidangan. Antar bidang saling membantu, hal ini dilaksanakan bukan hanya pada saat menangani kondisi darurat namun hampir di semua kegiatan.

### 3. Kepemimpinan yang kondusif

Menurut Warsito dan Yuwono (2003) dalam konteks lingkungan organisasi publik, kepemimpinan yang dinamis diperlukan untuk mengatasi tantangan ke depan yang semakin kompleks dan realitas keterbatasan sumberdaya yang dimiliki sektor publik. Kepemimpinan yang kondusif membuka kesempatan yang luas bagi setiap elemen organisasi untuk menyelenggarakan pengembangan kapasitas.



Kepemimpinan adalah salah satu faktor yang memiliki pengaruh terhadap penyelenggaraan pengembangan kapasitas individu/personal dalam lembaga/instansi karena pemimpin adalah orang yang memiliki andil besar dalam usaha membawa pegawainya kearah kemajuan.

Selain itu dukungan aktif dan keterlibatan pimpinan dalam proses manajerial operasional merupakan syarat penting dalam keharmonisan dan kesinergisan pelaksanaan program dan kegiatan instansi, pimpinan yang efektif mampu menjadi teladan dan menularkan kebiasaan-kebiasaan positif kepada pegawai, mampu memberdayakan staf serta mendorong tumbuhnya daya kreasi dan inovasi.

Pemimpin yang efektif juga mampu mendorong pegawai untuk memberikan kontribusi terbaiknya bagi pencapaian visi, misi dan tujuan instansi. Hasil penelitian pada BPBD Kotawaringin Barat menunjukkan bahwa secara berjenjang, praktek kepemimpinan efektif telah dijalankan dengan baik, adanya komitmen keseluruhan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangan, kewajiban dan hak. Hampir semua informan utaman (internal BPBD) menyampaikan bahwa pimpinan mampu menggerakkan personil dengan baik, mampu melakukan control dan pengawasan, namun jawaban para informan tidak menunjukkan secara spesifik upaya-upaya khusus dan sistematis yang dilakukan oleh pimpinan untuk memotivasi dan memberdayakan pegawai dalam meningkatkan kapasitasnya.

#### 4. Koordinasi yang efektif

Koordinasi dapat diartikan sebagai proses mempersatukan sumbangan-sumbangan dari banyak pihak, dan sumber-sumber lainnya demi mencapai maksud-maksud yang telah ditetapkan. Koordinasi dilaksanakan demi mewujudkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan.

Koordinasi yang efektif membantu manajer untuk menintegrasikan bagian-bagian yang terpisah menjadi satu kekuatan untuk mencapai tujuan bersama dengan keterbatasan sumberdaya. Koordinasi merupakan salah satu fungsi pokok manajemen dan selalu diperlukan dalam sebuah organisasi, terlebih lagi organisasi yang besar dan kompleks seperti kelembagaan pemerintah daerah. Tujuan diadakannya koordinasi adalah untuk penyatupaduan gerak dari seluruh potensi unit-unit organisasi yang berbeda fungsi agar benar-benar mengarah pada sasaran yang sama guna memudahkan pencapaian tujuan organisasi dengan efisien (Nugraha, 2004). Koordinasi yang efektif telah tercipta di BPBD Kotawaringin Barat dan hal ini mendukung kapasitas lembaga. Teknologi dan informasi memudahkan koordinasi, penggunaan telepon seluler sehingga tanpa duduk bersama dalam ruangan rapat khusus banyak hal bisa disambungkan dengan saling memberi informasi. Adanya grup *whatsapp* dalam link internal instansi dan link eksternal sangat memudahkan.

Koordinasi yang efektif ini yang memudahkan BPBD untuk bergerak menangani bencana khususnya dalam fase penanganan darurat. Koordinasi yang efektif dalam penanggulangan bencana kebakaran lahan dan hutan ditunjukan

pada saat penanganan darurat, dimana kinerja penanganan darurat bencana baik di lapangan, koordinasi yang efektif juga ditunjukkan saat penyebaran informasi yang sangat singkat lintas instansi sehingga waktu tanggap atas kejadian kebakaran lahan dan hutan menjadi lebih singkat.

## **B. Faktor penghambat**

Berdasarkan pada hasil temuan di lapangan, dapat dibandingkan dua telaahan tentang faktor penghambat kapasitas penanggulangan bencana di BPBD Kotawaringin Barat berdasarkan hasil wawancara dan hasil dokumentasi dari dokumen rencana strategis BPBD Kotawaringin Barat dapat dibandingkan secara terpisah antara faktor penghambat eksternal dan faktor penghambat internal organisasi.

Menurut dokumen rencana strategis BPBD Kotawaringin Barat yang menjadi faktor penghambat adalah :

1. **Tingginya tingkat ancaman risiko bencana Kabupaten Kotawaringin Barat**

Kabupaten kotawaringin barat berdasarkan indeks Risiko bencana tahun 2013 menempati posisi 161 dari 329 Kabupaten/Kota dengan nilai 144 yang berada dalam kategori tinggi. Kategori tinggi ini menunjukkan bahwa ancaman bencana bernilai tinggi, nilai kerentanan tinggi dan kapasitas yang kurang, sesuai dengan prinsip penghitungan risiko bahwa risiko bencana adalah ancaman bencana dikalikan kerentanan dan dibagi dengan kapasitas.

Tingkat ancaman yang tinggi tentunya berpengaruh pada jumlah pekerjaan yang harus dilakukan, namun menurut penulis tingkat ancaman ini bukanlah hambatan bagi pekerjaan yang harus dilaksanakan BPBD tapi merupakan tantangan kerja yang harus ditaklukan.

Faktor ini dapat diminimalisir dengan melakukan proyek pengurangan risiko bencana dengan menurunkan tingkat ancaman, atau menambah tingkat kapasitas, baik kapasitas masyarakat maupun kapasitas lembaga yang bergerak dalam penanggulangan bencana.

2. Penanggulangan bencana belum terkoordinir secara terpadu dan terencana.

Di lapangan, seperti yang dijabarkan pada hasil, koordinasi dan keterpaduan penanggulangan bencana sudah dilakukan, dengan adanya posko bersama dan tim satgas gabungan mulai tahun 2015 sampai tahun ini, yang lebih tepat dalam hambatan untuk koordinasi lintas sektor adalah tingkat efektivitasnya.

3. Kapasitas aparatur penanggulangan bencana masih belum memadai, Hal ini, menjadi hambatan inti. Kapasitas aparatur terutama kompetensi dan keahlian, adalah salah satu faktor penentu keberhasilan pelaksanaan penanggulangan bencana, sehingga faktor penghambat ini lebih tepat dikategorikan dalam hambatan internal.
4. Belum tersedianya kajian-kajian untuk pengurangan risiko bencana
5. Belum tersedianya analisis risiko bencana hingga peta risiko bencana

Poin keempat dan kelima mengacu pada hal yang sama yaitu Regulasi, Regulasi Kebencanaan dalam lingkup Kabupaten Kotawaringin Barat secara khusus belum dibentuk, sehingga hal ini membatasi gerak kerja BPBD Kotawaringin Barat karena belum dilakukan kajian-kajian kebencanaan secara menyeluruh, dan belum lengkapnya peta-peta kebencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana.

Satu hal yang menjadi hambatan yang juga berpengaruh secara eksternal pada proses penanggulangan bencana yaitu belum adanya Forum Komunikasi Kebencanaan, Forum yang berjenjang ini berdasarkan fungsinya mampu meningkatkan kapasitas. Dalam forum inilah komunikasi intensif antar sektor dapat dilakukan, *sharing* informasi, berbagi pengetahuan dan pengalaman serta berbagi solusi untuk mengatasi bencana dapat dilakukan. Maka secara eksternal, dapat dirangkum hal-hal yang menjadi faktor penghambat adalah :

1. Belum tersedianya kajian-kajian untuk pengurangan risiko bencana
2. Belum tersedianya analisis risiko bencana hingga peta risiko bencana,
3. Belum dibentuknya forum komunikasi kebencanaan lintas sektor di Kabupaten Kotawaringin Barat

Sedangkan paparan hasil-hasil wawancara dan observasi di lapangan yang menjadi penghambat internal kapasitas lembaga adalah :

1. Keterbatasan sumberdaya, dalam hal ini Keterbatasan personil/pegawai beserta kompetensi keahlian yang diperlukan dan keterbatasan anggaran dan pendanaan

serta keterbatasan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran lahan dan hutan.

Dijelaskan bahwa dengan cakupan areal kerja yang luas dan personil yang hanya berjumlah 31 orang, dan tidak semua berkeahlian khusus penanganan kebencanaan maka tingkat kemampuan sumberdaya personil, amat terbatas.

Sumberdaya manusia dalam sebuah organisasi merupakan modal dasar penting untuk mewujudkan tujuan organisasi, sehingga jumlah personil organisasi yang optimal, kompetensi yang sesuai, pengetahuan yang luas sangat berpengaruh pada kinerja organisasi untuk mencapai tujuannya. Selain itu juga diperlukan perilaku dan etika kerja yang baik. SDM yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam bekerja akan mampu menjadi pribadi teladan.

Ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan penanggulangan bencana merupakan faktor penting dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dapat berjalan secara efektif dan efisien, kelengkapan sarana prasarana berbanding lurus dengan kapasitas organisasi. Kapasitas yang baik didukung oleh sarana dan prasarana yang baik, sarana dan prasarana minimal akan menghasilkan kerja yang minimal pula, membutuhkan waktu lebih lama untuk menangani bencana.

2. Regulasi yang belum menyeluruh, belum adanya aturan baku standar operasional administrasi di lapangan menjadi penghambat dalam pergerakan penanganan

bencana, sehingga di lapangan kadang terdapat konflik penanggungjawab administrasi pelaporan, dapat dikatakan sebagai ketidakjelasan regulasi. Kejelasan regulasi merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan organisasi dalam pencapaian visi dan misinya, ketersediaan dokumen operasional menjadi pedoman bagi pegawai dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari, sekaligus memberikan jaminan pelaksanaan kerja yang berkualitas. Belum adanya aturan baku dan standar operasional menyebabkan pekerjaan tidak dijalankan secara optimal, walaupun secara keseluruhan pekerjaan dapat diselesaikan namun, pekerjaan tersebut tidak mencapai kualitas terbaik.

Terlihat pada BPBD Kotawaringin Barat bahwa regulasi hampir sebagian besar belum dibuat, salah satu contohnya tidak adanya SOP pengelolaan informasi menyebabkan bias penanganan di Lapangan, bukan hanya itu saja bahkan SOP administrasi diluar SOP teknis belum dibuat, jika SOP administrasi masih dimungkinkan untuk merujuk pada SOP instansi yang lebih tinggi, berbeda dengan SOP teknis yang memerlukan adaptasi berdasarkan lokalitas.

Proyeksi kedepan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah pelaksanaan tugas dan fungsi SOPD yang optimal. Penanganan kebencanaan bukanlah suatu kegiatan yang bersifat mendadak hanya untuk tanggap darurat bencana saja, penanggulangan bencana merupakan suatu siklus kegiatan baik pada saat pra bencana, saat tanggap darurat serta saat pasca bencana (kesiapsiagaan, identifikasi bahaya, analisa resiko, tindakan preventif, respon bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi) yang berkesinambungan dan melibatkan berbagai sektor

serta komponen masyarakat pada berbagai tingkat. Oleh karena itu kedepan diperlukan adanya kajian yang komperhensif dalam perencanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Kotawaringin Barat serta menanamkan kesadaran kepada masyarakat dan seluruh komponen aparatur penanggulangan terhadap pentingnya upaya pengurangan resiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.





## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil wawancara dan pembahasan yang dilakukan peneliti maka penelitian ini menyimpulkan bahwa :

1. Pada tahap pencegahan dan kesiapsiagaan kapasitas BPBD berada pada kategori cukup yang ditunjukkan dengan keberhasilan kerja bidang pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menjalankan fungsi organisasinya sehingga mampu menekan jumlah kebakaran namun masih dengan kekurangan di banyak hal. Pada tahap penanganan darurat berada pada kategori cukup yang dijabarkan dalam hasil penelitian bahwa keberhasilan kepengurusan dan manajemen organisasi tim terpadu mampu mengurangi luas kebakaran setiap tahunnya. Hal yang berbeda terjadi pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, kapasitas pada tahap ini berada pada kategori kurang, karena pengerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dipersepsikan dalam lembaga BPBD masih terbatas pada pemulihan fisik dan sosial ekonomi belum tersentuh pada pemulihan lintas sektor dan lingkungan sehingga program pemulihan pasca bencana kebakaran lahan dan hutan belum menjadi target dan sasaran kegiatan pada bidang yang membawahi tugas ini.
2. Secara keseluruhan Kapasitas BPBD Kotawaringin Barat dalam penyelenggaraan kebakaran lahan dan hutan, berada pada kategori cukup yang diartikan bahwa penyelenggaraan manajerial sebagian telah dilaksanakan secara

sistematis, dan penyelenggaraan penanggulangan sampai pada taraf koordinasi yang terstruktur, dalam kerangka kebijakan yang belum menyeluruh. Hal tersebut telah disampaikan dalam hasil dan pembahasan bahwa secara praktek di lapangan penanggulangan kebakaran lahan dan hutan sudah dilaksanakan secara maksimal dalam ukuran kemampuan penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh BPBD Kotawaringin Barat, namun kebijakan baku keseluruhan dan nota kesepahaman antar pihak belum terharmonisasi dengan baik, sehingga perlu dilaksanakan peningkatan koordinasi sampai pada taraf efektif. Secara terpadu penyelenggaraan bencana di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dikatakan cukup berhasil dengan adanya dukungan lintas sektor yaitu, BPBD, Dinas Satpol PP dan Damkar, TNI, Polres, Manggala Agni, BKSDA, BMKG, TNTP, pihak Kecamatan, Desa dan Masyarakat yang menjadi bagian dalam tim gabungan pengendalian kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Kotawaringin Barat

3. Adapun yang menjadi faktor pendukung dan penghambat kapasitas BPBD KOTAWARINGIN BARAT dalam penyelenggaraan penanggulangan kebakaran lahan dan hutan adalah :

a. Faktor pendukung

- 1) Kesamaan nilai dan budaya menjadi faktor pendukung yang sangat berarti, sikap relawan dan patriotisme yang dimiliki personil membuat kapasitas perorangan dalam BPBD KOTAWARINGIN BARAT cukup dapat diandalkan,

- 2) Komitmen bersama yang tinggi, dimana semua pihak merasa bagian dari tim untuk menangani bencana selain juga merasa bahwa tugas dan tanggung jawab adalah beban yang harus dilaksanakan,
- 3) Kepemimpinan yang kondusif, BPBD KOTAWARINGIN BARAT memiliki kepala pelaksana yang menjadi teladan yang baik dan barisan level kedua manajerial juga cukup mampu membina bawahan dan staf.
- 4) Koordinasi yang efektif, baik secara internal maupun eksternal koordinasi penanggulangan bencana cukup bagus. Terbentuknya koordinasi yang optimal dengan stakeholder tim kerja yang sangat baik dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Kotawaringin Barat menjadi faktor utama pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- 5) Dukungan eksternal instansi dengan adanya komitmen pemerintah dalam pendanaan dan peningkatan sarana prasarana penanggulangan bencana, tingginya tingkat kepedulian para pihak dalam penanggulangan bencana dan tingginya kepercayaan masyarakat pada instansi, menjadikan keberlanjutan program dan kegiatan penanggulangan bencana oleh BPBD Kotawaringin Barat dapat berlangsung baik.

b. Faktor penghambat

- 1) Keterbatasan sumberdaya, khususnya keterbatasan sumberdaya personil, baik dalam jumlah maupun kompetensi, selanjutnya keterbatasan peralatan serta anggaran dan pendanaan penyelenggaraan bencana terkait dengan hal itu juga Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat belum memiliki Dana Siap Pakai penyelenggaraan bencana, dan
- 2) Regulasi yang belum menyeluruh, dalam skala Kabupaten belum ada regulasi khusus peraturan penanggulangan kebencanaan, sehingga regulasi turunan dibawahnya belum juga dibuat. Selain itu belum ada aturan baku setingkat teknis dan SOP administrasi yang dibuat oleh BPBD KOTAWARINGIN BARAT menjadi hambatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- 3) Hambatan eksternal adalah belum tersedianya kajian-kajian untuk pengurangan risiko bencana, belum tersedianya analisis risiko bencana hingga peta risiko bencana. Belum dibentuknya forum komunikasi kebencanaan lintas sektor di Kabupaten Kotawaringin Barat menjadi faktor pembatas gerak BPBD Kotawaringin Barat dalam melaksanakan keseluruhan program dan kegiatan penanggulangan bencana secara terpadu.

## B. Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan hingga kesimpulan, terkait dengan kapasitas BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kotawaringin Barat, dalam mengatasi faktor penghambat agar dapat melakukan :
  - a) Pembenahan sistem manajemen sumberdaya sehingga dapat mengoptimalkan sumberdaya yang ada, melakukan penyebaran pengetahuan sehingga regenerasi dan kaderisasi dapat berlangsung optimal. Selain itu dapat pula diusulkan penambahan personil dengan kompetensi dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan Instansi.
  - b) Membuat kebijakan dan aturan strategis teknis berupa Standar Operasional Prosedur administrasi semua bentuk penyelenggaraan manajemen di dalam instansi, sehingga memudahkan pelaksanaan kerja dalam instansi
  - c) Terkait dengan sumberdaya peralatan BPBD KOTAWARINGIN BARAT dapat melakukan terobosan – terobosan dengan pembuatan Nota Kesepahaman tertulis dengan pihak swasta atau dunia usaha untuk dapat meminjamkan atau menjadi bagian dari pengerahan sumberdaya peralatan dalam penanggulangan bencana.
  - d) Optimalisasi program dan kegiatan dengan melakukan kerjasama dengan sektor lain untuk meningkatkan keberhasilan penanganan kebakaran lahan dan hutan
2. Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

- a) Membuat kebijakan dan aturan strategis berupa peraturan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Kotawaringin Barat
- b) Menyediakan anggaran yang memadai untuk pengembangan sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana khususnya kebakaran lahan dan hutan lebih lanjut sehingga sistem tersebut mencakup semua wilayah di Kabupaten Kotawaringin Barat dan mencakup segala pihak terkait.
- c) Membentuk forum komunikasi bencana tingkat kabupaten dengan mengikutsertakan semua pihak, sebagai bagian dari langkah awal peningkatan koordinasi sampai pada taraf efektif.

### 3. Untuk Stakeholders Kabupaten Kotawaringin Barat

1. Meningkatkan koordinasi antar pihak, ikut serta dan terlibat aktif dalam forum komunikasi kebencanaan bentukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
2. Menjalin kemitraan antar pihak, membangun koordinasi dengan menjalankan sistem informasi pengurangan risiko bencana terpadu satu *link*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anantanyu, Sapja. 2011. Kelembagaan Petani : Peran dan Strategi Pengembangan Kapasitasnya. Jurnal SEPA Volume 7 Nomor 2 : Pebruari 2011.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2015. Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2015-2019. *Tidak dipublikasikan*.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. 2012. Rencana Strategis BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2012-2017. *Tidak dipublikasikan*.
- \_\_\_\_\_.2017. Rencana Strategis BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017-2022. *Tidak dipublikasikan*
- \_\_\_\_\_. 2016. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Keakaran Hutan dan Lahan oleh BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2015. *Tidak dipublikasikan*
- \_\_\_\_\_.2016. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2015. *Tidak dipublikasikan*
- \_\_\_\_\_.2017. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Keakaran Hutan dan Lahan oleh BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2016. *Tidak dipublikasikan*
- \_\_\_\_\_.2017.Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2016. *Tidak dipublikasikan*
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Barat. 2016. Kabupaten Kotawaringin Barat dalam Angka. Pangkalan Bun : CV. Bali Indah.
- Bagong, Suyanto dan Sutinah. 2006. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta : Prenada Media Grup.
- Bramasto, Nugroho. 2010. Pembangunan Kelembagaan Pinjaman Dana Bergulir Hutan Rakyat. Jurnal Manajemen Hutan
- Chase. Aquilano Jacobs. 2001. *Strategic Capacity Planning Define Capacity Utilization dan Best Operating Level*. The McGraw – Hill Companies.Inc.
- Daymon, Christine, dan Immy Holloway. 2008. *Metode-metode Riset Kualitatif dalam Public Relations dan marketing Communications*. Bentang Pustaka: Yogyakarta.\
- Dharmawan, U. 2003. Pengaruh Penggunaan Api dalam Penyiapan Lahan Terhadap Emisi Gas Rumah Kaca. Tesis. Program Studi Ilmu Lingkungan Pascasarjana Universitas Indonesia. Jakarta
- Djumiarti. Titik, dan Adhela Mahda Hapsari. 2015. Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jepara. Jurnal Pengawasan Manajemen dan Kebijakan Publik. Universitas Diponegoro
- Hanafie, R. 2010. Pengantar Ekonomi Pertanian. Yogyakarta : Andi Yogyakarta.

- Indrawijaya, Adam I. 1989, *Perubahan Dan Pengembangan Organisasi*, Sinar Baru Bandung, Bandung,
- Japan International Cooperation Agency. 2008. *Capacity Assessment Handbook*. Jica Research.
- Laksmi Riani, Asri. 2011. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Graha Ilmu
- Limin, 2006. *Pemanfaatan Gambut dan Permasalahannya*. BPPT. CIMTROP. Universitas Palangka Raya.
- M. Pasaribu, Sahat dan Supena Frayitno. 2008. *Memhami Penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan serta Upaya Penanggulangannya : Kasus di Provinsi Kalimantan Barat*. Badan Litbang Pertanian Bogor.
- Mc Nair, C.J and Richard Vangermeersch. *Total Capacity Management (optimizing at the operational, tactical, and strategic level)*. 1998. Boston : CRC Press LLC
- Milen, A. 2001. *What Do We Know About Capacity Building? An Overview of Existing Knowledge and Good Practice*. Geneva : World health Organization.
- Milen, Anneli. 2006. *Capacity Building Meningkatkan Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Pembaruan.
- Millet, John D. 1954. *Management in the Public Service : The Quest for Effective Performance*. New York : McGraw - Hill.
- Nugraha. 2004. *Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah*. *Jurnal Ilmu Administrasi* 3.
- Nurhabibi, Pratiwi. 2016. *Kapabilitas Pemerintah Daerah Dalam Pengurangan Risiko Bencana Tsunami di Wilayah Pesisir Kulonprogo*. *Tesis*. Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta
- Pamudji. 1985. *Kerjasama antar daerah dalam rangka pembinaan wilayah suatu tinjauan dari administrasi negara*. Jakarta : Institut Ilmu Pemerintahan.
- Polidano, Charles. 1999. *Measuring Public Sector Capacity*. Institute for Development Policy and Management University of Manchester. Manchester.
- Polidano, C. 2000. *World Development*. Elsvier.
- Ratnasar, Jenivia Dwi, dkk. *Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) Kelembagaan Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang*. 2013. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* volume 1 nomor 3. Universitas Brawijaya. Malang.
- Sari, N. Noor I, Prasetyo. W.Y. 2004. *Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu (Studi pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri)*. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*
- Saripati, Fendi Irawan. 2015. *Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Menanggulangi Korban Bencana banjir di Kampung Lambing Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat*. *Jurnal : Ilmu Administrasi Negara*. Universitas Mulawarman. Samarinda.



- Saharjo, B.H. 2008. Pedoman analisis potensi dan risiko bahayakebakaran hutan dan lahan. Laporan BNPB dan UNDP.
- Saharjo, B.H. dkk. 2013. Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia. Prosiding Seminar Nasional Riset Kebencanaan. Mataram.
- Sudibyakto. 2011. *Manajemen Bencana di Indonesia Kemana??*. Yogyakarta : UGM Press
- Sugiyono.2014. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung : CV Alfabeta.
- Sugiyono.2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV Alfabeta.
- Sukrismanto, Erly. Dkk. 2011. Hubungan Antar Organisasi dalam Sistem Pengorganisasian Pengendalian Kebakaran Hutan/Lahan di Indonesia. Jurnal Penelitian Hutan Tanaman Volume 8 Nomor 3. Bogor.
- Supardal dan Santoso, P. 2004. *Manajemen Konflik dalam mengelola dinamika politik dan sumberdaya daerah*. Yogyakarta : PLOD UGM bekerjasama dengan Depdagri.
- Suri, Nur Khotimah.2015. Analisis Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karo Dalam Upaya Penanggulangan Erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo. Jurnal. Universitas Sumatera Utara : Medan.
- Tangkilisan, Hessel Nogi. S. 2005. Manajemen Publik. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia
- Thoha, Miftah. 2008. Ilmu Administrasi Kontemporer. Jakarta : Kencana.
- Tim Peneliti STIA LAN. 2012. *Capacity Building Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia*.
- Triawan F dan Suroso, D.S.A. 2012. Studi Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pengurangan Risiko Bencana Gempa Bumi. Studi Kasus : Kota Pariaman Sumatera Barat. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*.
- UNDP (United Nations Development Programmes), 1998. Capacity Assessment and Development In a Systems and Strategic Management Context, United Nations Development Programmes, New York.
- \_\_\_\_\_, 1997. Capacity Development, United Nations Development Programmes, New York.
- Wahyudi, Bambang. 2002, "Manajemen Sumber Daya Manusia", Sulita :
- Yappika, Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi. OCPAT (Organizational Capacity and Performance Assessment Tools. Panduan Peninjauan Kapasitas dan Kinerja Organisasi Masyarakat Sipil. Yappika : Jakarta.

**Dokumen-Dokumen Peraturan dan Perundang-undangan:**

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007. Penanggulangan Bencana
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 Tentang Penanggulangan Bencana Dan Penanganan Pengungsi Di Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012 tentang kerangka nasional pengembangan kapasitas pemerintah daerah
- Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/MenLHK/Setjen/kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
- Peraturan Kepala BNPB. Nomor 03 Tahun 2008. Pedoman Pembentukan BPBD
- Peraturan Kepala BNPB. Nomor 24 Tahun 2010. Pedoman Penyusunan Operasi Darurat Bencana
- Peraturan Kepala BNPB. Nomor 03 Tahun 2012. Panduan Penilaian Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana
- Peraturan Kepala BNPB. Nomor 15 Tahun 2012. Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

**Website :**

**Definisi Kapasitas.** <http://www.artikata.com/arti-332913-kapasitas.html> (diakses pada 24 Maret 2017)

**Definisi Kapasitas.** [http://library.binus.ac.id/eColls/eThesis/Bab2/Bab%202\\_04-59.pdf](http://library.binus.ac.id/eColls/eThesis/Bab2/Bab%202_04-59.pdf) (diakses pada 24 Maret 2017)

**Definisi Kapasitas.** <http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/132561-T%2027779-Perhitungan%20idle-Tinjauan%20literatur.pdf> (diakses pada 24 Maret 2017)

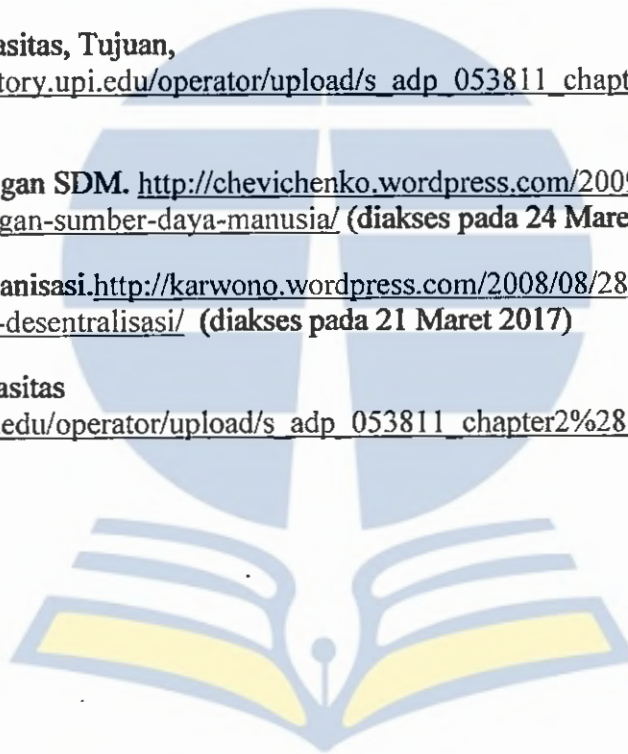
**Pengembangan Kapasitas, Fokus.** <http://nidaimekingofblue.blogspot.com/2011/05/pengembangan-kapasitas-sumberdaya.html> (diakses pada 24 Maret 2017)

**Pengembangan Kapasitas, Tujuan, Metode.** [http://repository.upi.edu/operator/upload/s\\_adp\\_053811\\_chapter2\(1\).pdf](http://repository.upi.edu/operator/upload/s_adp_053811_chapter2(1).pdf) (diakses pada 24 Maret 2017)

**Manfaat Pengembangan SDM.** <http://chevichenko.wordpress.com/2009/11/26/tujuan-dan-manfaat-pengembangan-sumber-daya-manusia/> (diakses pada 24 Maret 2017)

**Level Kapasitas Organisasi.** <http://karwono.wordpress.com/2008/08/28/pengembangan-kapasitas-berkelanjutan-untuk-desentralisasi/> (diakses pada 21 Maret 2017)

**Pengembangan Kapasitas** [http://repository.upi.edu/operator/upload/s\\_adp\\_053811\\_chapter2%281%29.pdf](http://repository.upi.edu/operator/upload/s_adp_053811_chapter2%281%29.pdf) (diakses pada 20 Maret 2017)



## Lampiran 1. PEDOMAN WAWANCARA

### PEDOMAN WAWANCARA

#### A. Macam Wawancara

Menurut Moleong (2004 : 186) wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu oleh pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan wawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Secara garis besar, Esterberg dalam Sugiyono (2008:319) mengemukakan beberapa macam wawancara, sebagai berikut :

##### 1. Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Dalam hal ini, peneliti telah menyiapkan instrumen peneliti berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah dipersiapkan. Dalam wawancara terstruktur, pengumpulan data dapat dilakukan beberapa pewawancara sebagai pengumpulan data, yang mana Guba dan Lincoln dalam Moleong (2004:188) menyebutkan dengan istilah wawancara tim atau panel. Selain mempersiapkan instrumen sebagai pedoman wawancara, peneliti dalam wawancara terstruktur mempersiapkan dan menggunakan alat bantu seperti tape recorder, gambar, brosur dan material lainya yang dapat membantu pelaksanaan wawancara berjalan lancar.

##### 2. Wawancara semistruktur lebih bebas jika dibandingkan Wawancara terstruttur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak terwawancara diminta pendapat, dan ide-idenya

##### 3. Wawancara tak berstruktur

Wawancara ini adalah wawancara bersifat bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk

pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahannya yang akan ditanyakan. Wawancara tak berstruktur yang disebut juga wawancara terbuka, digunakan dalam penelitian pendahuluan atau untuk penelitian yang lebih mendalam tentang subjek yang diteliti. Pada peneliti pendahuluan, peneliti berusaha mendapatkan informasi awal tentang berbagai isu atau permasalahan yang ada pada objek, sehingga peneliti dapat menemukan secara pasti permasalahan apa yang harus diteliti. Dalam wawancara tak berstruktur, peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh narasumber, maka peneliti dapat mengajukan berbagai pertanyaan berikutnya yang lebih terarah pada suatu tujuan.

#### **B. Langkah-langkah dalam wawancara**

Pengumpulan data dengan wawancara dalam peneliti kualitatif memiliki beberapa langkah-langkah, seperti yang ditemukan oleh Lincoln dan Guba dalam Sugiyono (2008: 219) yaitu :

1. Menetapkan kepada siapa wawancara akan menjadi bahan pembicaraan
2. Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan
3. Mengawali atau membuka alur wawancara
4. Melangsungkan alur wawancara
5. Mengkonfirmasi ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya
6. Menuliskan hasil wawancara kedalam catatan lapangan.
7. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh

### C. Jenis Pertanyaan dalam Wawancara

Salah satu hal yang pokok dalam mempersiapkan suatu wawancara adalah berkenan dengan pertanyaan apa yang perlu ditanyakan kepada nara sumber. Patton dalam Moleong (2004 :192) mengemukakan enam jenis pertanyaan sebagai berikut :

1. Pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman atau perilaku

Pertanyaan ini berkaitan dengan apa yang dibuat dan telah diperbuat seseorang. Pertanyaan demikian diajukan bertujuan untuk mendeskripsikan pengalaman, perilaku, tindakan, dan kegiatan yang dapat diamati pada waktu kehadiran pewawancara.

2. Pertanyaan yang berkaitan dengan pendapat atau nilai

Pertanyaan jenis ini ditujukan untuk memahami proses kognitif dan interpretatif dari subjek. Jawaban terhadap pertanyaan ini memberikan gambaran kepada peneliti mengenai apa yang dipikirkan tentang dunia atau tentang suatu program khusus. Pertanyaan itu menceritakan tujuan, keinginan, harapan, dan nilai.

3. Pertanyaan yang berkaitan dengan perasaan

Pertanyaan demikian ditujukan untuk dapat memahami respons emosional seseorang berhubungan dengan pengalaman dan pemikirannya.

4. Pertanyaan tentang pengetahuan diajukan untuk memperoleh pengetahuan faktual yang dimiliki responden dengan asumsi bahwa suatu hal dipandang dapat diketahui.

5. Pertanyaan yang berkaitan dengan indra

Pertanyaan ini berkaitan dengan apa yang dilihat, didengar, diraba, dirasakan, dan dicium. Maksud pertanyaan ini adalah memberikan kesempatan kepada pewawancara untuk memasuki perangkat indra nara sumber.

#### 6. Pertanyaan yang berkaitan dengan latar belakang atau demografi

Pertanyaan ini berusaha menemukan ciri-ciri pribadi orang yang diwawancarai. Jawaban terhadap pertanyaan – pertanyaan itu membantu pewawancara menemukan hubungan narasumber dengan orang lain.

Pertanyaan-pertanyaan baku berkaitan dengan usia, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal atau mobilitas.

#### **D. Mencatat hasil Observasi dan Wawancara**

Peneliti Kualitatif mengadakan observasi dan wawancara dalam pengumpulan data dilapangan. Pada waktu di lapangan peneliti membuat catatan yang segera setelah itu akan disusun menjadi sebuah catatan lapangan. Catatan yang dibuat di lapangan sangat beda dengan catatan lapangan. Catatan yang dibuat peneliti di lapangan dapat berupa coretan seperlunya yang sangat dipersingkat, yang berisi kata-kata kunci, frasa, pokok-pokok isi pembicaraan atau pengamatan, gambar, sketsa, diagram, dan lain-lain. Catatan itu berguna hanya sebagai alat perantara yaitu antara apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dicium, dan diraba dengan catatan sebenarnya dalam bentuk catatan lapangan. “sederhana dilapangan diubah kedalam catatan yang lengkap dan dinamakan catatan lapangan. Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2004 : 209) mengemukakan bahwa catatan lapangan adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam peneliti kualitatif. Pada dasarnya catatan lapangan berisi dua bagian yaitu :

1. Bagian deskriptif yang berisi gambaran tentang latar pengamatan, orang, tindakan, dan pembicaraan.

2. Bagian reflektif yang berisi kerangka berpikir dan pendapat peneliti, gagasan, dan kepeduliannya. Proses pencatan lapangan dilakukan setiap kali peneliti selesai mengadakan observasi atau wawancara.

Hasil peneliti dari observasi dan wawancara, akan lebih kredibel/dapat dipercaya apabila didukung oleh dokumen-dokumen yang kredibel yang dapat berupa dokumen resmi berupa dokumen internal seperti memo, pengumuman, instruksi, aturan suatu lembaga masyarakat tertentu, laporan rapat, surat keputusan dan dokumen eksternal yang berisi bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga Sosial, misalnya majalah, buletin, dan berita media massa.

Dalam melakukan penelitian yang mengambil judul ‘Kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Kotawaring Barat dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan “ penulis menggunakan teknik wawancara mendalam (indepth interview). Pedoman wawancara ini sebagai upaya untuk menggali segala aspek informasi terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Pertanyaan yang diajukan berkembang sesuai dengan poin-poin telah disusun berdasarkan pada penilaian kapasitas menggunakan metode OCPAT berdasarkan pada enam komponen penilaian seperti pada tabel berikut :

No	Komponen Penilaian	Sub Komponen	Pertanyaan	Informan
1	Orientasi Organisasi	Filosofi Organisasi	Bagaimana Rumusan Visi, Misi Tujuan Organisasi?	Kalak BPBD Sekretaris Kabid RR
		Isu Strategis	Apa saja isu-isu strategis yang terkait dengan organisasi? Bagaimana isu-isu strategis tersebut terkait dengan visi, misi dan tujuan?	Kalak BPBD Sekretaris Kabid RR
		Sistem Nilai dan Penerapannya	Apa saja nilai dan sistem nilai yang dianut organisasi?	Kalak BPBD Sekretaris Kabid RR
		Peran Organisasi	Apakah struktur organisasi sudah sesuai dengan orientasi organisasi?	Kalak BPBD Sekretaris Kabid RR
2	Tata Kepengurusan	Pembagian Kekuasaan dan Wewenang	Hal-hal apa yang mendasari pembagian wewenang? Siapa saja yang terlibat dalam penentuan	Kalak BPBD Sekretaris Kabid RR



			<p>kewenangan tsb?          Bagaimana proses penempatan personil pada bagian-bagian organisasi?          Adakah konflik kepentingan dalam pemilihan tsb?          Adakah pertukaran/Pergantian personil secara regular?</p>	
		Mekanisme Pengambilan Keputusan	<p>Bagaimana mekanisme pengambilan keputusan dalam organisasi?          Siapa saja yang terlibat dalam pengambilan keputusan?          Adakah dominasi pengambilan keputusan?          Mengapa hal tersebut terjadi?          Apakah mekanisme pengambilan keputusan dijalankan sesuai dengan kekuasaan/kewenangan atau fungsi/tugas pokok masing-masing bagian?</p>	<p>Kalak BPBD          Kasi RR          Kabid RR</p>
		Mekanisme Transparansi dan Akuntabilitas	<p>Bagaimana sistem pelaporan pada BPBD          Pengukuran kinerja          Publikasi kepada masyarakat umum</p>	<p>Kasi          Perencanaan          Sekretaris          Kasi UKP          Kasi          Rehabilitasi</p>
3	Manajemen Organisasi	Manajemen Sumberdaya Manusia	<p>Seperti apa komposisi staf saat ini          Adakah sistem dan prosedur manajemen SDM lembaga yang baku dan terimplementasi?          Apakah ada skema pengembangan SDM?          Apakah dijalankan secara konsisten?</p>	<p>Kalak BPBD          Kasi UKP          Kasi          Rehabilitasi</p>
		Manajemen Informasi	<p>Adakah aturan baku terkait manajemen informasi?          Bagaimana proses pengumpulan dan pengolahan informasi dilakukan?          Siapa yang melakukan?</p>	<p>Kalak BPBD          Sekretaris          Kasi          Pencegahan          Kasi          Rehabilitasi</p>
		Manajemen Keuangan	<p>Adakah aturan baku menyangkut manajemen keuangan?          Bagaimana mekanisme kontrol keuangan?          Siapa saja yang memiliki akses terhadap informasi keuangan?          Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban keuangan dilakukan?          Bagaimana laporan keuangan disusun          Siapa saja yang terlibat dalam penyusunannya?</p>	<p>Kasi Keuangan          Kasi          Perencanaan</p>
		Manajemen Peralatan dan Logistik	<p>Adakah sistem baku pengelolaan logistik dan peralatan ?          Apakah diaplikasikan secara konsisten?          Adakah bagian khusus yang melakukan pengelolaan? Bagian apa?          Bagaimana mekanisme kontrol penggunaan peralatan?          Adakah sistem mobilisasi peralatan, logistic?          Bagaimana pendistribusian dalam Penanggulangan Bencana?</p>	<p>Kabid          Kedaruratan dan Logistik          Kasi Logistik            Manggala Agni          Polres          TNI</p>
		Manajemen Kantor	<p>Adakah sistem baku pengelolaan kantor?          Apakah dilaksanakan secara konsisten?          Adakah bagian khusus yang melakukan pengelolaan? Bagian apa?</p>	<p>Kalak BPBD          Kasi UKP          Kabid RR          Kasi</p>

			Apakah sumberdaya-sumberdaya organisasi dimanfaatkan secara adil dan oleh seluruh staff?	Rehabilitasi
		Mekanisme Pengelolaan Konflik	Bagaimana Organisasi menyelesaikan konflik? Apakah penyelesaiannya dilaksanakan secara adil? Adakah mekanisme baku penyelesaian konflik untuk mengatasi persoalan persoalan internal? Adakah potensi konflik pemilihan strategi organisasi yang tergabung dalam jaringan kerja tersebut?	Kalak BPBD Kasi UKP Kasi Rehabilitasi
4	Manajemen Program	Pendekatan Pengelolaan Program	Apa pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan program? Apakah pendekatan tsb digunakan dalam setiap tahapan/proses pengelolaan program Dalam perencanaan, implementasi dan monitoring? Apakah dilaksanakan pengembangan monitoring sesuai pendekatan yang digunakan? Apakah dilakukan monitoring secara regular? Apa yang dilakukan terhadap hasil monitoring tsb? Apakah dilakukan evaluasi program? Sejauh mana hasil evaluasi dimanfaatkan untuk perbaikan strategi program?	Kabid RR Kasi Rehabilitasi Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan
		Pelibatan Penerima Manfaat	Adakah masyarakat terlibat dalam penyusunan program kunci/program inti organisasi? Bagaimana prosesnya? Apakah masyarakat memiliki peran aktif dalam program/kegiatan organisasi? Apakah ada keterlibatan pihak ketiga (instansi swasta – pihak dunia usaha) dalam program/kegiatan organisasi? Bagaimana model keterlibatannya?	Sekretaris Kasi Perencanaan/Pe nyusunan Program  Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Instansi Luar BPBD
		Proses pembelajaran	Apakah ada mekanisme pembelajaran dalam organisasi? Apakah pembelajaran dilakukan secara konsisten? Apakah organisasi terus bertumbuh memperbaiki diri? Bagaimana organisasi memanfaatkan hasil pembelajaran tersebut?	Kalak BPBD Kabid RR
5	Keberlanjutan Lembaga	Mobilisasi Sumberdaya	Apa strategi yang dilakukan organisasi dalam menggalang/memobilisasi sumberdaya Sumberdaya apa saja yang dimobilisasi?	Kabid Kedaruratan dan Logistik  Instansi luar BPBD
		Kaderisasi/Regenerasi	Adakah upaya-upaya melaksanakan regenerasi personil? Apa strategi yang dijalankan? Adakah upaya organisasi untuk memastikan bahwa keahlian individu bisa didistribusikan? Adakah penyebaran pengetahuan sehingga tidak terjadi keahlian terpusat?	Kalak Sekretaris
		Kepercayaan dan	Apakah lembaga mengembangkan	Masyarakat

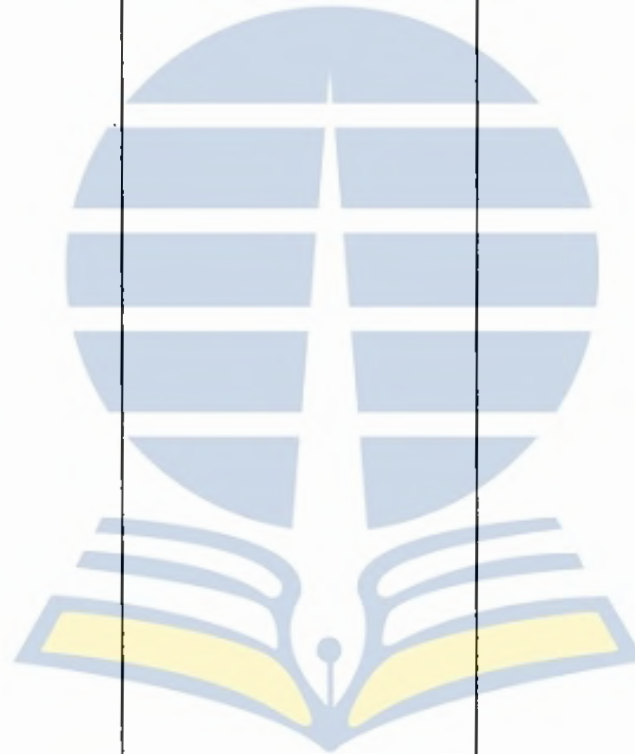
		<b>Legitimasi Publik</b>	<p>mekanisme khusus untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan publik termasuk komunikasi tentang perkembangan pencapaian visi dan misi organisasi dan pemanfaatan sumber daya organisasi? Seperti apa mekanisme yang telah dijalankan?</p> <p>Apakah dilaksanakan regular?</p> <p>Sejauhmana tingkat keberhasilannya selama ini?</p> <p>Bagaimanakah persepsi publik terhadap organisasi selama ini?</p> <p>Apakah terjadi perubahan persepsi publik setelah terjadi interaksi dan komunikasi?</p>	<b>Instansi Luar BPBD</b>
6	<b>Kinerja Organisasi</b>	<b>Penguatan proses kualitas pemberdayaan masyarakat</b>	<p>Bagaimana kinerja organisasi dalam setiap sub komponen organisasi?</p> <p>Apa dampaknya bagi layanan terhadap masyarakat?</p> <p>Apakah ada harmonisasi kerja antara organisasi dan masyarakat?</p> <p>Apakah terdapat pelibatan masyarakat pada program dan kegiatan yang dilaksanakan organisasi?</p>	<b>Kecamatan Masyarakat Instansi Luar BPBD</b>
		<b>Penguatan tingkat kepercayaan masyarakat</b>	<p>Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap organisasi?</p> <p>Apakah terdapat kerjasama antara organisasi dan masyarakat?</p> <p>Adakah jejaring komunikasi antara masyarakat dan organisasi?</p> <p>Apakah komunikasi dilaksanakan secara regular?</p> <p>Seberapa penting masukan dari masyarakat diambil/dijadikan patokan dalam perencanaan program dan kegiatan organisasi?</p>	<b>Kecamatan Masyarakat Instansi Luar BPBD</b>
		<b>Perluasan intensifikasi hubungan kerja</b>	<p>Apakah organisasi memiliki hubungan kerja/partnership dengan pihak lain?</p> <p>Pihak manasaja yang terkait?</p> <p>Bagaimanakah hubungan kerja itu dibentuk?</p> <p>Sejauh mana hubungan kerja antara organisasi dengan stakeholder dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan?</p> <p>Apakah terdapat fungsi koordinasi?</p> <p>Adakah struktur pembagian tugas dalam hubungan kerja dengan pihak lain?</p> <p>Adakah pertemuan periodic yang dilaksanakan dalam jejaring kerjasama?</p>	<b>Kecamatan Masyarakat Instansi Luar BPBD Kalak BPBD</b>
		<b>Penguatan keberlanjutan program dan kegiatan di masyarakat</b>	<p>Bagaimanakah penerapan program dan kegiatan di masyarakat?</p> <p>Apakah program-program dilaksanakan kontinyu?</p>	<b>Kasi Perencanaan Penyusunan Program Masyarakat Instansi Luar BPBD</b>

## Lampiran 2. Rekap Transkrip Hasil Wawancara

No	Komponen Penilaian	Sub Komponen		Item Pertanyaan	Informan		
					Informan 1	Informan 2	Informan 3
1	Orientasi Organisasi	Filosofi Organisasi	Keberadaan visi dan misi organisasi	1. Bagaimana Rumusan Visi, Misi dan Tujuan Organisasi?	Visi dan Misi ditetapkan sesuai dengan aturan pembentukan BPBD	Ya, ada visi dan misi BPBD	Visi dan misi bisa dilihat di peraturan pembentukan BPBD
		Isu Strategis	Isu strategis organisasi	2. Apa saja isu-isu strategis yang terkait dengan organisasi? 3. Bagaimana isu-isu strategis tersebut terkait dengan visi, misi dan tujuan?			Isu-isu strategis bisa dilihat pada renstra BPBD Kobar, bisa diminta ke bagian perencanaan dan pelaporan
		Sistem Nilai dan Penerapannya	Sistem nilai yang dianut	4. Apa saja nilai dan sistem nilai yang dianut organisasi?	Nilai-nilai yang dianut BPBD Kobar mengacu pada amanat UU no.24 tahun 2007	Berdasarkan segitiga biru dalam logo BPBD, maka penanggulangan bencana merupakan tugas dari pemerintah, dunia usaha dan masyarakat	Ada, mengikuti BNPB saja, ada falsafah, ada asas-asas, ada tujuan penyelenggaraan
		Peran Organisasi	Tugas pokok dan fungsi termasuk struktur organisasi	5. Apakah struktur organisasi sudah sesuai dengan orientasi organisasi?	Struktur berdasarkan SK Pembentukan dan Mengacu pada aturan Menteri tentang Pembentukan BPBD	Struktur mengikuti SK pembentukan BPBD secara regulasi dan kelembagaan masih diperdebatkan sampai di tingkat pusat, jadi apakah dia ini masuk dibawah kementerian dalam negeri, apakah dia masuk dibawah BNPB	Secara umum struktur organisasi adalah dasar kita mengacu dari BNPB yang ada dipusat tapi tidak menutup kemungkinan juga daerah juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan daerah (kabid RR)
2	Tata Kepengurusan	Pembagian Kekuasaan dan	Model pembagian Kekuasaan dan	6. Hal-hal apa yang mendasari pembagian	penempatan pembagian wewenang diatur	Kekuasaan wewenang dibagi	pembagian wewenang ini kita

		Wewenang	Wewenang	<p>wewenang?</p> <p>7. Siapa saja yang terlibat dalam penentuan kewenangan tsb?</p> <p>8. Bagaimana proses penempatan personil pada bagian-bagian organisasi?</p> <p>9. Adakah konflik kepentingan dalam pemilihan tsb?</p> <p>10. Adakah pertukaran/Pergantian personil secara regular?</p>	<p>sebagaimana berdasarkan surat Keputusan Bupati dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sampai dengan setingkat kasi, pejabat paling tinggi wewenang dibagi habis sesuai dengan tupoksi sesuai aturan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat No. 3 Tahun 2012</p>	<p>habis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang, dimana terdapat kepala pelaksana, kepala bidang, kepala seksi, hingga pelaksana Personil ditempatkan berdasarkan SK Bupati untuk jabatan-jabatan struktural, dan penempatan dari BKD untuk personil dan staf Pergantian personil terjadi insidental, belum ada pergantian regular, pergantian terjadi jika ada yang pension atau meninggal saja (Sekretaris)</p>	<p>sudah mengacu dari ketentuan bagaimana BNPB tidak ada konflik, sudah ditentukan (Kabid RR) Penempatan personil berdasarkan SK Bupati</p>
		Mekanisme Pengambilan Keputusan	Sistem pengambilan keputusan dan Dominasi	<p>11. Bagaimana mekanisme pengambilan keputusan dalam organisasi?</p> <p>12. Siapa saja yang terlibat dalam pengambilan keputusan?</p> <p>13. Adakah dominasi pengambilan keputusan?</p> <p>14. Mengapa hal tersebut terjadi?</p> <p>15. Apakah mekanisme pengambilan keputusan dijalankan sesuai dengan kewenangan?</p>	<p>Keputusannya musyawarah mufakat Pengambilan keputusan dilakukan berjenjang Dominasi tidak ada, tapi pengambilan keputusan secara utuh ada di tangan kepala pelaksana sebagai pemegang komando namun berbeda pada saat tanggap darurat bencana sesuai dengan arahan Bupati maka terdapat Insiden</p>	<p>Dalam susunan birokrasi otomatis pengambilan keputusan dilaksanakan oleh kapala dinas, di bagian pelaksanaBPBD dilaksanakan oleh kepala pelaksana...kewenangan untuk pelaksanaan tugas dan kegiatan harian tentunya kepala</p>	<p>Pengambilan keputusan di bidang dilakukan oleh Kabid, melalui arahan Kalak, yang semuanya dikembalikan ke tangan Kalak saya tidak melihat adanya dominasi karena seringkali kita melakukan rapat-rapat atau meeting untuk</p>

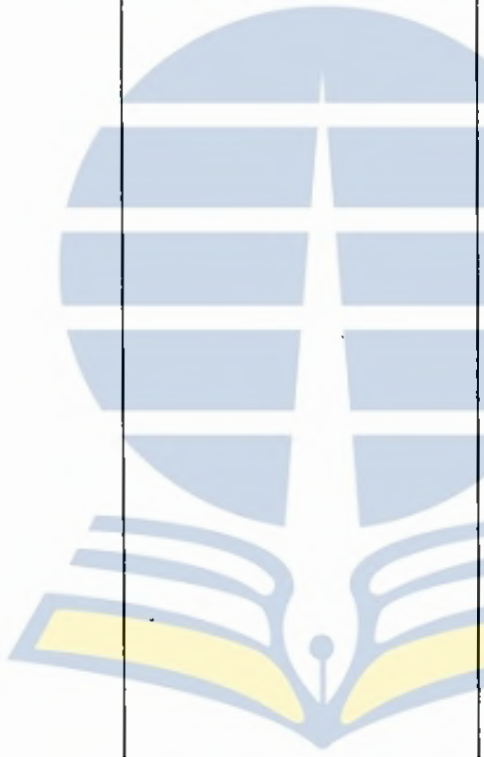
				atau fungsi/tugas pokok masing-masing bagian?	komando, komandan lapangan inilah yang akan menentukan putusan-putusan di lapangan (Kalak BPBD)	pelaksanalah menjadi kewenangan untuk keputusan internal dan fungsi kordinasi (Kabid Rehabilitasi dan Rekontruksi)	mengambil keputusan dalam melaksanakan sesuatu, pengambilan keputusan final diserahkan pada masing-masing bidang setelah mendengar dan menerima masukan dari bidang lain secara garis komando memang ada para pihak yang ditugaskan sebagai pengambil keputusandilapangan tapi untuk kebijakan tetap dikembalikan kepada kepala dinas, kepada kepala pelaksana
Mekanisme Transparansi dan Akuntabilitas	Pengelolaan Laporan dan Publikasi	16. Bagaimana sistem pelaporan pada BPBD 17. Pengukuran kinerja dan Publikasi kepada masyarakat umum	setiap bulan dilaksanakan monitoring dan evaluasi dengan pelaporan fisik dan keuangan Biasanya laporan RFK dilaporkan kepada bappeda melalui online baik itu kegiatan yg didanai APBD maupun bantuan dari Pusat	Kita ada membuat SKP untuk masing-masing individu-setiap tahun dilaporkan	Tugas pokok perencanaan yaitu meliputi beberapa hal yang mendasar yaitu dalam kurun waktu 5 tahun tentunya ada Renstra dibuat sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten itu untuk perencanaan lima tahun kemudian dalam satu tahun yang biasa dikenal dengan Renja		



yaitu rencana kerja biasanya renja disusun pada akhir tahun yaitu sekitar bulan September tahun ini dan itu direncanakan untuk tahun berikutnya. Pada akhirtahun menjadi rencana kerja anggaran setelah anggaran disetujui, dan akan disetujui oleh DPRD, dan juga oleh BPKAD dulunya DPKD, maka disusunlah DPA, setelah RKA disetujui, DPA disahkan oleh DPRD setelah kita menerima DPA baru kita melaksanakan kegiatan2 tahunan dan membuat rencana kegiatan fisik yang memerlukan pelelangan dengan menggunakan sistem informasi pengadaan barang umum. Kemudian dalam pelaksanaan DPA pada tahun tersebut, setiap bulan dilaksanakan monitoring dan

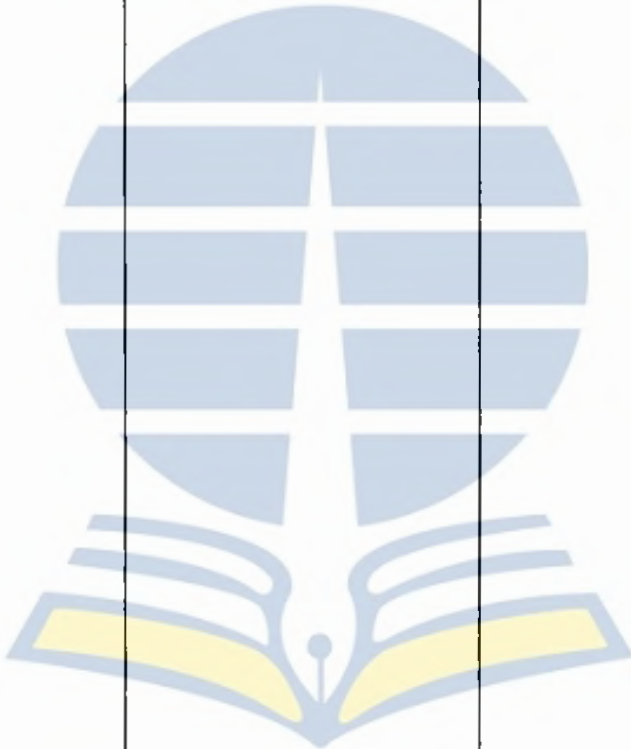
							<p>evaluasi dengan pelaporan fisik dan keuangan Biasanya laporan RFK dilaporkan kepada Bappeda melalui online baik itu kegiatan yang didanai APBD maupun bantuan dari Pusat Setelah kegiatan berakhir maka tugas dari Subbag Perencanaan yaitu penyiapan bahan dalam penyusunan laporan kinerja (LAKIP) yang dibuat pada akhir tahun anggaran (Kasubbag Perencanaan)</p>
3	Manajemen Organisasi	Manajemen Sumberdaya Manusia	Sistem dan Prosedur manajemen SDM	<p>18. Seperti apa komposisi staf saat ini 19. Adakah sistem dan prosedur manajemen SDM lembaga yang baku dan terimplementasi? 20. Apakah ada skema pengembangan SDM? 21. Apakah dijalankan secara konsisten?</p>	<p>Kalau kita menyimak manajemen sumberdaya manusia langkah awal adalah rekrutmen, rekrutmen adalah penerimaan, ya kalo kita yang 14 orang kemaren di 2014 itu langsung ditunjuk. selanjutnya penambahan personil staf mungkin pada pengisian lowongan-lowongan seperti itu. Pada 2015 sudah lengkap secara struktural dan untuk</p>	<p>Belum ada sistem dan prosedur manajemen SDM lembaga yang baku dan terimplementasi, untuk saat ini staff belum sesuai dengan kompetensinya, dan belum sesuai kebutuhan di tiap bagian. Untuk mekanisme pengembangan SDM yang baku belum dimiliki.</p>	<p>Staf di bidang-bidang ditempatkan dalam komposisi, kepala bidang, kepala seksi dan 1 staf, namun ada yg tidak memiliki staf. Tidak ada sistem baku yang diimplementasikan Skema pengembangan SDM belum</p>



				 <p>2016 memang kita ada pengurangan, ada yang pensiun, dan ada yang meninggal dunia, daripada pengurangan SDM. Untuk sistem kepegawaian memang kita masih kekurangan dari pada SDM secara teknis untuk melaksanakan manajemen kepegawaian kita tapi untuk internal ke dalam kita masih dibantu oleh personil teknis di bidang secara bersama-sama untuk melaksanakan manajemen kepegawaian kita. Memang disana-sini ada satu pola kegiatan yang masih belum bisa diterapkan kemaren kita untuk meminta supaya sebagai evaluasi kinerja kita semua staf itu kita membuka untuk membuat buku catatan kerja, membuat buku catatankerja ini yang sampai hari ini belum bisa diterapkan. Tapi secara umum Alhamdulillah melaksanakan tupoksi kita selaku pelaksana daripada BPBD sudah terlaksana dengan</p>	<p>Untuk evaluasi kinerja staff dilakukan pada setiap akhir tahun dan prosesnya dilakukan. Kepala bidang untuk mengevaluasi semua staff. yang melakukan adalah pimpinan kita disini sebagai kepala pelaksana Evaluasi kinerja dilakukan pada akhir tahun, berdasarkan SKP perorangan yang target kinerja dibuat pada tahun sebelumnya (Kasubbag UKP)</p>	<p>dibentuk, hanya mengandalkan undangan pelatihan</p>
--	--	--	--	---	--	--



				di Lapangan dan juga termasuk upaya kita untuk melakukan tindakan penanganan	BPBD itu salah satu lembaga yang memang cukup cepat memberikan informasi. Untuk informasi eksternal kita sudah kita laksanakan sejak tahun 2015 kita sudah cukup baik tapi memang perlu ditingkatkan. Dan itu dilegalisasi dengan MOU atau dengan kesepakatan bersama semua komponen yang ada di masyarakat.	
		Manajemen Keuangan	Sistem dan Prosedur Pengelolaan Dana dan Anggaran	<p>25. Adakah aturan baku menyangkut manajemen keuangan?</p> <p>26. Bagaimana mekanisme kontrol keuangan?</p> <p>27. Siapa saja yang memiliki akses terhadap informasi keuangan?</p> <p>28. Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban keuangan dilakukan?</p> <p>29. Bagaimana laporan keuangan disusun?</p> <p>30. Siapa saja yang terlibat dalam penyusunannya?</p>	<p>Ya, ada Aturan baku menyangkut manajemen keuangan yaitu peraturan bupati kotawaringin Barat no.33 tahun 2013 tentang mekanisme pembayaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Peraturan tersebut kami aplikasikan secara konsisten Informasi keuangan dapat diakses oleh pihak-pihak yang memiliki wewenang yaitu pihak badan pengelola keuangan</p>	

					<p>dan aset daerah serta bagian keuangan SKPD yang bersangkutan Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyelaraskan akuntansi dan transaksi keuangan, aset, utang, dan pembiayaan yang berada dalam tanggungjawab Laporan disampaikan ke Bupati lewat DPKAD Laporan-laoran isinya pertanggungjawabana ada laporan realisasi anggaran, neraca laporan arus kas, dan CALK pakai standar akuntansi pemerintah. Penyusunan Laporan keuangan tidak dikerjakan sendiri tapi sama-sama dengan bagian umum, pengurus barang, kuasa pengguna anggaran dan PPTKnya diperiksa dan ditandatangani oleh Kalak sebelum disampaikan (Kasubbag</p>	
--	--	--	--	---	---	--

						<b>Keuangan)</b>	
		<b>Manajemen Peralatan dan Logistik</b>	<b>Sistem pengelolaan Peralatan dan Logistik</b>	<p>31. Adakah sistem baku pengelolaan logistik dan peralatan ?</p> <p>32. Apakah diaplikasikan secara konsisten?</p> <p>33. Adakah bagian khusus yang melakukan pengelolaan?</p> <p>34. Bagian apa?</p> <p>35. Bagaimana mekanisme kontrol penggunaan peralatan?</p> <p>36. Adakah sistem mobilisasi peralatan, logistik?</p> <p>37. Bagaimana pendistribusian dalam Penanggulangan Bencana?</p>	<p>Salah satu bidang di BPBD yaitu bidang peralatan dan logistik pelaksanaan tugas sebagaimana tugas pokok dan fungsi dilaksanakan oleh seksi tersebut</p> <p>Untuk manajemen peralatan dan logistik kita didukung, ketika di dalam institusi mengalami keterbatasan kita di dukung sarana dan prasarana ataupun logistik baik itu di tingkat masyarakat di tingkat korporate, maupun di tingkat instansi vertikal dan daerah, ketika kita masih mengalami keterbatasan dan disupport, kita juga disupport pihak provinsi, oleh Gubernur dan juga oleh BPBD tingkat provinsi dan juga SKPD terkait tingkat Provinsi, dan juga Dinas Sosial, kemudian di tingkat Pusat kita didukung sepenuhnya oleh BNPB baik itu dukungan peralatan maupun logistik, yang di dukung secara langsung melalui bidang kedaruratan dan juga logistik</p>	<p>peralatan logistik ini dominan sarana logistik yang diterima dari BNPB, tentunya kita memiliki acuan baik itu acuan melalui perka BNPB, peraturan BPBD dan aturan dari pada deputi peralatan logistik BNPB</p> <p>Bagian khususnya ada di bidang kedaruratan dan Logistik pada Kasi Logistik yang mencakup juga peralatan</p> <p>Ada mekanisme kontrol dan pelaporannya, ada pengurus barang dan peralatan</p> <p>(Kabid Rehabilitasi dan Rekontruksi</p> <p>Belum ada aturan mobilisasi baku dan sistem yang digunakan, hanya dilaksanakan sesuai dengan keperluan dan kondisi bencana yang ada dan harus ditangani</p>	<p>Kalau manajemen logistik kita jalankan sesuai dengan bencana, bencana apa yang kita lihat dilapangan apakah itu bencana kebakaran atau bencana banjir nah itu nanti kita tetapkan kita buat laporannya baru nanti kita jalankan apa yang perlu dilapangan contohnya apakah itu berupa makanan atau pakaian itu yang bisa kita lihat dulu terus kita petakan dulu diperlukan apa di tempat kejadian itu (kabid Kedaruratan dan Logistik)</p> <p>Kami melakukan pengelolaan logistik mengacu pada PP no. 21 dan 22 tahun 2008 tentang penyelenggaraan bencana dan tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana dengan melaksanakan penyusunan</p>

				(Kalak BPBD)		perencanaan, pendistribusian pemantauan evaluasi dan laporan (Kasi Logistik)
	Manajemen Kantor	Sistem pengelolaan kantor yang baku	<p>38. Adakah sistem baku pengelolaan kantor?</p> <p>39. Apakah dilaksanakan secara konsisten?</p> <p>40. Adakah bagian khusus yang melakukan pengelolaan?</p> <p>41. Bagian apa?</p> <p>42. Apakah sumberdaya-sumberdaya organisasi dimanfaatkan secara adil dan oleh seluruh staff?</p>		<p>Iya, kita memiliki manajemen kantor yang konsisten dijalankan sesuai tugas pokok dan fungsi, untuk bagian penanggulangan bencana ini ada yang mengelola untuk keuangan ada bidang keuangan, Penanggulangan Bencana untuk kedaruratan ada di bidang dua, bidang dua itu ada kedaruratan dan logistik, adapun untuk kesiapsiagaan ada di bidang 1 dan untuk menilai tingkat kerusakan, ada di bidang 3 (Bidang Rehabilitasi dan rekontruksi (Kasubbag UKP)</p>	
	Mekanisme Pengelolaan Konflik	Tingkat konflik di kantor	<p>43. Bagaimana Organisasi menyelesaikan konflik?</p> <p>44. Apakah penyelesaiannya dilaksanakan secara adil?</p> <p>45. Adakah mekanisme baku penyelesaian konflik untuk mengatasi persoalan</p>	<p>penanganan konflik internal BPBD ini harus dimulai dengan kepala kantornya dalam hal ini kepala pelaksana nah kepala pelaksana inilah menjadi sebagai</p>	<p>Utk penyelesaian konflik secara internal kami menyelesaikan secara kekeluargaan, kita panggil staf yang</p>	

				<p>persoalan internal?</p> <p>46. Adakah potensi konflik pemilihan strategi organisasi yang tergabung dalam jaringan kerja tersebut?</p>	<p>mediator maupun sebagai inisiator dalam bagaimana konflik internal bisa diatasi, kepala pelaksana bisa menjadi penengah, penyelesaian konflik dilakukan berjenjang bila konfliknya setingkat staf berarti penengah setingkat kasi, jika konflik terjadi di tingkat kasi ya mencoba kepala bidang kuncinya jadi jika kepala bidang bisa meredam konflik tidak perlu sampai ke kepala pelaksana, dan seterusnya (kabid RR)</p>	<p>bermasalah dan kita lakukan penyelesaian secara kekeluargaan (Kasubbag UKP)</p>	
4	Manajemen Program	Pendekatan Pengelolaan Program	Model pendekatan pengelolaan program	<p>47. Apa pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan program?</p> <p>48. Apakah pendekatan tsb digunakan dalam setiap tahapan/proses pengelolaan program Dalam perencanaan, implementasi dan monitoring?</p> <p>49. Apakah dilaksanakan pengembangan monitoring sesuai pendekatan yang digunakan?</p> <p>50. Apakah dilakukan monitoring secara regular?</p> <p>51. Apa yang dilakukan terhadap hasil monitoring tsb?</p> <p>52. Apakah dilakukan evaluasi program?</p> <p>53. Sejauh mana hasil evaluasi dimanfaatkan untuk</p>			<p>Pengelolaan program dan kegiatan di BPBD Kobar mengacu pada Rencana Strategis yang telah dibuat Ya, Pendekatan dilakukan kontinyu dan berjenjang baik dalam perencanaan, implementasi dan monitoring. Belum ada pengembangan pengawasan dan evaluasi, semua hanya mengacu pada prosedur, sesuai tata urutan</p>

			perbaikan strategi program?			pelaporan Evaluasi program dijalankan jika terdapat kendala saja Tentunya dipakai untuk memperbaiki dan menjadi tindak lanjut dalam merubah strategi
	Pelibatan Penerima Manfaat	Keterlibatan Masyarakat dalam perencanaan program dan kegiatan	<p>54. Adakah masyarakat terlibat dalam penyusunan program kunci/program inti organisasi?</p> <p>55. Bagaimana prosesnya?</p> <p>56. Apakah masyarakat memiliki peran aktif dalam program/kegiatan organisasi?</p> <p>57. Apakah ada keterlibatan pihak ketiga (instansi swasta – pihak dunia usaha) dalam program/kegiatan organisasi?</p> <p>58. Bagaimana model keterlibatannya?</p>	<p>dalam penyusunan program masyarakat terlibat, dalam hal ini keterlibatan masyarakat adalah dalam menyusun proposal atau usulan kegiatan yang disampaikan dalam forum musrenbang Desa musrenbang Kecamatan dan berlanjut sampai ke musrenbang Kabupaten</p> <p>Menyangkut peran aktif masyarakat yaitu untuk kegiatan fisik atau infrastruktur masyarakat tidak terlibat secara aktif, keterlibatan masyarakat secara aktif terjadi pada kegiatan non fisik yaitu berupa peningkatan kapasitas yaitu berupa pelatihan, sosialisasi serta penanganan kejadian atau aksi penanggulangan kejadian bencana masyarakat ikut terlibat secara aktif. Sedangkan keterlibatan instansi</p>	<p>1. Ya terlibat tapi terbatas</p> <p>2. Ada proposal diajukan, lalu kami usulkan dalam RKA untuk kegiatan tertentu</p> <p>3. Swasta hanya ada bantuan-bantuan saja, merencanakan kegiatan tidak</p>	



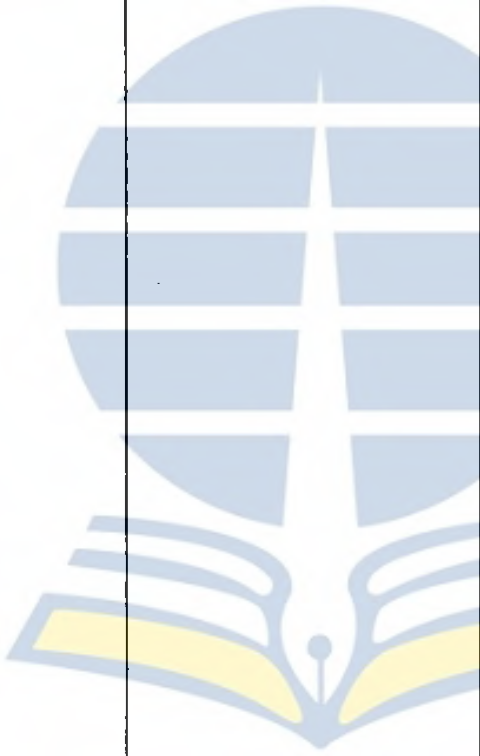
				<p>swasta atau dunia usaha dalam program kegiatan organisasi adalah</p> <p>Dalam peningkatan kapasitas kerjasama dilakukan ketika ada kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan atau dunia usaha biasanya mereka meminta kepada APBD untuk mngirimkan salah satu aparaturnya untuk menjadi narasumber, sedangkan untuk kejadian apabila terjadi sesuatu di lapangan pihak swasta juga terlibat aktif contohnya dalam penanggulangan kebakaran, kerjasama tersebut biasanya di dahului dengan suatu kerjasama operasional yg terjadi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dengan BPBD</p>		
		Proses pembelajaran	<p>59. Apakah ada mekanisme pembelajaran dalam organisasi?</p> <p>60. Apakah pembelajaran dilakukan secara konsisten?</p> <p>61. Apakah organisasi terus bertumbuh memperbaiki diri?</p> <p>62. Bagaimana organisasi memanfaatkan hasil pembelajaran tersebut?</p>	<p>Proses pembelajaran untuk para aparatur BPBD dilakukan secara konsisten yaitu ada beberapa aparatur kita yang dikirim keluar daerah untuk mengikuti bintek, baik itu bintek implementasi perundang-undangan ataupun pelatihan penanggulangan</p>		

					<p>bencana atau Bintek di bidang kebencanaan, dengan adanya bintek-bintek tersebut maka secara otomatis organisasi terus tumbuh memperbaiki diri, naa ... pemanfaatan pembelajaran tersebut diimplementasikan sesuai dengan tupoksi masing-masing di bidang atau kasi-kasi seperti contoh untuk bintek penyusunan program itu biasanya diimplementasikan dalam teknik atau cara-cara penyusunan program, penyusunan laporan kinerja, dan penyusunan laporan kejadian bencana dan lain-lainnya</p>		
5	Keberlanjutan Lembaga	Mobilisasi Sumberdaya		<p>63. Apa strategi yang dilakukan organisasi dalam menggalang/memobilisasi sumberdaya 64. Sumberdaya apa saja yang dimobilisasi?</p>	<p>Belum ada strateginya Hanya menyesuaikan keadaan saja Peralatan dan logistik Beberapa didukung dari pihak lain (Kasi Logistik)</p>	<p>Sementara yang bisa dimobilisasi adalah peralatan dan logistik yang dimiliki BPBD, terkait dengan pengerahan logistik dan peralatan dari luar masih dikoordinasi oleh Kalak BPBD, karena bukan bagian dan wewenang dari kita agak sulit melakukan mobilisasi logistik</p>	

							<p>dari pihak lain. Namun secara internal mekanismenya sudah dijelaskan tadi- jika terjadi kondisi kebakaran atau kondisi kebencanaan secara khusus maka kita akan langsung menurunkan peralatan dan logistik. Lalu belum ada mekanisme khusus untuk memobilisasinya terutama jika peralatan dan personilnya terkait dengan instansi lain yang ada hanya posko terpadu dengan para staf yang melaksanakan penjagaan secara bergantian (kasi Rehab)</p>
		Kaderisasi/Regenerasi	<p>65. Adakah upaya-upaya melaksanakan regenerasi personil?          66. Apa strategi yang dijalankan?          67. Adakah upaya organisasi untuk memastikan bahwa keahlian individu bisa didistribusikan?          68. Adakah penyebaran pengetahuan sehingga tidak</p>				<p>Belum ada secara khusus, tidak ada strategi yang dilakukan Keahlian individu yang didapat dari pelatihan, kursus maupun pendidikan saat ini hanya dimiliki oleh personil-</p>

				terjadi keahlian terpusat?			personil tertentu saja, belum ada penyebaran pengetahuan secara khusus
		Kepercayaan dan Legitimasi Publik	Mekanisme interaksi dan komunikasi dengan masyarakat lintas sektor dan swasta	<p>69. Apakah lembaga mengembangkan mekanisme khusus untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan publik termasuk komunikasi tentang perkembangan pencapaian visi dan misi organisasi dan pemanfaatan sumber daya organisasi?</p> <p>70. Seperti apa mekanisme yang telah dijalankan?</p> <p>71. Apakah dilaksanakan regular?</p> <p>72. Sejauhmana tingkat keberhasilannya selama ini?</p> <p>73. Bagaimanakah persepsi publik terhadap organisasi selama ini?</p> <p>74. Apakah terjadi perubahan persepsi publik setelah terjadi interaksi dan komunikasi?</p>		Persepsi publik untuk BPBD Kobar baik.	Belum ada mekanisme khusus untuk interaksi ini
6	Kinerja Organisasi	Penguatan proses kualitas pemberdayaan masyarakat	Kerjasama antar para pihak	<p>75. Bagaimana kinerja organisasi dalam setiap sub komponen organisasi?</p> <p>76. Apa dampaknya bagi layanan terhadap masyarakat?</p> <p>77. Apakah ada harmonisasi kerja antara organisasi dan masyarakat?</p> <p>78. Apakah terdapat pelibatan</p>	Sesuai tupoksi semuanya berjalan dengan maksimal, karena ini kantor baru terus kita diberi ruang untuk melakukan berbagai hal, mempelajari hal-hal baru, jadi memberikan semangat juga bagi para		

				<p>masyarakat pada program dan kegiatan yang dilaksanakan organisasi?</p>	<p>pejabat yang ada, baik di tingkat atas, menengah maupun di tingkat bawah untuk berkreasi, membangun tupoksi yang ada, membangun hubungan kerja baik di skala internal maupun dengan pihak luar termasuk dengan masyarakat, kemudian kinerja bidang-bidang terkait sampai saat ini sangat bagus walaupun terbatas</p> <p>Hubungan relasi dengan masyarakat cukup baik, kemudian juga kita punya relawan di tingkat lapangan yang mendukung penanganan.</p>		
		Penguatan tingkat kepercayaan masyarakat	Komunikasi aktif masyarakat dengan lembaga	<p>79. Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap organisasi?</p> <p>80. Apakah terdapat kerjasama antara organisasi dan masyarakat?</p> <p>81. Adakah jejaring komunikasi antara masyarakat dan organisasi?</p> <p>82. Apakah komunikasi dilaksanakan secara regular?</p> <p>83. Seberapa penting masukan dari masyarakat diambil/dijadikan patokan dalam perencanaan program dan kegiatan organisasi?</p>	<p>sampai pada saat ini kita belum melakukan pengukuran yang sifatnya formal melihat apa yang kita terima laporan dari masyarakat karena luasan cakupan kegiatan, pada akhirnya yg diluar TJ BPBD pun terkadang orang menginformasikan ke BPBD utk mendukung kegiatan jadi ada mungkin cerita-cerita yang kadang jauh dengan tugas pokok dan fungsi seperti ada anjing masuk sumur</p>	Alhamdulillah kepercayaan masyarakat pada BPBD sangat tinggi dengan adanya setiap ada masalah, ada kejadian orang hilang ataupun orang tenggelam masyarakat langsung menelpon BPBD utk meminta pertolongan, dan pohon tumbang, masyarakat juga meminta kita untuk memotong pohon yang tumbang di jalan,	



BPBD yang ditelp untuk membantu, kemudian orang tenggelam yang sebetulnya bukan domain khusus oleh karena itu lebih kepada SAR tapi yang lebih dominan malah dari BPBD, ya jadi dari hal-hal seperti itu kepercayaan masyarakat pada BPBD cukup tinggi. Jejaring komunikasi yang baku belum ada, namun kami selalu menjadi yang pertama dihubungi jika terdapa kejadian bencana. Komunikasi regular, tidak juga, tapi tegur sapa dalam grup WA antar personil aparaturnya yang lebih sering. Masukan dari masyarakat menjadi bahan pertimbangan untuk melaksanakan beberapa kegiatan, namun seringkali terbentur dengan pelapornya dana anggaran untuk direalisasikan

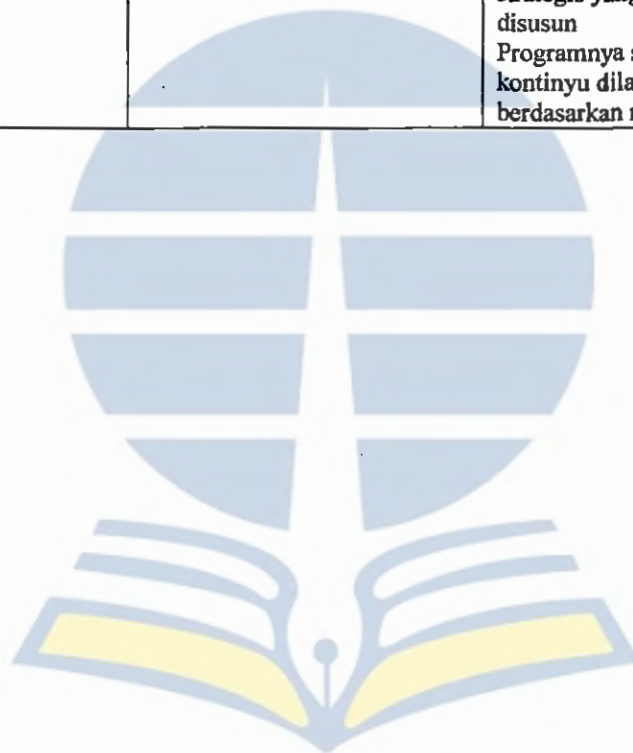
Itulah tingkat kepercayaan masyarakat dan masyarakat mau BPBD bisa membantu dalam penanggulangan bencana. Iya, ada kerjasama. Kita melakukan komunikasi antara masyarakat dan organisasi, setiap kita akan melakukan penanganan bencana, kita melibatkan masyarakat dalam melakukan pencegahan, kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana di daerah kita. Kita melakukan komunikasi tergantung keadaan itu, kalo keadaan kita mendesak untuk dilakukan komunikasi dengan masyarakat kita akan undang mereka untuk mengadakan pertemuan untuk membahas apa rencana kita untuk menghadapi bencana yang ada di daerah kita. Masukan dari masyarakat sangat

						<p>kita perlukan, karena apa, utk bencana kita tdak mungkin utk memantau keadaan di desa ataupun di pelosok daerah kita Dengan adanya masukan dari masyarakat, informasi dari masyarakat maka kita akan mengetahui kejadian-kejadian bencana, misalnya banjir atau kebakaran hutan melalui informasi masyarakat, yang disampaikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kobar akan kita tindak lanjuti sesegera mungkin</p>	
		Perluasan intensifikasi hubungan kerja	Hubungan kerjasama dengan masyarakat	<p>84. Apakah organisasi memiliki hubungan kerja/partnership dengan pihak lain?</p> <p>85. Pihak manasaja yang terkait?</p> <p>86. Bagaimanakah hubungan kerja itu dibentuk?</p> <p>87. Sejauh mana hubungan kerja antara organisasi dengan stakeholder dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan?</p> <p>88. Apakah terdapat fungsi</p>	<p>Ya, penanganan bencana tidak bisa sendiri. Karena bencana itu sesuatu yang luas dan mencakup semua aspek, ketika terjadi kebencanaan itulah sebabnya kita pasti membentuk tim gabungan yang akan melakukan penanganan di lapangan, dan sesuai</p>		

			<p>koordinasi?</p> <p>89. Adakah struktur pembagian tugas dalam hubungan kerja dengan pihak lain?</p> <p>90. Adakah pertemuan periodik yang dilaksanakan dalam jejaring kerjasama?</p>	<p>dengan tupoksi masing-masing semuanya bergerak simultan, umpamanya dari BPBD kita akan melakukan pengecekan lapangan kemudian pada saat penanganan kita bersama-sama dengan instansi terkait termasuk juga dinas sosial, SAR kemudian ketahanan pangan, dan sektor lain kesehatan semuanya membentuk sebuah organisasi ataupun kebersamaan yang nanti untuk melaksanakan penanganan di lapangan, koordinasi yang terbentuk itu lewat Tim yang dibentuk dengan tupoksi masing-masing ya dan kita kalo sudah penanganan darurat ada insiden komando yang nanti akan memberikan perintah atau pun membagi tugas masing-masing utk kegiatatan di lapangan. Untuk proses penanggulangan pasti kita tidak sendiri. Kita bersama dengan seluruh pihak. Termasuk koorporate, perusahaan dan masyarakat, pengusaha dan masyarakat.</p>		
--	--	--	--	--	--	--



		<b>Penguatan keberlanjutan program dan kegiatan di masyarakat</b>	<b>Keberlanjutan program</b>	<b>91. Bagaimanakah penerapan program dan kegiatan di masyarakat? 92. Apakah program-program dilaksanakan kontinyu?</b>	<b>Program dan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat, setiap tahun dilaksanakan berdasarkan sasaran strategis yang telah disusun Programnya secara kontinyu dilakukan berdasarkan rencana</b>		
--	--	---	------------------------------	---	---	--	--



**Lampiran 3. Dokumentasi Pelaksanaan Wawancara bersama Informan (Narasumber)**



1. Wawancara peneliti dengan Sekretaris BPBD Kobar tentang Orientasi Organisasi, tata kepengurusan, manajemen organisasi, manajemen program dan keberlanjutan lembaga



2. Wawancara peneliti dengan Kepala Daerah Operasi III Manggala Agni tentang kinerja organisasi dan penanggulangan bencana kebakaran lahan dan hutan di Kab. Kotawaringin Barat



3. Wawancara peneliti dengan Pihak Kepolisian Resort Kotawaringin Barat tentang keberlanjutan lembaga, kinerja organisasi dan penanggulangan bencana kebakaran lahan dan hutan di Kobar.



4. Wawancara peneliti dengan Dandim 1014 Pangkalan Bun tentang keberlanjutan lembaga, kinerja organisasi dan penanggulangan bencana Kebakaran lahan dan hutan di Kobar.



5. Wawancara peneliti dengan Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi tentang orientasi organisasi, tata kepengurusan, manajemen organisasi dan manajemen program



6. Wawancara peneliti dengan BMKG Pangkalan Bun tentang keberlanjutan lembaga, kinerja organisasi dan prakiraan cuaca dalam penanggulangan bencana kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Kotawaringin Barat.



7. Wawancara peneliti dengan masyarakat Kelurahan Medawai Seberang Pangkalan Bun tentang penanggulangan bencana kebakaran lahan dan hutan di Kab. Kotawaringin Barat.



8. Wawancara peneliti dengan Masyarakat Desa Pasir Panjang Pangkalan Bun tentang penanggulangan bencana kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Kotawaringin Barat.



**9. Wawancara peneliti dengan Sekcam Kumai Pangkalan Bun tentang Keberlanjutan Lembaga, kinerja organisasi dan penanggulangan bencana kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Kotawaringin Barat.**



**10. Wawancara peneliti dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Kotawaringin Barat tentang Orentasi organisasi, tata kepengurusan, manajemen organisasi, manajemen program, keberlanjutan lembaga, kinerja organisasi dan penanggulangan bencana kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Kotawaringin Barat.**



11. Wawancara peneliti dengan Kabid Damkar Pangkalan Bun tentang keberlanjutan lembaga, kinerja organisasi dan penanggulangan bencana kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

**Lampiran 4. Dokumentasi Kegiatan Penanggulangan Kebakaran Lahan dan Hutan**



1. Pantauan Udara Kebakaran Lahan dan Hutan di Kab. Ktw. Barat



2. Proses Pemadaman Darat Bersama Satuan Pemadam Kebakaran Kobar  
September 2015



**3. Kebakaran Lahan Milik Masyarakat Potensial Kabut Asap**



**4. Sistem Pemadaman Api Lewat Udara  
Tahun 2016**





5. Helikoptermilik BNPB Bantuan Pinjam Pakai Peralatan Pemadaman tahun 2016



6. Peneliti dengan pelajar pada acara Sosialisasi dan Pelatihan Kegiatan Tahunan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2015



7. Peneliti dengan Dinas terkait Rapat Koordinasi Karlahut Tahun 2015



8. Peneliti dengan Internal BPBD Kobar Rapat Kasi dan Keuangan Tahun 2016



9. Peneliti bersama Dinas terkait, perusahaan dan masyarakat pada acara apel Siaga Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2015



10. Peneliti dengan Dinas terkait dan masyarakat Latihan Bersama Pemadaman Kebakaran Lahan dan Hutan serta Pengecekan Peralatan Pemadaman



Pemadaman Lanjut setelah Pemadaman Pertama di Areal yg sama Kelurahan Baru Seberang Tahun 2016

## Lampiran 4. Simpulan Hasil Wawancara

No	Komponen Penilaian	Sub Komponen		Item Pertanyaan	Kesimpulan
1	Orientasi Organisasi	Filosofi Organisasi	Keberadaan visi dan misi organisasi	1. Bagaimana Rumusan Visi, Misi dan Tujuan Organisasi?	Visi dan Misi, Ada dan ditetapkan sesuai dengan aturan pembentukan BPBD
		Isu Strategis	Isu strategis organisasi	2. Apa saja isu-isu strategis yang terkait dengan organisasi? 3. Bagaimana isu-isu strategis tersebut terkait dengan visi, misi dan tujuan?	Isu-isu strategis mengacu pada Renstra BPBD Kobar tahun 2012 dan 2017 Merupakan hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana mewujudkan tujuan untuk mencapai misi BPBD Kobar
		Sistem Nilai dan Penerapannya	Sistem nilai yang dianut	4. Apa saja nilai dan sistem nilai yang dianut organisasi?	Nilai-nilai yang dianut BPBD Kobar mengacu pada amanat UU no.24 tahun 2007 Berdasarkan segitiga biru dalam logo BPBD, maka penanggulangan bencana merupakan tugas dari pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dan berpedoman pada apa-apa yang digunakan BNPB
		Peran Organisasi	Tugas pokok dan fungsi termasuk struktur organisasi	5. Apakah struktur organisasi sudah sesuai dengan orientasi organisasi?	Struktur berdasarkan SK Pembentukan dan Mengacu pada aturan Menteri tentang Pembentukan BPBD
2	Tata Kelola	Pembagian Kekuasaan dan Wewenang	Model pembagian Kekuasaan dan Wewenang	6. Hal-hal apa yang mendasari pembagian wewenang? 7. Siapa saja yang terlibat dalam penentuan kewenangan tsb? 8. Bagaimana proses penempatan personil pada bagian-bagian organisasi? 9. Adakah konflik kepentingan dalam pemilihan tsb? 10. Adakah pertukaran/Pergantian personil secara regular?	Kekuasaan wewenang dibagi habis, penempatan pembagian wewenang diatur sebagaimana berdasarkan surat Keputusan Bupati dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sampai dengan setingkat kasi, pejabat paling tinggi wewenang dibagi habis sesuai dengan tupoksi sesuai aturan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat No. 3 Tahun 2012  Penentuan kewenangan berdasarkan Tim Ortal Pemerintah Daerah Personil ditempatkan secara struktural oleh tim Baperjakat Pemda Kobar  Selama dalam 4 tahun belum ada pergantian personil struktural, yang terjadi adalah pengurangan personil, karena terjadinya pemisahan kewenangan
		Mekanisme Pengambilan Keputusan	Sistem pengambilan keputusan dan Dominasi	11. Bagaimana mekanisme pengambilan keputusan dalam organisasi? 12. Siapa saja yang terlibat dalam pengambilan	Pengambilan Keputusan dilakukan berjenjang, walaupun, Kepala Pelaksana memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan sesuatu.  Secara struktural keputusan kantor dipegang oleh pucuk

				<p>keputusan?</p> <p>13. Adakah dominasi pengambilan keputusan?</p> <p>14. Mengapa hal tersebut terjadi?</p> <p>15. Apakah mekanisme pengambilan keputusan dijalankan sesuai dengan kekuasaan/kewenangan atau fungsi/tugas pokok masing-masing bagian?</p>	<p>pimpinan</p> <p>Mekanisme pengambilan keputusan dijalankan sesuai kekuasaan dan wewenang, dalam pengambilan keputusan di bidang-bidang dilaksanakan oleh kepala bidang, namun dengan arahan dari kepala pelaksana</p>
		Mekanisme Transparansi dan Akuntabilitas	Pengelolaan Laporan dan Publikasi	<p>16. Bagaimana sistem pelaporan pada BPBD</p> <p>17. Pengukuran kinerja dan Publikasi kepada masyarakat umum</p>	<p>Setiap bulan dilaksanakan monitoring dan evaluasi dengan pelaporan fisik dan keuangan</p> <p>Biasanya laporan RFK dilaporkan kepada bappeda melalui online baik itu kegiatan yg didanai APBD maupun bantuan dari Pusat</p> <p>Penilaian kinerja individu dilakukan oleh atasan langsung, sedangkan kinerja lembaga dibuat dalam bentuk LAKIP dan dilaporkan kepada Bappeda</p> <p>Belum ada publikasi resmi kepada khalayak atas kinerja BPBD Kobar</p> <p>sistem perencanaan program dan kerja BPBD mengacu pada aturan baku sistem pemerintahan dimana pengelolaan kepengurusan instansi harus transparan dan terukur.</p> <p>Progran dan kegiatan yang dilaksanakan BPBD setiap tahunnya disosialisasikan pada masyarakat, dalam kegiatan sosialisasi penanggulangan bencana, dengan menghadirkan para stakeholder, baik itu masyarakat dalam perwakilan relawannya, pelajar, LSM dan pihak swasta.</p>
3	Manajemen Organisasi	Manajemen Sumberdaya Manusia	Sistem dan Prosedur manajemen SDM	<p>18. Seperti apa komposisi staf saat ini</p> <p>19. Adakah sistem dan prosedur manajemen SDM lembaga yang baku dan terimplementasi?</p> <p>20. Apakah ada skema pengembangan SDM?</p> <p>21. Apakah dijalankan secara konsisten?</p>	<p>Staf di bidang-bidang ditempatkan dalam komposisi, kepala bidang, kepala seksi dan 1 staf, namun ada kepala seksi ada yg tidak memiliki staf.</p> <p>Tidak ada sistem baku yang diimplementasikan</p> <p>Skema pengembangan SDM belum dibentuk, hanya mengandalkan undangan pelatihan</p>
		Manajemen	Pengumpulan,	22. Adakah aturan baku terkait	Belum aturan baku yang digunakan

		Informasi	Pengelolaan dan Pendistribusian Informasi	<p>manajemen informasi?</p> <p>23. Bagaimana proses pengumpulan dan pengolahan informasi dilakukan?</p> <p>24. Siapa yang melakukan?</p>	<p>Informasi didapatkan dari laporan, dari komunikasi Grup WA</p> <p>Internal BPBD ada grup WA, dan pimpinan juga ikut dalam Grup WA lain</p> <p>Informasi diterima dari mana saja, kasi pencegahan yang memiliki jejaring informasi yang luas</p> <p>ada juga para staf yang mendapatkan informasi dari teman-temannya, informasi kejadian bencana dari berita</p> <p>belum ada pengelolaan informasi terstruktur</p>
		Manajemen Keuangan	Sistem dan Prosedur Pengelolaan Dana dan Anggaran	<p>25. Adakah aturan baku menyangkut manajemen keuangan?</p> <p>26. Bagaimana mekanisme kontrol keuangan?</p> <p>27. Siapa saja yang memiliki akses terhadap informasi keuangan?</p> <p>28. Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban keuangan dilakukan?</p> <p>29. Bagaimana laporan keuangan disusun</p> <p>30. Siapa saja yang terlibat dalam penyusunannya?</p>	<p>Sudah Ada aturan baku menyangkut manajemen keuangan yaitu peraturan bupati kotawaringin Barat no.33 tahun 2013 tentang mekanisme pembayaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kotawaringin Barat</p> <p>Peraturan ersebut kami aplikasikan secara konsisten</p> <p>Informasi keuangan dapat diakses oleh pihak-pihak yang memiliki wewenang yaitu pihak badan pengelola keuangan dan aset daerah serta bagian keuangan SKPD yang bersangkutan</p> <p>Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyelaraskan akuntansi dan transaksi keuangan, aset, utang, dan pembiayaan yang berada dalam tanggungjawab</p> <p>Laporan disampaikan ke Bupati lewat DPKAD</p> <p>Laporan-laoran isinya pertanggungjawaban ada laporan realisasi anggaran, neraca laporan arus kas, dan CALK pakai standar akuntansi pemerintah.</p> <p>Penyusunan Laporan keuangan tidak dikerjakan sendiri tapi sama-sama dengan bagian umum, pegurus barang, kuasa pengguna anggaran dan PPTKnya diperiksa dan ditandatangani oleh Kalak sebelum disampaikan</p>
		Manajemen Peralatan dan Logistik	Sistem pengelolaan Peralatan dan Logistik	<p>31. Adakah sistem baku pengelolaan logistik dan peralatan ?</p> <p>32. Apakah diaplikasikan secara konsisten?</p> <p>33. Adakah bagian khusus yang melakukan pengelolaan?</p> <p>34. Bagian apa?</p> <p>35. Bagaimana mekanisme kontrol penggunaan peralatan?</p> <p>36. Adakah sistem mobilisasi</p>	<p>Aturan baku mengacu pada Perka BNPB, dan Pengelolaan Aset Daerah</p> <p>Diaplikasikan dalam pengelolaannya, namun belum maksimal secara konsisten</p> <p>Bidang kusus pengelola peralatan selain bidang umum sebagai pemegang barang daerah, juga terdapat Bidang Kedaruratan dan Logistik yang membawahi peralata dan logistik yang khusus untuk menanggulangi bencana</p> <p>Sudah ada mekanisme control penggunaan, karena sudah ada bidang khusus yang menangani. pengelolaan logistik mengacu pada PP no. 21 dan 22 tahun 2008 tentang</p>

				<p>peralatan, logistik?</p> <p>37. Bagaimana pendistribusian dalam Penanggulangan Bencana?</p>	<p>penyelenggaraan bencana dan tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana dengan melaksanakan penyusunan perencanaan, pendistribusian pemantauan evaluasi dan laporan</p> <p>Belum ada aturan mobilisasi baku dan sistem yang digunakan, hanya dilaksanakan sesuai dengan keperluan dan kondisi bencana yang ada dan harus ditangani</p>
		Manajemen Kantor	Sistem pengelolaan kantor yang baku	<p>38. Adakah sistem baku pengelolaan kantor?</p> <p>39. Apakah dilaksanakan secara konsisten?</p> <p>40. Adakah bagian khusus yang melakukan pengelolaan?</p> <p>41. Bagian apa?</p> <p>42. Apakah sumberdaya-sumberdaya organisasi dimanfaatkan secara adil dan oleh seluruh staff?</p>	<p>kita memiliki manajemen kantor yang konsisten dijalankan sesuai tugas pokok dan fungsi, untuk bagian penanggulangan bencana ini ada yang mengelola untuk keuangan ada bidang keuangan, Penanggulangan Bencana untuk kedaruratan ada di bidang dua, bidang dua itu ada kedaruratan dan logistik, adapun untuk kesiapsiagaan ada di bidang 1 dan untuk menilai tingkat kerusakan, ada di bidang 3</p>
		Mekanisme Pengelolaan Konflik	Tingkat konflik di kantor	<p>43. Bagaimana Organisasi menyelesaikan konflik?</p> <p>44. Apakah penyelesaiannya dilaksanakan secara adil?</p> <p>45. Adakah mekanisme baku penyelesaian konflik untuk mengatasi persoalan persoalan internal?</p> <p>46. Adakah potensi konflik pemilihan strategi organisasi yang tergabung dalam jaringan kerja tersebut?</p>	<p>Utk penyelesaian konflik secara internal kami menyelesaikan secara kekeluargaan, kita panggil staf yang bermasalah dan kita lakukan penyelesaian secara kekeluargaan</p>
4	Manajemen Program	Pendekatan Pengelolaan Program	Model pendekatan pengelolaan program	<p>47. Apa pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan program?</p> <p>48. Apakah pendekatan tsb digunakan dalam setiap tahapan/proses pengelolaan program Dalam perencanaan, implementasi dan monitoring?</p> <p>49. Apakah dilaksanakan pengembangan monitoring</p>	<p>Pengelolaan program dan kegiatan di BPBD Kobar mengacu pada Rencana Strategis yang telah dibuat</p> <p>Ya, Pendekatan dilakukan kontinyu dan berjenjang baik dalam perencanaan, implementasi dan monitoring.</p> <p>Belum ada pengembangan pengawasan dan evaluasi, semua hanya mengacu pada prosedur, sesuai tata urutan pelaporan</p> <p>Evaluasi program dijalankan jika terdapat kendala saja</p> <p>Tentunya dipakai untuk memperbaiki dan menjadi tindaklanjut dalam merubah strategi</p>

			<p>sesuai pendekatan yang digunakan?</p> <p>50. Apakah dilakukan monitoring secara regular?</p> <p>51. Apa yang dilakukan terhadap hasil monitoring tsb?</p> <p>52. Apakah dilakukan evaluasi program?</p> <p>53. Sejauh mana hasil evaluasi dimanfaatkan untuk perbaikan strategi program?</p>	
	Pelibatan Penerima Manfaat	Keterlibatan Masyarakat dalam perencanaan program dan kegiatan	<p>54. Adakah masyarakat terlibat dalam penyusunan program kunci/program inti organisasi?</p> <p>55. Bagaimana prosesnya?</p> <p>56. Apakah masyarakat memiliki peran aktif dalam program/kegiatan organisasi?</p> <p>57. Apakah ada keterlibatan pihak ketiga (instansi swasta – pihak dunia usaha) dalam program/kegiatan organisasi?</p> <p>58. Bagaimana model keterlibatannya?</p>	<p>dalam penyusunan program masyarakat terlibat, dalam hal ini keterlibatan masyarakat adalah dalam menyusun proposal atau usulan kegiatan yang disampaikan dalam forum musrenbang Desa musrenbang Kecamatan dan berlanjut sampai ke musrenbang Kabupaten</p> <p>Menyangkut peran aktif masyarakat yaitu untuk kegiatan fisik atau infrastruktur masyarakat tidak terlibat secara aktif, keterlibatan masyarakat secara aktif terjadi pada kegiatan non fisik yaitu berupa peningkatan kapasitas yaitu berupa pelatihan, sosialisasi serta penanganan kejadian atau aksi penanggulangan kejadian bencana masyarakat ikut terlibat secara aktif. Sedangkan keterlibatan instansi swasta atau dunia usaha dalam program kegiatan organisasi adalah Dalam peningkatan kapasitas kerjasama dilakukan ketika ada kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan atau dunia usaha biasanya mereka meminta kepada APBD untuk mengirimkan salah satu aparturnya untuk menjadi narasumber, sedangkan untuk kejadian apabila terjadi sesuatu di lapangan pihak swasta juga terlibat aktif contohnya dalam penanggulangan kebakaran, kerjasama tersebut biasanya di dahului dengan suatu kerjasama operasional yg terjadi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dengan BPBD</p>
	Proses pembelajaran		<p>59. Apakah ada mekanisme pembelajaran dalam organisasi?</p> <p>60. Apakah pembelajaran dilakukan secara konsisten?</p> <p>61. Apakah organisasi terus bertumbuh memperbaiki</p>	<p>Proses pembelajaran untuk para aparatur BPBD dilakukan secara konsisten yaitu ada beberapa aparatur kita yang dikirim keluar daerah untuk mengikuti bintek, baik itu bintek implementasi perundang-undangan ataupun pelatihan penanggulangan bencana atau Bintek di bidang kebencanaan, dengan adanya bintek-bintek tersebut maka secara otomatis organisasi terus tumbuh memperbaiki diri, naa ,..</p>



				diri? 62. Bagaimana organisasi memanfaatkan hasil pembelajaran tersebut?	pemanfaatan pembelajaran tersebut diimplementasikan sesuai dengan tupoksi masing-masing di bidang atau kasi-kasi seperti contoh untuk bintek penyusunan program itu biasanya diimplementasikan dalam teknik atau cara-cara penyusunan program, penyusunan laporan kinerja, dan penyusunan laporan kejadian bencana dan lain-lainnya
5	Komponen Berkelanjutan	Mobilisasi Sumberdaya		63. Apa strategi yang dilakukan organisasi dalam menggalang/mobilisasi sumberdaya 64. Sumberdaya apa saja yang dimobilisasi?	Organisasi hanya mengumpulkan stakeholder terkait melakukan pembicaraan dan menunggu bantuan dari para pihak, selain itu pula melaksanakan inventarisir personil, peralatan, dan logistik  Sementara yang bisa dimobilisasi adalah peralatan dan logistik yang dimiliki BPBD, terkait dengan pengerahan logistik dan peralatan dari luar masih dikoordinasi oleh Kalak BPBD, karena bukan bagian dan wewenang dari kita agak sulit melakukan mobilisasi logistik dari pihak lain. Namun secara internal mekanismenya sudah dijelaskan tadi-jika terjadi kondisi kebakaran atau kondisi kebencanaan secara khusus maka kita akan langsung menurunkan peralatan dan logistik. Lalu belum ada mekanisme khusus untuk memobilisasinya terutama jika peralatan dan personilnya terkait dengan instansi lain yang ada hanya posko terpadu dengan para staf yang melaksanakan penjagaan secara bergantian
		Kaderisasi/Regenerasi		65. Adakah upaya-upaya melaksanakan regenerasi personil? 66. Apa strategi yang dijalankan? 67. Adakah upaya organisasi untuk memastikan bahwa keahlian individu bisa didistribusikan? 68. Adakah penyebaran pengetahuan sehingga tidak terjadi keahlian terpusat?	Belum ada upaya regenerasi personil Belum ada penyebaran keahlian
		Kepercayaan dan Legitimasi Publik	Mekanisme interaksi dan komunikasi dengan	69. Apakah lembaga mengembangkan mekanisme khusus untuk berinteraksi	Belum ada interaksi khusus  Selama ini komunikasi hanya dilakukan parsial, dalam

			masyarakat lintas sektor dan swasta	<p>dan berkomunikasi dengan publik termasuk komunikasi tentang perkembangan pencapaian visi dan misi organisasi dan pemanfaatan sumber daya organisasi?</p> <p>70. Seperti apa mekanisme yang telah dijalankan?</p> <p>71. Apakah dilaksanakan regular?</p> <p>72. Sejauhmana tingkat keberhasilannya selama ini?</p> <p>73. Bagaimanakah persepsi publik terhadap organisasi selama ini?</p> <p>74. Apakah terjadi perubahan persepsi publik setelah terjadi interaksi dan komunikasi?</p>	<p>sosialisasi massal</p> <p>Sosialisasi dilaksanakan setiap tahun, namun jika regular secara intensif dalam periode khusus belum ada interaksi dan komunikasi</p> <p>Tingkat keberhasilan kecil, artinya masyarakat hanya sebagian kecil saja yang benar-benar paham BPBD</p> <p>Persepsi publik baik, namun untuk ini masih perlu kajian mendalam.</p> <p>Fungsi BPBD terutama di Kabupaten Kobar berjalan dengan sangat baik, sebagai fungsi koordinator berjalan dengan baik, dimana kami tim teknis di lapangan tim pemadam lapangan benar-benar merasa terorganisir dengan segala sesuatu yang sudah disusun dan direncanakan teman-teman BPBD, termasuk kegiatan seperti apel gelar siaga bencana kemudian kita juga untuk persiapan apel, patroli-patroli lapangan, rapat-rapat koordinasi, sampai dengan di tingkat posko terpadu yang juga kita jalankan di kantor damkar, dan menurut saya citra kantor BPBD Kobar sangat baik dengan tanggapnya teman-teman dari BPBD terkait bencana-bencana</p>
6	Kinerja Organisasi	Penguatan proses kualitas pemberdayaan masyarakat	Kerjasama antar para pihak	<p>75. Bagaimana kinerja organisasi dalam setiap sub komponen organisasi?</p> <p>76. Apa dampaknya bagi layanan terhadap masyarakat?</p> <p>77. Apakah ada harmonisasi kerja antara organisasi dan masyarakat?</p> <p>78. Apakah terdapat pelibatan masyarakat pada program dan kegiatan yang dilaksanakan organisasi?</p>	<p>kinerja organisasi cukup baik, artinya setiap pihak setiap bidang bekerja sesuai dengan tupoksinya</p> <p>layanan masyarakat cepat, karena urgensi dari pelaksanaan tugas-tugas penanggulangan bencana</p> <p>belum terlihat bentuk harmonisasinya namun, masyarakat seringkali turut ambil bagian dalam penanganan darurat</p> <p>keterlibatan dalam kegiatan ada, karena masyarakat merupakan sasaran pelaksanaan kegiatan instansi</p>
		Penguatan tingkat kepercayaan masyarakat	Komunikasi aktif masyarakat dengan lembaga	<p>79. Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap organisasi?</p> <p>80. Apakah terdapat kerjasama antara organisasi dan masyarakat?</p> <p>81. Adakah jejaring komunikasi</p>	<p>Sangat baik</p> <p>Belum ada, kesepakatan khusus, yg ada hanyalah kerjasama kerjasama farsial</p>

			<p>antara masyarakat dan organisasi?</p> <p>82. Apakah komunikasi dilaksanakan secara regular?</p> <p>83. Seberapa penting masukan dari masyarakat diambil/dijadikan patokan dalam perencanaan program dan kegiatan organisasi?</p>	<p>Masukan masyarakat merupakan usulan yg ditampung dan dilanjutkan sebagai bagian dari menjalankan program dan kegiatan BPBD Kobar, selama ini belum menjadi patokan karena keterbatasan pendanaan</p>
Perluasan intensifikasi hubungan kerja	Hubungan kerjasama dengan masyarakat	<p>84. Apakah organisasi memiliki hubungan kerja/partnership dengan pihak lain?</p> <p>85. Pihak manasaja yang terkait?</p> <p>86. Bagaimanakah hubungan kerja itu dibentuk?</p> <p>87. Sejauh mana hubungan kerja antara organisasi dengan stakeholder dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan?</p> <p>88. Apakah terdapat fungsi koordinasi?</p> <p>89. Adakah struktur pembagian tugas dalam hubungan kerja dengan pihak lain?</p> <p>90. Adakah pertemuan periodik yang dilaksanakan dalam jejaring kerjasama?</p>	<p>Ada hubungan kerja dengan pihak lain, yang termuat dalam bentuk surat keputusan dan surat keputusan bersama untuk bekerja menanggulangi bencana, khususnya pada kondisi tanggapdarurat</p> <p>Pihak penegak hukum, instansi vertical, sesame SOPD di pemerintah, pihak swasta</p> <p>Terbentuk kondisional</p> <p>Terdapat fungsi koordinasi dalam keseluruhan kegiatan yg dilaksanakan BPBD Kobar, karena penyelenggaraan penanggulangan bencana sifatnya lintas sektor</p> <p>Ada, dalam surat keputusan Namun dalam cakupan yang lebih luas belum ada</p> <p>Pertemuan dalam jejaring kerjasama, berbentuk rapat koordinasi</p>	
Penguatan keberlanjutan program dan kegiatan di masyarakat	Keberlanjutan program	<p>91. Bagaimanakah penerapan program dan kegiatan di masyarakat?</p> <p>92. Apakah program-program dilaksanakan kontinyu?</p>	<p>Program dan kegiatan secara utuh dilaksanakan setiap tahun, dikerjakan berdasarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran yg memuat program dan kegiatan BPBD Kobar</p> <p>Program tersebut direncanakan secara kontinyu, dan dilaksanakan secara kontinyu pula Namun dalam pelaksanaan di lapangan, ternyata beberapa kegiatan tidak dapat dikerjakan karena keterbatasan personil dan dana</p>	



## Lampiran 5. Kegiatan penanganan kebakaran lahan dan hutan pada tahun 2016

### Laporan Kegiatan Penanganan Darurat Kebakaran Lahan dan Hutan Tahun 2016

#### A. Bentuk Penanganan

- b. Sosialisasi
- c. Mendirikan Posko gabungan
- d. Patroli Gabungan
- e. Pemadaman sejak dini Kebakaran Lahan dan Hutan yang menyebabkan Bencana Kabut Asap dengan mengintegrasikan seluruh Stake Holder (Personil beserta sarana prasarana) melalui Jalur Darat maupun Udara.

#### B. Jumlah Personil Terlibat

- a. BPBD/Damkar 56 Personil
- b. Kodim 1014 100 Personil
- c. Manggala Agni DAOPS III Kalimantan Tengah 60 Personil
- d. Polres Kobar 100 Personil
- e. Kecamatan 36 Personil
- f. Tagana 12 Personil
- g. Satpol PP 10 Personil
- h. Lanud Iskandar 20 Personil

#### C. Jumlah Hotspot dan Luasan Terbakar

Terdapat 52 Hotspot terpantau dalam periode 1 Juli – 30 September 2016 Berdasarkan luasan terbakar 1.094,1 ha dan yang mampu ditangani seluas 839,1 Ha

#### D. Tindakan Penanggulangan

##### Kegiatan Pencegahan :

1. Membuat himbauan serta Instruksi yang ditujukan kepada Instansi, Pihak Perusahaan serta seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan kewaspadaan dan antisipasi terhadap kebakaran hutan, lahan dan pekarangan serta fasilitas publik yang berpotensi bencana kabut asap.
2. Membuat himbauan yang ditujukan kepada Pihak Perusahaan serta seluruh lapisan masyarakat yang memiliki lahan dan perkebunan agar menghindari kegiatan yang berpotensi menimbulkan kebakaran.
3. Menyebarluaskan informasi Bencana Kebakaran Hutan, Lahan dan Pekarangan yang Berpotensi Bencana Kabut Asap melalui media elektronik setempat;

4. Membentuk Terpadu Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan yang di komando langsung oleh Bupati Kotawaringin Barat;
5. Mengaktifkan POSKO dan menyiapkan sumber daya yang ada untuk pemantauan dan pengendalian operasi pemadaman yakni :
  - Posko BPBD
  - Posko BKSDA
  - Posko Dinas Kehutanan
 Posko Udara di Base Ops Lanud Iskandar Pangkalan Bun

### **Kegiatan Kesiapsiagaan**

Kegiatan tersebut berupa :

1. Pemantauan cuaca dan kondisi udara serta tingkat kelembaban tanah dan vegetasi yang memungkinkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan serta arah angin yang mengontrol penyebaran polusi asap.(BMKG Kabupaten Kotawaringin Barat);
2. Pemantauan titik panas (titik api) dilakukan dengan cara memantau jumlah titik panas yang muncul/ terlihat dari data satelit (BMKG Kabupaten Kotawaringin Barat);
3. Pemantauan titik api dilapangan oleh TIM Patroli;
4. Pemantauan jarak pandang (Visibility) sebagai indikator atau parameter bencana dilakukan oleh BMKG;Mengintensifkan melaksanakan penyuluhan pertanian dan perkebunan untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan untuk persiapan pertanamannya oleh Dinas terkait;
5. Memberikan tindakan yang tepat bagi para pelaku pembakaran untuk memberikan efek jera bagi para pelaku oleh pihak berwenang.
6. Dalam rangka antisipasi dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah menyiapkan rumah singgah, pembagian masker, dukungan pengobatan terhadap pasien ISPA yang terdampak kabut asap

### **Kegiatan Penanggulangan**

#### **1. Pemadaman Darat**

Operasi pemadaman Darat dilakukan secara simultan dengan mengintegrasikan tindakan pemadaman sedini mungkin yaitu Pengerahan seluruh Instansi baik dari TNI/POLRI, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Damkar, BKSDA, Dinas Kehutanan, , Tagana, Badan Usaha/ Perusahaan serta Elemen Masyarakat.

Adapun dukungan peralatan adalah sebagai berikut

Mobil Pemadam Kebakaran : 5 Unit (BPBD)

Mobil Tangki Supply : 10 Unit (BPBD, BKSDA, Dishut)

Mesin Portable Besar : 8 Unit (BPBD, BKSDA, Dishut)

Mesin Portable Kecil : 25 Unit (BPBD, BKSDA, Dishut)

Mesin Portable Apung : 5 Unit (BPBD, BKSDA, Dishut)

Unit Pemadam Swakarsa : 5 Unit

## 2. Pemadaman Udara

Operasi Pemadaman Udara dilakukan dengan menggunakan Sarana BNPB dengan melibatkan 2 Unit Helly Bell 21 4B N-234PH dan N49732 adapun komando berpusat di Lapangan Udara Lanud Iskandar Pangkalan Bun. Sedangkan target operasi yaitu pemadaman titik Hotspot yang tidak terjangkau oleh Operasi pemadaman Darat.

## E. Permasalahan

1. Belum intensifnya Posko Penjagaan di Areal Rawan Kebakaran Lahan dan Hutan akibat kurangnya anggaran operasional;
2. Keterbatasan sarana prasarana serta minimnya jumlah personil guna pencegahan dan kesiapsiagaan serta pemantauan langsung kewilayah rawan kebakaran hutan, lahan dan pekarangan.
3. Prilaku oknum masyarakat maupun perusahaan masih destruktif yang mengakibatkan masih adanya pengolahan maupun pembukaan lahan perkebunan dan pertanian dengan cara membakar;
4. Luasnya areal yang terbakar ditambah jangkauan sarana pemadaman yang tidak mampu mencapai lokasi kebakaran.
5. Keterbatasan Anggaran Operasional;
6. Belum terealisasinya solusi Olah Lahan Tanpa Bakar

Pangkalan Bun, 12 Desember 2016

Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Kotawaringin Barat

  
Drs. Hermon, M. Si